



PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

# RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan  
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tahun 2023 - 2028





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023

## LAPORAN AKHIR

# **PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**





# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kotawaringin Barat dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Akhir ini secara umum menjabarkan kondisi umum wilayah, profil kemiskinan konsumsi dan non konsumsi, prioritas program, lokasi prioritas, dan program prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2028

Semoga laporan akhir ini dapat memberikan rekomendasi rencana yang implementatif dan solutif dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya laporan ini.

Pangkalan Bun, 28 Juli 2023

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR .....	8
DAFTAR TABEL.....	12
BAB 1 PENDAHULUAN .....	17
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Maksud dan Tujuan .....	18
1.2.1 Maksud .....	18
1.2.2 Tujuan.....	18
1.2.3 Sasaran .....	18
1.3 Dasar Hukum.....	18
1.4 Peran TKPK dalam menyusun RPKD .....	20
1.5 Sistematika Penulisan .....	21
BAB II KONDISI UMUM DAERAH .....	23
2.1 Aspek Geografi.....	23
2.2 Aspek Demografi.....	26
2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial.....	29
2.3.1 Aspek Pembangunan Manusia.....	29
2.3.2 Aspek Ketenagakerjaan .....	35
2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.4.1 Pendapatan Daerah.....	36
2.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	38
2.4.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	41
2.4.4 Aspek Pelayanan Umum .....	45
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	50
3.1 Kajian Kemiskinan .....	50
3.2 Profil Kemiskinan Konsumsi.....	51
3.2.1 Persentase penduduk miskin (P0).....	51
3.2.2 Jumlah penduduk miskin .....	53
3.2.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) .....	57
3.2.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2).....	58
3.2.5 Garis kemiskinan (GK) .....	58
3.3 Profil Kemiskinan Non Konsumsi.....	61
3.3.1 Bidang Pendidikan.....	61
3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	61



3.3.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) .....	63
3.3.1.3.	Angka Melek Huruf.....	65
3.3.1.4.	Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki .....	67
3.3.1.5.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR.....	67
3.3.1.6.	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat .....	68
3.3.2	Bidang kesehatan.....	69
3.3.2.1.	Angka Kematian Bayi.....	70
3.3.2.2.	Angka Kematian Balita.....	70
3.3.2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup .....	70
3.3.2.4.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak.....	71
3.3.2.5.	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	73
3.3.2.6.	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih .....	74
3.3.2.7.	Cakupan pelayanan Antenatal (Sedikitnya Satu Kali Kunjungan dan Empat Kali Kunjungan) (K1 dan K4) .....	76
3.3.2.8.	Wanita Menikah Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB ....	76
3.3.2.9.	Tingkat Kelahiran Usia Muda (Per 1.000 Perempuan Usia 15-49 Tahun) .....	78
3.3.2.10.	Angka Penemuan Pasien <i>Tuberculosis</i> (TB) BTA Positif Baru.....	79
3.3.2.11.	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien <i>Tuberculosis</i> (TB) .....	80
3.3.2.12.	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi .....	81
3.3.2.13.	Kinerja Angka Harapan Hidup – Indikator Utama Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.....	83
3.3.3	Bidang Ketenagakerjaan .....	84
3.3.3.1.	Angka Pengangguran .....	84
3.3.3.2.	Jumlah Angkatan Kerja.....	85
3.3.3.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	87
3.3.3.4.	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.....	88
3.3.4	Bidang Infrastruktur Dasar.....	88
3.3.4.1.	Akses Sanitasi Layak .....	89
3.3.4.2.	Akses Air Minum Layak.....	90
3.3.4.3.	Proporsi Rumah Tinggal Layak Huni .....	91
3.3.4.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Kepemilikan Hak Atas Rumah/Tempat Tinggal .....	93
3.3.4.5.	Rasio Elektrifikasi .....	94
3.3.4.6.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2017-2021.....	95
3.3.4.7.	Capaian dan Target Indikator Kawasan Permukiman Kumuh Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.....	95
3.3.4.8.	Capaian dan Target Indikator Bidang Infrastruktur Dasar.....	96



3.3.5	Bidang Ketahanan Pangan .....	97
3.3.5.1.	Perkembangan Harga Beras.....	97
3.3.5.2.	Produksi Bersih Serealia .....	98
3.3.5.3.	Harga Bahan Pokok.....	99
3.3.5.4.	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan.....	101
3.3.5.5.	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan .....	102
3.4	Informasi Sosial Budaya Yang Berkaitan Dengan Isu Kemiskinan Dan Isu-Isu Terkait Lainnya .....	102
3.4.1	Isu Strategis .....	102
3.4.2	Capaian dan Target Kinerja Tujuan Pembangunan Dalam Pengurangan Kemiskinan Masyarakat.....	103
3.5	Persebaran Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	104
BAB IV PRIORITAS PROGRAM .....		107
4.1	Hasil Analisa Determinan Kemiskinan <i>Theory of Change (ToC)</i> / Logika Program.....	107
4.1.1.	ToC Bidang Pendidikan .....	108
4.1.2.	ToC Bidang Kesehatan .....	110
4.1.3.	ToC Bidang Ketenagakerjaan .....	112
4.1.4.	ToC Bidang Infrastruktur Dasar .....	114
4.1.5.	ToC Bidang Ketahanan Pangan.....	116
4.2	Komposisi APBD Berdasarkan Pendapatan dan Belanja .....	118
4.2.1.	Pendapatan Daerah.....	118
4.2.2.	Belanja Daerah .....	121
4.2.3.	Pembiayaan Daerah .....	123
4.3	Sumber Pendapatan Daerah.....	127
4.3.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	127
4.3.2.	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Ruang Fiskal.....	130
BAB V LOKASI PRIORITAS .....		154
5.1	Lokasi Prioritas Berdasarkan <i>Theory Of Change</i> .....	154
5.2	Teori Perubahan menurut Kurt Lewin.....	154
5.3	Teori Perubahan menurut Rogers E .....	155
5.4	Klaster Indikator Utama dan Program Penanggulangan Kemiskinan.....	156
5.5	Lokasi Prioritas.....	157
5.4.1.	Masyarakat Penduduk Miskin Ekstrem Berpendidikan Rendah .....	158
5.4.2.	Minim Akses Pada Pekerjaan.....	160
5.4.3.	Umumnya Memiliki Akses Yang Minim Pada Sanitasi Layak.....	164
5.4.4.	Umumnya Tidak Memiliki Akses Pada Air Minum Layak .....	165
5.4.5.	Mayoritas Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni .....	167



5.4.6. Mayoritas Balita Dari Keluarga Miskin Ekstrem Belum Mendapat Imunisasi Dasar Yang Lengkap Cenderung Malnutrisi .....169

5.4.7. Lokasi Prioritas Berdasarkan Desil .....170

BAB VI PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023-2028 .....174

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



# DAFTAR GAMBAR

## **BAB II KONDISI UMUM DAERAH**

Gambar 2. 1 Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat .....	23
Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	24
Gambar 2. 3 Persentase Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ..	27
Gambar 2. 4 Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 ....	28
Gambar 2. 5 Proporsi Penduduk Berdasarkan Kemplompok Umur Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	29
Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2021 .....	30
Gambar 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 .....	31
Gambar 2. 8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun).....	32
Gambar 2. 9 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun).....	33
Gambar 2. 10 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun).....	33
Gambar 2. 11 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Ribu Rupiah) .....	35
Gambar 2. 12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	36
Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 .....	41
Gambar 2. 14 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022.....	42
Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2022.....	43

## **BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

Gambar 3. 1 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 .....	52
Gambar 3. 2 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.....	52
Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.....	53



Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	57
Gambar 3. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.....	57
Gambar 3. 6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 .....	58
Gambar 3. 7 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 .....	59
Gambar 3. 8 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	61
Gambar 3. 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	62
Gambar 3. 10 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	64
Gambar 3. 11 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022 .....	66
Gambar 3. 12 Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	70
Gambar 3. 13 Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH di Kabupaten Barat Tahun 2019.....	71
Gambar 3. 14 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Campak/MR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	73
Gambar 3. 15 Angka Kematian Ibu per 1.000 KH di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	74
Gambar 3. 16 Proporsi kelahiran yang Ditolong oleh Penolong Kelahiran di Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	75
Gambar 3. 17 Jumlah Peserta KB Aktif di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021..	77
Gambar 3. 18 Persentase Jumlah Peserta KB Aktif di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.....	78
Gambar 3. 19 Prevalensi Gizi Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	82
Gambar 3. 20 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	82
Gambar 3. 21 Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 .....	83
Gambar 3. 22 Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	85
Gambar 3. 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022.....	87



Gambar 3. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022 .....	87
Gambar 3. 25 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Layak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 .....	89
Gambar 3. 26 Persentase Rumah Bersanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	90
Gambar 3. 27 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	91
Gambar 3. 28 Proporsi Rumah Tinggal Layak Huni di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	92
Gambar 3. 29 Rumah Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	92
Gambar 3. 30 Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2022 .....	93
Gambar 3. 31 Hasil Survei Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat	93
Gambar 3. 32 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2019 .....	94
Gambar 3. 33 Jumlah Pelanggan (RT) yang Terlayani dan Ketersediaan Daya Listrik (Kva) di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	94
Gambar 3. 34 Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	105
Gambar 3. 35 Peta Persebaran Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	106

#### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

Gambar 4. 1 Theory of Change Bidang Pendidikan .....	109
Gambar 4. 2 Theory of Change Bidang Kesehatan .....	111
Gambar 4. 3 Theory of Change Bidang Ketenagakerjaan.....	113
Gambar 4. 4 Theory of Change Bidang Infrastruktur Dasar .....	115
Gambar 4. 5 Theory of Change Bidang Ketahanan Pangan.....	117
Gambar 4. 6 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	118
Gambar 4. 7 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	121
Gambar 4. 8 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	123
Gambar 4. 9 Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2021.....	129
Gambar 4. 10 Rasio Derajat Ekonomi Fiskal (DOF) .....	130
Gambar 4. 11 Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	131



Gambar 4. 12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....132  
Gambar 4. 13 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....134

**BAB V LOKASI PRIORITAS**

Gambar 5. 1 Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan.....157  
Gambar 5. 3 Persentase KK Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022..170

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



# DAFTAR TABEL

## BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat ..	24
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	24
Tabel 2. 3 Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	27
Tabel 2. 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 .....	28
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	29
Tabel 2. 6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	35
Tabel 2. 7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Jenis Pendapatan (rupiah) Tahun 2020-2022.....	37
Tabel 2. 8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022 .....	38
Tabel 2. 9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022 .....	39
Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 .....	40
Tabel 2. 11 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022 .....	42
Tabel 2. 12 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2022.....	43
Tabel 2. 13 Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku, dan Nilai Tambah (Rupiah) Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	44
Tabel 2. 14 Iklim Investasi Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022.....	44
Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2021 .....	46
Tabel 2. 16 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2020-2021.....	46
Tabel 2. 17 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Pertama .....	46
Tabel 2. 18 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Akhir .....	46
Tabel 2. 19 Jumlah Guru Jenjang Taman Kanak-Kanak.....	47
Tabel 2. 20 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Dasar.....	47
Tabel 2. 21 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Pertama.....	47
Tabel 2. 22 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Akhir .....	48



Tabel 2. 23 Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat .....	48
Tabel 2. 24 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	48

### **BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 .....	53
Tabel 3. 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	54
Tabel 3. 3 Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	56
Tabel 3. 4 Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 .....	60
Tabel 3. 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.....	62
Tabel 3. 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	62
Tabel 3. 7 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 3. 8 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	63
Tabel 3. 9 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2022 ....	65
Tabel 3. 10 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022 .....	66
Tabel 3. 11 Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki di Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	67
Tabel 3. 12 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	67
Tabel 3. 13 Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026	68
Tabel 3. 14 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Campak/MR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	72
Tabel 3. 15 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	75
Tabel 3. 16 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4 di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	76
Tabel 3. 17 Indikator dan Capaian Kinerja Khusus KB Aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	77
Tabel 3. 18 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2017-2021 .....	78



Tabel 3. 19 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	79
Tabel 3. 20 Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 .....	79
Tabel 3. 21 Jumlah Kasus, Angka Kesembuhan, Angka Pengobatan, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 .....	81
Tabel 3. 22 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026	84
Tabel 3. 23 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	86
Tabel 3. 24 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	88
Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	95
Tabel 3. 26 Capaian dan Target Kinerja Indikator Bidang Permukiman (Permukiman Kumuh) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat .....	96
Tabel 3. 27 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	97
Tabel 3. 28 Perkembangan Harga Beras Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari – Juni Tahun 2023 .....	98
Tabel 3. 29 Luas Panen Serelia di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	98
Tabel 3. 30 Rekapitulasi Luas Panen (Ha) Serelia di Kotawaringin Barat Tahun 2020 .....	98
Tabel 3. 31 Perkembangan Luas Panen Serelia (ton/ha) di Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020 .....	99
Tabel 3. 32 Harga Bahan Pokok Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari – Mei Tahun 2023.....	99
Tabel 3. 33 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021 .....	101
Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras) .....	102
Tabel 3. 35 Target Kinerja Indikator Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026..	102
Tabel 3. 36 Kinerja Awal dan Target Indikator Tujuan Pembangunan dalam Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Kotawaringin Barat.....	103



#### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	119
Tabel 4. 2 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.....	122
Tabel 4. 3 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	124
Tabel 4. 4 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2022.....	125
Tabel 4.5 Skema Pembiayaan dan Jenis Pengembangan.....	127
Tabel 4. 6 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	129
Tabel 4. 7 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal.....	130
Tabel 4. 8 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	132
Tabel 4. 9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 .....	133
Tabel 4. 10 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan PAD/ TPD .....	133
Tabel 4. 11 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan BHPBP/ TPD .....	133
Tabel 4. 12 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan SBD/ TPD.....	134
Tabel 4. 13 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2021.....	136
Tabel 4. 14 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2022.....	148
Tabel 4. 15 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2023.....	151

#### **BAB V LOKASI PRIORITAS**

Tabel 5. 1 Penduduk Miskin Menurut KK dan Pendidikan Terakhir per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	159
Tabel 5. 2 Penduduk Miskin Menurut KK dan Pekerjaan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	161
Tabel 5. 3 Penduduk Miskin Menurut KK dan Akses Pada Sanitasi Layak per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	165
Tabel 5. 4 Penduduk Miskin Menurut KK dan Akses Pada Air Minum Layak per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	166
Tabel 5. 5 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Atap per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	167
Tabel 5. 6 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Dinding per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....	168



Tabel 5. 7 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Lantai per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....168

Tabel 5. 8 Penduduk Miskin Menurut KK dan Sumber Penerangan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....168

Tabel 5. 9 Penduduk Miskin Menurut KK dan Sumber Penerangan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .....169

Tabel 5. 10 Data P3KE Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....170

Tabel 5. 11 Data P3KE Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....171

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023-2028**

Tabel 6. 1 Indikasi Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028 .....177

BAPPEDALITBANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dari tahun ke tahun menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya.

Berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, telah menurunkan jumlah penduduk miskin, namun laju penurunan kemiskinan melambat. Di sisi lain kerentanan penduduk miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit diturunkan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) globalisasi yang berdampak pada gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; dan (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim.

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, beberapa indikator yang menjadi pentingnya disusun RPKD adalah sebagai berikut:

1. Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. RPKD dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya.
2. Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro). RPKD dalam hal ini perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal.
3. Terdapat karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. RPKD dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas



intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan dokumen rujukan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)** pada Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud dari kegiatan ini adalah penyusunan serta pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan rencana ini adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses metode pengumpulan data kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan penanggulangan kemiskinan.

### **1.2.3 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran rencana ini adalah:

1. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Terwujudnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

## **1.3 Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan kajian ini meliputi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktre;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Panduan Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah (Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037;
24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25); dan
25. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

#### **1.4 Peran TKPK dalam menyusun RPKD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten/Kota;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Keanggotaan TKPK Kabupaten/ Kota terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam rencana ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, yaitu paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum daerah;
- c. profil kemiskinan daerah;



- d. prioritas program; dan
- e. lokasi prioritas.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat ini meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH

BAB 3 PROFIL KEMISKINAN DAERAH

BAB 4 PRIORITAS PROGRAM

BAB 5 LOKASI PRIORITAS

BAB 6 PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023 – 2028

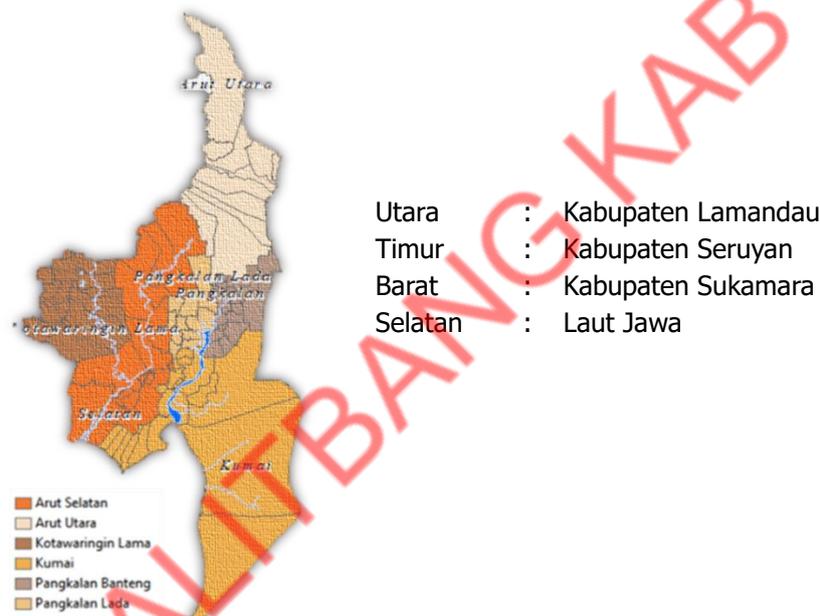
BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



## BAB II KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan ibukota Pangkalan Bun. Secara geografis, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 1°19' – 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' – 112°50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat juga terletak di antara 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 2. 1 Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas 10.759 km<sup>2</sup> atau 7,01% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 94 (sembilan puluh empat) desa. Kecamatan Kotawaringin Lama terdiri dari 15 desa dan 2 Kelurahan, Kecamatan Arut Selatan terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan, Kecamatan Kumai terdiri dari 15 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pangkalan Lada terdiri dari 11 desa, dan Arut Utara terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Jumlah keseluruhan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 81 desa

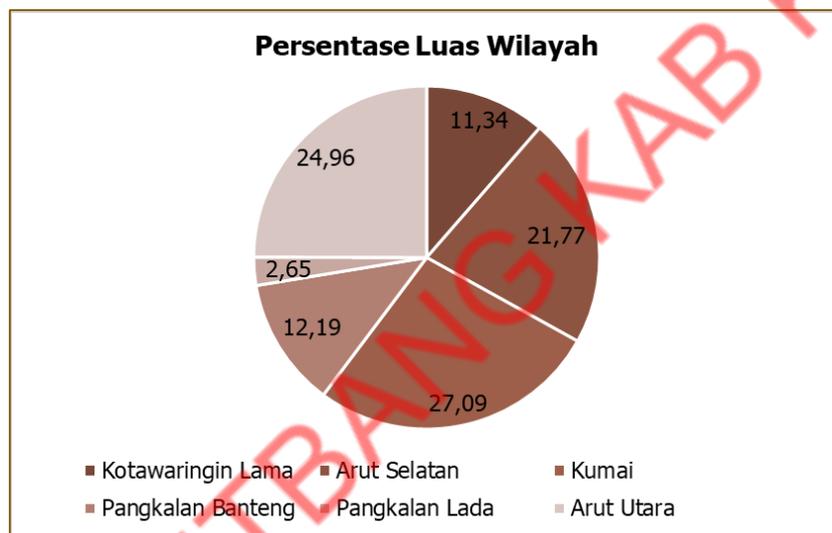


dan 13 kelurahan. Berikut adalah luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut kecamatan dan desa.

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat**

	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Persentase
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	1.219,83	11,34
2	Arut Selatan	Madurejo	2.342,66	21,77
3	Kumai	Candi	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	2.84,73	2,65
6	Arut Utara	Pangkut	2.685	24,96
	<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	<b>Pangkalan Bun</b>	<b>10.759</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

**Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
<i>Kotawaringin Lama</i>				
1		Babual Baboti	139,00	1,29
2		Tempayung	53,00	0,49
3		Sakabulin	31,00	0,29
4		Kinjil	43,00	0,40
5		Kotawaringin Hilir	520,00	4,83
6		Riam Durian	23,45	0,22
7		Dawak	41,00	0,38
8		Kotawaringin Hulu	114,00	1,06
9		Lalang	51,00	0,47
10		Rungun	71,00	0,66
11		Kondang	78,00	0,72
12		Sukamulya	7,02	0,07
13		Sukajaya	9,83	0,09
14		Suka Makmur	13,18	0,12



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
15		Ipuh Bangun Jaya	21,05	0,20
16		Sumber Mukti	3,00	0,03
17		Palih Baru	1,30	0,01
<i>Arut Selatan</i>				
1		Tanjung Putri	19,00	0,18
2		Kumpai Batu Bawah	19,45	0,18
3		Kumpai Batu Atas	30,00	0,28
4		Pasir Panjang	162,00	1,51
5		Mendawai	23,88	0,22
6		Mendawai Seberang	28,00	0,26
7		Raja	0,96	0,01
8		Sidorejo	9,00	0,08
9		Madurejo	26,00	0,24
10		Baru	70,62	0,66
11		Raja Seberang	115,00	1,07
12		Rangda	51,00	0,47
13		Kenambui	320,00	2,97
14		Runtu	504,00	4,68
15		Umpang	609,00	5,66
16		Natai Raya	6,20	0,06
17		Medangsari	9,00	0,08
18		Natai Baru	7,30	0,07
19		Tanjung Terantang	12,25	0,11
20		Sulung	320,00	2,97
<i>Kumai</i>				
1		Sungai Cabang	333,00	3,10
2		Teluk Pulai	478,00	4,44
3		Sungai Sekonyer	791,00	7,35
4		Kubu	122,00	1,13
5		Sungai Bakau	111,00	1,03
6		Teluk Bogam	82,00	0,76
7		Keraya	78,00	0,72
8		Sebuai	62,00	0,58
9		Sungai Kapitan	90,00	0,84
10		Kumai Hilir	64,05	0,60
11		Batu Belaman	73,00	0,68
12		Sungai Tendang	52,00	0,48
13		Candi	67,00	0,62
14		Kumai Hulu	30,00	0,28
15		Sungai Bedaun	403,00	3,75
16		Sebuai Timur	35,00	0,33
17		Bumi Harjo	27,62	0,26
18		Pangkalan Satu	16,38	0,15
<i>Pangkalan Banteng</i>				
1		Pangkalan Banteng	846,00	7,86
2		Mulya Jadi	14,00	0,13
3		Amin Jaya	45,00	0,42
4		Natai Kerbau	65,00	0,60
5		Karangmulya	16,73	0,16
6		Marga Mulya	22,00	0,20
7		Arga Mulya	150,00	1,39
8		Kebun Agung	9,50	0,09



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
9		Sido Mulyo	45,00	0,42
10		Simpang Berambai	7,00	0,07
11		Sungai Hijau	10,00	0,09
12		Sungai Bengkuang	28,00	0,26
13		Sungai Kuning	8,50	0,08
14		Sungai Pakit	14,00	0,13
15		Berambai Makmur	5,00	0,05
16		Karang Sari	14,00	0,13
17		Sungai Pulau	12,00	0,11
<i>Pangkalan Lada</i>				
1		Purbasari	21,00	0,20
2		Sungai Rangit Jaya	31,79	0,30
3		Sumber Agung	32,10	0,30
4		Lada Mandala Jaya	31,73	0,29
5		Makarti Jaya	13,00	0,12
6		Pandu Senjaya	60,75	0,56
7		Pangkalan Tiga	22,50	0,21
8		Kadipi Atas	15,81	0,15
9		Pangkalan Dewa	14,25	0,13
10		Pangkalan Durin	21,00	0,20
11		Sungai Melawen	20,80	0,19
<i>Arut Utara</i>				
1		Nanga Mua	444,00	4,13
2		Pangkut	238,00	2,21
3		Sukarami	186,00	1,73
4		Gandis	289,00	2,69
5		Kerabu	181,00	1,68
6		Sambi	166,00	1,54
7		Penyombaan	258,00	2,40
8		Pandau	330,00	3,07
9		Riam	145,00	1,35
10		Penahan	418,00	3,89
11		Sungai Dau	30,00	0,28
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>			<b>10.759</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel-tabel di atas, kecamatan terluas di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Kumai dengan luas 2.915,1 km<sup>2</sup>, disusul oleh Kecamatan Arut Utara seluas 2.685 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Arut Selatan seluas 2.342,7 km<sup>2</sup>. Selain itu, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Arut Selatan sebanyak 20 (dua puluh) desa.

## 2.2 Aspek Demografi

Gambaran aspek demografi Kabupaten Kotawaringin Barat dijelaskan melalui beberapa penjelasan yaitu Perubahan populasi, komposisi, dan populasi suatu masyarakat secara keseluruhan atau kelompok selama periode waktu tertentu.



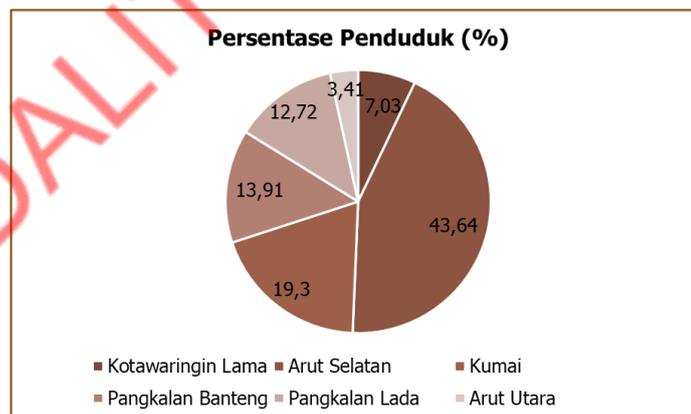
Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 274.935 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 272.531 jiwa. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan sebesar 0,22. Berikut adalah kondisi kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

**Tabel 2. 3 Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Kotawaringin Lama	1.219,83	19.319	7,03	0,54	15,84	112
2	Arut Selatan	2.342,66	119.988	43,64	1,09	51,22	105
3	Kumai	2.915,05	53.054	19,30	0,46	18,20	106
4	Pangkalan Banteng	1.311,73	38.235	13,91	1,32	29,15	113
5	Pangkalan Lada	284,73	34.964	12,72	1,33	122,80	107
6	Arut Utara	2.685	9.375	3,41	0,21	3,49	132
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>10.759</b>	<b>274.935</b>	<b>100</b>	<b>0,96</b>	<b>25,55</b>	<b>108</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 25,55 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 25,33%. Hal itu berarti, setiap km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 25 sampai 26 jiwa. Berikut adalah kependudukan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.



**Gambar 2. 3 Persentase Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 25,55 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 25,33%. Hal itu berarti, setiap km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 25 sampai 26 jiwa. Berikut adalah kependudukan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.



**Tabel 2. 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	312.911	321.751	272.531	274.935
<b>Pertumbuhan (%)</b>	2,90	3,11	0,79	0,96
<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	29,08	29,91	25,33	25,55
<b>Sex Ratio (L/P) (%)</b>	113,00	113,00	108,09	108
<b>% Penduduk Menurut Kelompok Umur</b>				
<b>0-14 Tahun</b>	25,49	25,14	25,73	25,29
<b>15-64 Tahun</b>	71,34	71,58	69,89	70,11
<b>65+ Tahun</b>	3,16	3,29	4,38	4,59

Sumber: Proyeksi Penduduk hasil SP2020  
Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020-2023



**Gambar 2. 4 Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Pertumbuhan penduduk di Kotawaringin Barat mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 0,79% dimana jumlah penduduk pada tahun 2021 mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah penduduk pada tahun 2021 mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta sex ratio.

Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari nilai *Sex Ratio*. Nilai *Sex Ratio* jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 108%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 108 jiwa penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, sebesar 70,11% dari seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu berusia 15-64 tahun. Sedangkan 25,29% merupakan penduduk berusia 0-14 tahun, dan sisanya adalah penduduk berusia lebih dari 65 tahun sebesar 4,59%. Berikut adalah komposisi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2022.



**Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12936	12237	25173
5--9	11600	10785	22385
10--14	11333	10661	21994
15-19	10722	9869	20591
20-24	11675	11194	22869
25-29	11625	11222	22847
30-34	11336	11110	22446
35-39	11692	11558	23250
40-44	11635	10748	22383
45-49	10537	9488	20025
50-54	8828	7524	16352
55-59	6880	6084	12964
60-64	4943	4093	9036
65-69	3310	2677	5987
70-74	2026	1557	3583
75+	1643	1407	3050
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	<b>142721</b>	<b>132214</b>	<b>274935</b>

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 2. 5 Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

## 2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial

### 2.3.1 Aspek Pembangunan Manusia

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Bantuan sosial menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan Sosial adalah prasyarat untuk pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang secara bermartabat, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban sosial mereka. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sosial agar warga masyarakat dapat memenuhinya kebutuhan pokok



## 1. Indeks Pembangunan Manusia

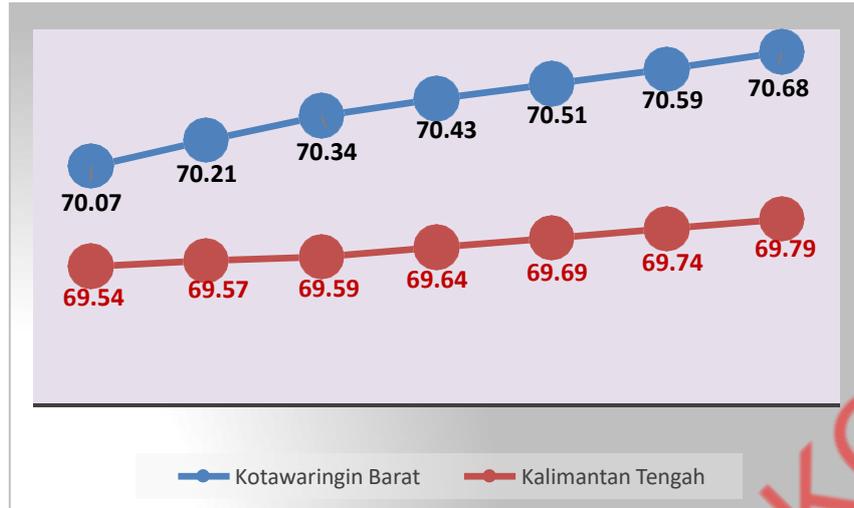
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki IPM sebesar 73,07. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,20 poin atau 0,27 persen dari nilai IPM sebesar 72,87 pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari upaya pembangunan kualitas manusia yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2021**

*Sumber: BPS, 2022, diolah*

Kemajuan pembangunan manusia di Wilayah Administratif Kotawaringin Barat dapat digambarkan dengan peningkatan IPM selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki nilai IPM sebesar 70,60. Tahun ini merupakan tahun pertama Kabupaten Kotawaringin Barat meraih status IPM tinggi. Pada tahun 2021, IPM akan meningkat sebesar 2,47 poin atau 3,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia cukup baik.



**Gambar 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021**

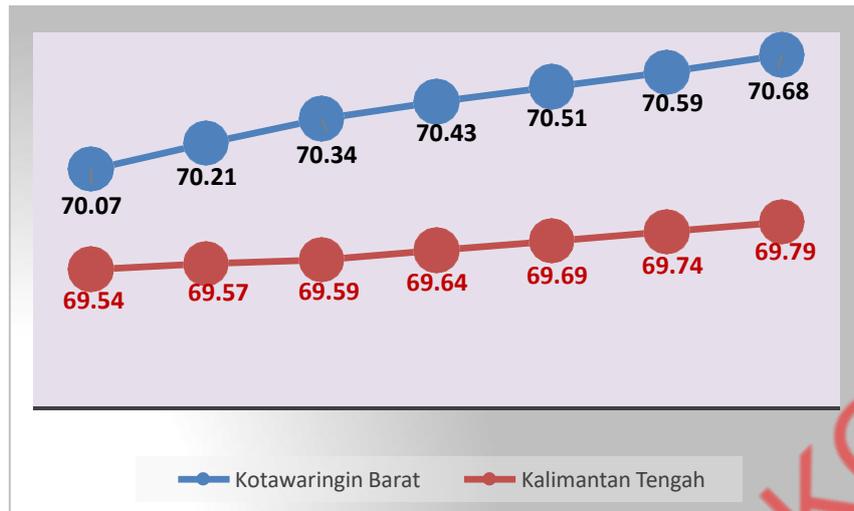
*Sumber: BPS, 2022, diolah*

IPM wilayah Kotawaringin Barat secara umum masih lebih tinggi dibandingkan IPM provinsi Kalimantan Tengah. Angka IPM provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 71,25. Baik Wilayah Administratif Kotawaringin Barat maupun Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki status pembangunan manusia pada kelompok atas, namun pembangunan manusia di Wilayah Administratif Kotawaringin Barat sendiri masih lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Pada tahun 2021, lebih dari separuh kota/kabupaten administratif di Provinsi Kalimantan Tengah akan memiliki pembangunan manusia yang tinggi atau sangat tinggi. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki IPM tertinggi kedua, dimana hanya terparah dibandingkan Kota Palangka Raya yang memiliki skor IPM sebesar 80,82 pada tahun 2021. Angka tersebut menjadikan Kota Palangka Raya satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat manusia yang sangat tinggi.

## 2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, peran negara dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan dengan menyediakan pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Data harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan dalam umur panjang dan hidup sehat yang berkisar pada rata-rata 70 tahun. Hingga tahun 2020 umur harapan hidup terus meningkat.



**Gambar 2. 8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun)**

*Sumber: BPS, 2022, diolah*

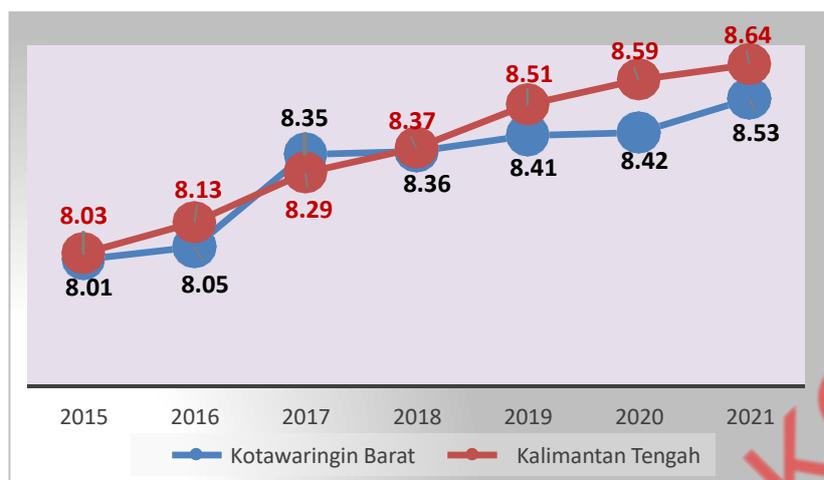
Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan angka harapan hidup (UHH). Tahun 2021 Angka UHH Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 70,68 tahun, artinya rata-rata bayi baru lahir tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat berpeluang hidup sampai dengan 70,68 tahun, jadi sekitar 70 tahun 8 Bulan. Angka tersebut meningkat 0,09 poin dibandingkan UHH tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan di Wilayah Administrasi Kotawaringin Barat secara umum membaik, sehingga usia harapan hidup penduduknya lebih panjang.

UHH wilayah Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2021. Pada tahun 2021, UHH Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 69,79. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat masih sedikit di atas rata-rata provinsi Kalimantan Tengah.

### 3. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan bagian penting dari perkembangan manusia. Pendidikan merupakan dasar jaminan kualitas hidup bagi masyarakat. Pendidikan adalah cara untuk mengembangkan keterampilan manusia. Pengembangan keterampilan masyarakat melalui pendidikan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan menjadi milik semua orang.

Dimensi data yang mendukung pengukuran perkembangan manusia menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan tahun sekolah yang diharapkan (HLS). RLS adalah indikator penduduk dewasa sedangkan HLS adalah indikator pendidikan penduduk muda.

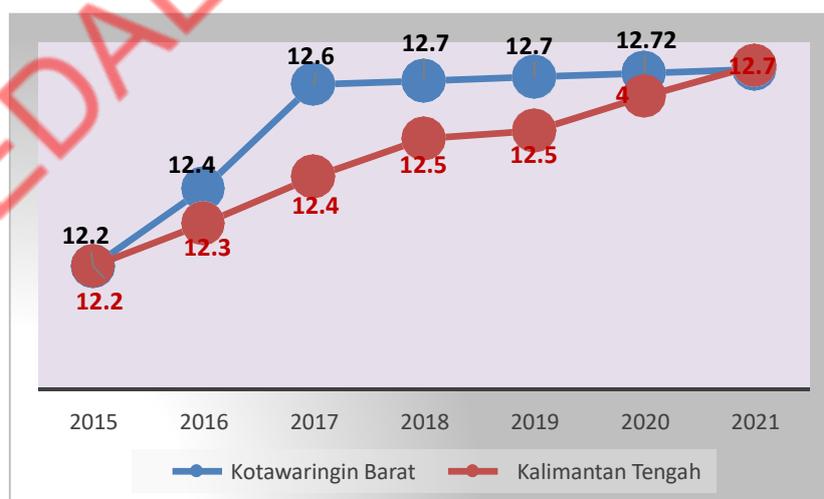


**Gambar 2. 9 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun)**

Sumber: BPS, 2022, diolah

Nilai RLS Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 sebesar 8,53 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata menyelesaikan sekolah 8,53 tahun atau setara dengan kelas 9 SMA, tetapi tidak tamat.

Sementara itu, angka HLS Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 adalah 12,73 tahun, yang berarti anak usia 7 tahun yang bersekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 memiliki harapan sampai usia 12,73 tahun atau bersekolah ke jenjang pendidikan yang setara dengan perguruan tinggi di tahun pertama, tetapi tidak sebelum lulus.



**Gambar 2. 10 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Tahun)**

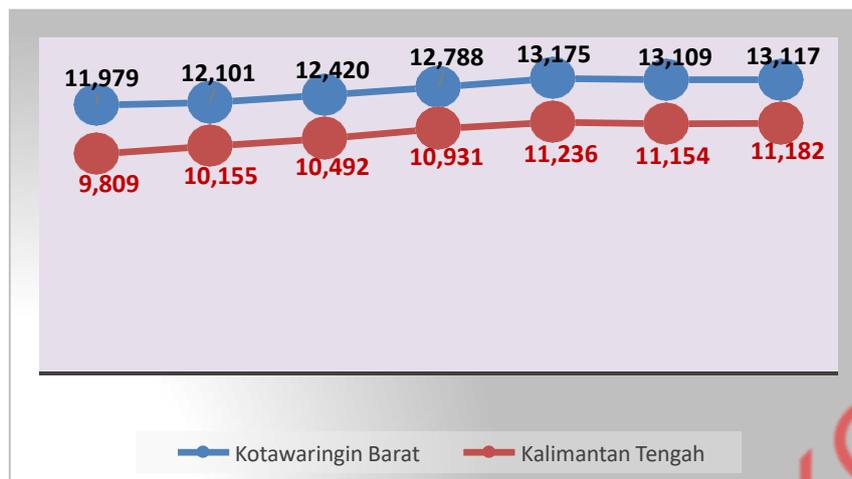
Sumber: BPS, 2022, diolah



Pada tahun 2021, angka RLS Kabupaten Kotawaringin Barat masih sedikit lebih rendah dari angka RLS Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai angka 8,64 tahun. Selama 7 tahun terakhir, tingkat RLS di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Namun pada tahun 2017, RLS Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi dari rata-rata provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada dalam kisaran rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal rata-rata lama sekolah penduduk berusia di atas 25 tahun. Sedangkan jika melihat angka HLS Kabupaten Administratif Kotawaringin Barat tahun 2021 berada di bawah angka HLS Provinsi Kalimantan Tengah yang angkanya 12,74 tahun, selisih 0,01 poin. Selama 4 tahun terakhir, pembangunan HLS umumnya terhenti di Kotawaringin Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian untuk meningkatkan kesempatan sekolah bagi anak-anak Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **4. Pengeluaran Per Kapita**

Melihat kemajuan pembangunan manusia sama dengan melihat tingkat kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Peningkatan derajat kesejahteraan manusia mendukung tercapainya kualitas hidup yang layak. Kualitas atau standar hidup yang layak berarti bahwa rumah tangga dapat membiayai kebutuhan dasar. Tingginya daya beli masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat secara finansial mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam dimensi standar hidup, indikator pengeluaran yang disesuaikan dengan paritas daya beli per penduduk digunakan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di wilayah Kotawaringin Barat sebesar Rp13.117.000 pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp8.000,00 dari tahun 2020.



**Gambar 2. 11 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 (Ribuan Rupiah)**

Sumber: BPS, 2022, diolah

Pengeluaran per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 masih lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rp 11.182.000. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di wilayah Kotawaringin Barat lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Tengah pada umumnya.

### 2.3.2 Aspek Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berikut adalah Statistik aspek ketenagakerjaan.

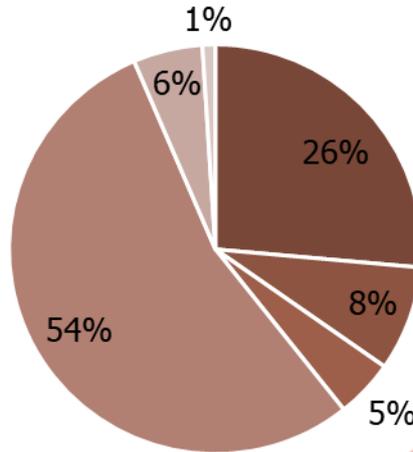
**Tabel 2. 6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	23192	15549	38741
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	9366	2789	12155
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6250	486	6736
Buruh/Karyawan/Pegawai	58908	10634	79542
Pekerja bebas	6832	1139	7971
Pekerja keluarga/tak dibayar	3350	1132	1482
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>107898</b>	<b>51729</b>	<b>159627</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**



- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- Buruh/Karyawan/Pegawai
- Pekerja bebas
- Pekerja keluarga/tak dibayar

**Gambar 2. 12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023*

Berdasarkan data tersebut diketahui penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh lapangan pekerjaan terbanyak yaitu pada buruh/ karyawan/ pegawai yaitu 58.908 jiwa laki-laki dan berusaha sendiri sebesar 10.634 jiwa perempuan. Pekerjaan utama dengan jumlah paling sedikit ada pada pekerjaan pekerja keluarga/ tak dibayar yaitu 1.482 jiwa. Mayoritas penduduk di Kotawaringin Barat merupakan buruh/ karyawan/ pegawai sebesar 54% dan berusaha sendiri sebesar 26%.

## **2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.4.1 Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2022, jumlah realisasi pendapatan sebesar 1,412 triliun yang bersumber dari PAD sebesar 233,165 milyar rupiah, dana perimbangan 1,024 triliun rupiah dan pendapatan lain lain sebesar 155,233 milyar rupiah. Jumlah



realisasi PAD pada tahun 2022 sedikit menurun dari tahun 2021 yang berjumlah sekitar 1,420 triliun rupiah dan dari tahun 2020 yang berjumlah 1,442 triliun rupiah.

Sedangkan realisasi belanja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 menurun dibandingkan realisasi belanja tahun 2021. Realisasi belanja tahun 2022 mencapai 1,249 triliun rupiah dan tahun 2021 mencapai 1,46 triliun, jumlah tersebut menurun sebesar 203,96 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021. Selisih realisasi belanja dan realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami peningkatan drastis yaitu sebesar 163,24 milyar rupiah. Berikut adalah Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022.

**Tabel 2. 7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Jenis Pendapatan (rupiah) Tahun 2020-2022**

No	Jenis Pendapatan	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>			
<b>1.1</b>	Pajak Daerah	64.838.822,750	70.389.757,710	81.575.790,32
<b>1.2</b>	Retribusi Daerah	13.208.556,930	12.611.482,520	15.782.458,94
<b>1.3</b>	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.804.364,850	12.470.117,810	12.940.075,58
<b>1.4</b>	Lain-lain PAD yang Sah	136.800.185,311	296.693.020,970	122.866.939,70
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
<b>2.1</b>	Bagi Hasil Pajak	29.764.009,460	80.093.900,010	111.987.285,19
<b>2.2</b>	Bagi Hasil Bukan Pajak	34.619.424,860	-	-
<b>2.3</b>	Dana Alokasi Umum	602.446.484,000	593.260.006,000	730.320.578,31
<b>2.4</b>	Dana Alokasi Khusus	292.094.344,720	317.245.358,100	182.097.389,79
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>			
<b>3.1</b>	Pendapatan Hibah	37.161.976,180	38.099.339,400	25.124.419,00
<b>3.2</b>	Dana Darurat	-	-	-
<b>3.3</b>	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	64.243.460,230	-	-
<b>3.4</b>	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	163.174.967,600	-	-
<b>3.5</b>	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	400.000,000	-	-
<b>3.6</b>	Lainnya	455.000,000	-	130.109.231,76
	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>1.449.011.596,89</b>	<b>1.420.862.982,52</b>	<b>1.412.804.168,59</b>
	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>1.442.474.018,08</b>	<b>1.461.583.803,89</b>	<b>1.249.563.567,78</b>
	<b>Selisih</b>	<b>6.537.578,81</b>	<b>40.720.821,37</b>	<b>163.240.600,81</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2021-2023



## 2.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.433,64	4.617,06	5.197,45	6.233,23	6.969,13
B	Pertambangan dan Penggalian	225,81	256,31	257,57	265,24	280,77
C	Industri pengolahan	4.554,00	4.754,48	5.211,62	6.411,98	7.094,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,16	10,27	11,48	12,17	13,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,74	18,11	17,83	20,08	21,34
F	Konstruksi	1.623,68	1.851,61	1.651,56	1.947,84	2.192,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.363,73	2.664,28	2.881,23	3.110,38	3.459,03
H	Transportasi dan Pergudangan	1.531,27	1.734,40	1.601,27	1.721,43	1.915,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242,90	267,31	259,87	270,27	291,70
J	Informasi dan Komunikasi	161,13	179,00	189,25	209,91	227,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	877,58	966,21	1.062,28	1.189,14	1.277,55
L	Real Estat	344,15	386,13	405,91	417,02	459,16
M, N	Jasa Perusahaan	8,45	9,48	8,40	8,76	9,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	578,10	653,41	743,35	780,84	855,57
P	Jasa Pendidikan	472,20	533,64	583,25	613,22	634,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,21	231,51	301,93	357,67	397,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	177,68	198,89	137,63	139,56	166,86
	<b>PDRB</b>	<b>17.827,43</b>	<b>19.332,10</b>	<b>20.521,88</b>	<b>23.708,74</b>	<b>26.265,08</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



Berdasarkan tabel di atas, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada saat terjadinya Pandemi COVID-19, nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat masih meningkat. Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berikut adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.326,47	3.449,78	3.530,54	3.609,48	3.803,63
B	Pertambangan dan Penggalian	146,52	158,06	157,77	149,74	153,87
C	Industri pengolahan	3.162,38	3.331,08	3.427,12	3.657,49	3.874,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,55	7,16	7,99	8,28	8,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,33	11,30	10,92	12,01	12,22
F	Konstruksi	1.047,40	1.122,53	987,37	1.116,83	1.200,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.500,56	1.596,61	1.644,35	1.743,21	1.866,47
H	Transportasi dan Pergudangan	1.007,39	1.088,91	998,26	1.071,76	1.146,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	156,03	165,93	156,55	160,49	167,40
J	Informasi dan Komunikasi	127,04	137,36	147,77	160,98	171,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	573,31	611,61	672,70	723,53	749,75
L	Real Estat	215,24	229,44	236,93	242,26	256,68
M, N	Jasa Perusahaan	5,26	5,61	4,91	5,06	5,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	353,95	385,12	419,32	436,02	469,44
P	Jasa Pendidikan	296,12	320,45	346,27	357,82	366,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127,78	137,60	174,30	199,39	213,80
R, S, T, U	Jasa Lainnya	110,95	119,09	81,20	78,85	91,42
	<b>PDRB</b>	<b>12.173,28</b>	<b>12.877,64</b>	<b>13.004,27</b>	<b>13.733,20</b>	<b>14.558,35</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021, terdapat beberapa lapangan usaha yang sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu seperti Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; dan Jasa



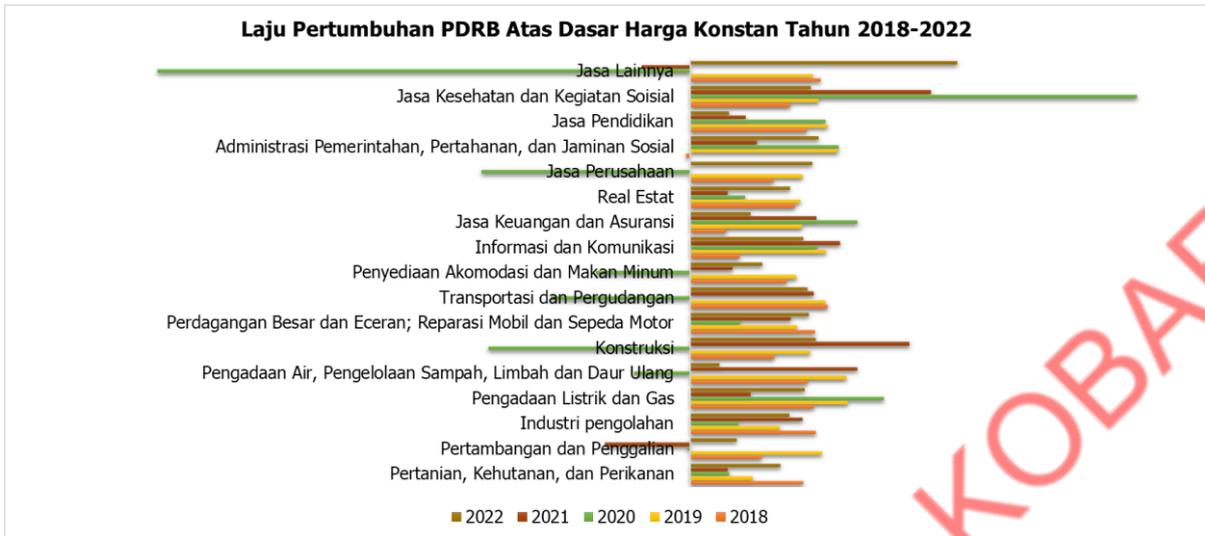
Lainnya. Namun, penurunan laju pertumbuhan tersebut tidak terjadi setiap tahunnya dan semua lapangan usaha mengalami kenaikan pada tahun 2022.

Laju pertumbuhan PDRB Kotawaringin Barat sempat mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19. Akan tetapi, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 walaupun masih terdapat beberapa jenis lapangan usaha yang masih mengalami penurunan. Laju pertumbuhan mengalami kenaikan pada semua jenis lapangan usaha pada tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	3,71	2,34	2,24	5,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,25	7,87	-0,18	-5,09	2,76
C	Industri pengolahan	7,52	5,33	2,88	6,72	5,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	9,39	11,56	3,59	6,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,00	9,34	-3,35	9,97	1,73
F	Konstruksi	5,00	7,17	-12,04	13,11	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	6,40	2,99	6,01	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	8,22	8,09	-8,32	7,36	6,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	6,34	-5,65	2,52	4,31
J	Informasi dan Komunikasi	2,96	8,12	7,58	8,94	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	6,68	9,99	7,56	3,62
L	Real Estat	6,25	6,60	3,26	2,25	5,95
M, N	Jasa Perusahaan	4,98	6,73	-12,46	2,99	7,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	-0,26	8,81	8,88	3,98	7,66
P	Jasa Pendidikan	6,97	8,22	8,06	3,33	2,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Soisial	5,98	7,68	26,67	14,39	7,23
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,80	7,34	-31,82	-2,90	15,94
	<b>PDRB</b>	<b>6,48</b>	<b>5,79</b>	<b>0,98</b>	<b>5,61</b>	<b>6,01</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023*

### 2.4.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan bagian dari tujuan mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan peluang, keunikan dan keunggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang tercermin dari capaian penyelenggaraan pemerintahan negara, misalnya. Kapasitas Ekonomi Daerah, Sarana/ Infrastruktur Daerah, Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia.

#### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi nasional dan pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor padat karya dan berorientasi ekspor yang didukung oleh pertumbuhan sumber daya manusia dan teknologi memperkuat dasar pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing dan berorientasi pada globalisasi ekonomi (Mulyana, 2005: 2).

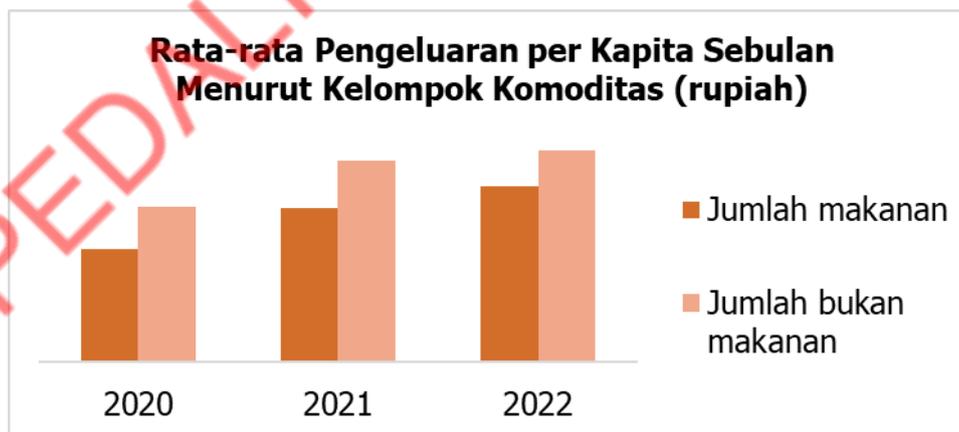
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/ Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.



**Tabel 2. 11 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022**

Kelompok Komoditas	2020	2021	2022
<b>Makanan/Food</b>			
Padi-padian	79 042	83 925	96 712
Umbi-umbian	5 913	9 752	9 189
Ikan/udang/cumi/kerang	72 427	79 313	95 727
Daging	44 717	47 388	58 088
Telur dan susu	49 067	51 608	47 712
Sayur-sayuran	66 540	85 401	80 806
Kacang-kacangan	18 119	18 221	20 808
Buah-buahan	29 869	29 332	42 270
Minyak dan kelapa	17 890	20 570	26 099
Bahan minuman	23 731	31 424	24 110
Bumbu-bumbuan	16 768	23 639	23 559
Konsumsi lainnya	16 555	18 758	17 669
Makanan dan minuman jadi	205 857	203 731	200 338
Rokok	106 637	105 573	94 755
<b>Jumlah makanan</b>	<b>753 132</b>	<b>808 636</b>	<b>837 842</b>
<b>Bukan makanan</b>			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	436 644	448 412	506 712
Aneka barang dan jasa	159 889	193 353	187 246
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	37 066	39 060	42 437
Barang tahan lama	96 868	120 853	80 178
Pajak, pungutan, dan asuransi	52 353	61 102	58 017
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	27 746	10 983	11 993
<b>Jumlah bukan makanan</b>	<b>810 566</b>	<b>873 763</b>	<b>886 583</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 563 698</b>	<b>1 682 399</b>	<b>1 724 425</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023

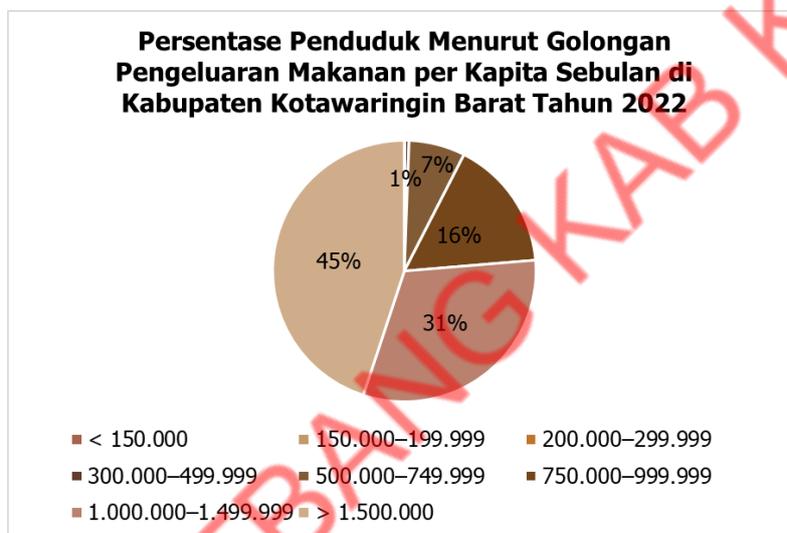


**Gambar 2. 14 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022**

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023



Menurut tabel di atas rata-rata pengeluaran perkapita di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita tertinggi berada pada kelompok komoditas bukan makanan, terbesar barang tahan lama yang meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022, untuk komoditas makanan tertinggi yaitu makanan minuman jadi yang mengalami penurunan dari Rp 205.857 di tahun 2020 menjadi Rp 200.338 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2020-2022. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2022**

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

**Tabel 2. 12 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2022**

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah)	Persentase Penduduk
< 150.000	0,00
150.000-199.999	0,00
200.000-299.999	0,08
300.000-499.999	0,50
500.000-749.999	6,92
750.000-999.999	16,19
1.000.000-1.499.999	31,41
> 1.500.000	44,98
<b>Jumlah/Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023



Menurut tabel 2.12 persentase penduduk golongan pengeluaran makanan perkapita/per bulan didominasi oleh 5 (lima) golongan pengeluaran Rp.1.500.000 ke atas (44,98%), Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (31,41%), Rp.750.000-Rp.999.999 (16,19%), Rp.500.000-Rp.749.999 (6,92%) dan Rp.300.000-Rp.499.999 (0,50%). Kurang dari Rp.299.999 mempunyai persentase 0%.

## 2. Iklim Investasi

Berdasarkan data, nilai investasi Kotawaringin Barat mencapai Rp. 56.240.424.000 dengan nilai produksi mencapai Rp. 152.672.831.000 dan nilai bahan baku mencapai Rp. 98.706.624.000 serta dengan nilai tambah sebesar Rp. 53.966.207.00.

**Tabel 2. 13 Nilai Investasi, Produksi, Bahan Baku, dan Nilai Tambah (Rupiah) Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kelompok Industri	Investasi	Nilai Produksi	Nilai Bahan Baku	Nilai Tambah
1	Pangan	15.568.474.000	79.421.126.000	56.349.913.000	23.071.213.000
2	Sandang	2.284.000.000	3.886.900.000	1.965.120.000	1.921.780.000
3	Kimia dan Bahan Bangunan	35.967.500.000	64.755.655.000	37.943.531.000	26.812.124.000
4	Logam dan Elektronika	1.940.000.000	3.872.000.000	2.085.960.000	1.786.040.000
5	Kerajinan	480.450.000	737.150.000	362.100.000	375.050.000
	<b>Jumlah</b>	<b>56.240.424.000</b>	<b>152.672.831.000</b>	<b>98.706.624.000</b>	<b>53.966.207.000</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Selain itu, diketahui juga adanya jumlah nilai investasi nasional dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang meningkat pada tahun 2022. Namun, penanaman modal asing mengalami penurunan pada tahun 2022. Berikut adalah iklim investasi Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022.

**Tabel 2. 14 Iklim Investasi Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022**

Aspek	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<b>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)</b>	60	57	60		
<b>Jumlah nilai</b>	6.911.044.174.637,00	3.702.945.653.210,00	12.617.305.437.689,00	1. Terdapat beberapa pelaku	Terdapat perusahaan yang



Aspek	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<b>investasi berskala nasional (juta Rupiah) (Setiap Tahun)</b>				usaha/ perusahaan yang mewajibkan pelaporan LKPM sebagai salah satu bukti untuk audit perusahaan	mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan dikarenakan ada aturan terbaru terkait kewenangan perizinan
<b>PMDN dalam Milyar Rupiah (Setiap Tahun)</b>	4.741. 546.466.007,00	1.731. 922.379.802,00	11.281. 482.157.792,00	2. Terdapat sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha/ perusahaan yang belum merealisasikan investasinya	
<b>PMA dalam US \$ Ribu (Setiap Tahun)</b>	2.169. 497.708.630,00	1.971. 023.273.408,00	1.335. 823.279.897,00	3. Adanya kemudahan dan kecepatan yang diberikan kepada perusahaan untuk proses izin di sistem OSS-RBA	

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui faktor-faktor pendorong iklim investasi Kotawaringin Barat yang meliputi:

1. Adanya beberapa pelaku usaha/ perusahaan yang mewajibkan pelaporan LKPM sebagai salah satu bukti untuk audit perusahaan.
2. Adanya sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha/ perusahaan yang belum merealisasikan investasinya.
3. Adanya kemudahan dan kecepatan yang diberikan kepada perusahaan untuk proses izin di sistem OSS-RBA.

Sedangkan faktor penghambat dalam investasi daerah Kotawaringin Barat adalah adanya perusahaan yang mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan dikarenakan ada aturan terbaru terkait kewenangan perizinan.

#### 2.4.4 Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Pendidikan

###### A. Jumlah Sekolah

Sekolah terdiri atas jenjang sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), sekolah terbagi menjadi negeri dan swasta. Data satuan jumlah sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat per kecamatan dapat dilihat di tabel berikut.



**Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	TK				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021		
1	Kotawaringin Lama	1	1	8	9	9	10
2	Arut Selatan	1	1	50	54	50	55
3	Kumai	1	1	23	24	24	25
4	Pangkalan Banteng	1	1	22	22	23	23
5	Pangkalan Lada	1	1	14	14	15	15
6	Arut Utara	0	0	7	9	7	9
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>124</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>137</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 16 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	SD				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021		
1	Kotawaringin Lama	23	23	1	1	24	24
2	Arut Selatan	60	60	9	12	69	72
3	Kumai	31	31	2	5	33	36
4	Pangkalan Banteng	20	20	6	6	26	26
5	Pangkalan Lada	20	20	1	1	21	21
6	Arut Utara	12	12	5	5	17	17
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>166</b>	<b>166</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>190</b>	<b>196</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 17 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Pertama**

No	Kecamatan	SLTP Sederajat				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021		
1	Kotawaringin Lama	6	6	2	2	8	8
2	Arut Selatan	13	13	7	9	20	22
3	Kumai	11	11	1	1	12	12
4	Pangkalan Banteng	6	6	4	4	10	10
5	Pangkalan Lada	5	5	1	1	6	6
6	Arut Utara	4	4	1	1	5	5
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>63</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 18 Jumlah Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Akhir**

No	Kecamatan	SLTA Sederajat				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021		
1	Kotawaringin Lama	2	2	-	-	1	1
2	Arut Selatan	7	7	9	9	16	16
3	Kumai	5	5	-	-	5	5
4	Pangkalan Banteng	2	2	-	-	2	2
5	Pangkalan Lada	2	2	-	-	2	2
6	Arut Utara	1	1	-	-	1	1



No	Kecamatan	SLTA Sederajat				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

## B. Jumlah Guru

Sekolah terdiri atas jenjang sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), sekolah terbagi menjadi negeri dan swasta. Data satuan jumlah sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat per kecamatan dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 2. 19 Jumlah Guru Jenjang Taman Kanak-Kanak**

No	Kecamatan	Guru TK				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Kotawaringin Lama	3	4	33	33	36	37
2	Arut Selatan	11	10	226	258	237	268
3	Kumai	6	6	93	96	99	102
4	Pangkalan Banteng	3	3	90	95	93	98
5	Pangkalan Lada	4	4	71	67	75	71
6	Arut Utara	-	-	22	31	22	31
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>535</b>	<b>580</b>	<b>562</b>	<b>602</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 20 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Dasar**

No	Kecamatan	Guru SD				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Kotawaringin Lama	163	166	23	20	186	186
2	Arut Selatan	585	576	132	139	717	715
3	Kumai	297	292	17	35	314	327
4	Pangkalan Banteng	197	188	83	72	280	260
5	Pangkalan Lada	190	190	18	15	208	205
6	Arut Utara	75	79	50	49	125	128
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>1.507</b>	<b>1.491</b>	<b>323</b>	<b>330</b>	<b>1.830</b>	<b>1.821</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 21 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Pertama**

No	Kecamatan	Guru SLTP Sederajat				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2020	2021
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Kotawaringin Lama	58	53	19	21	77	74
2	Arut Selatan	251	252	95	120	346	372
3	Kumai	132	128	6	6	138	134
4	Pangkalan Banteng	77	75	40	33	117	108
5	Pangkalan Lada	67	66	13	12	80	78
6	Arut Utara	31	24	7	9	38	33



No	Kecamatan	Guru SLTP Sederajat					
		Negeri		Swasta		Jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>616</b>	<b>598</b>	<b>180</b>	<b>201</b>	<b>796</b>	<b>799</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 22 Jumlah Guru Jenjang Sekolah Lanjutan Jenjang Akhir**

No	Kecamatan	Guru SLTA Sederajat					
		Negeri		Swasta		Jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Kotawaringin Lama	45	44	0	0	45	44
2	Arut Selatan	268	270	143	124	411	394
3	Kumai	130	130	0	0	130	130
4	Pangkalan Banteng	56	59	8	6	64	65
5	Pangkalan Lada	52	55	0	0	52	55
6	Arut Utara	18	15	0	0	18	15
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>616</b>	<b>569</b>	<b>573</b>	<b>151</b>	<b>130</b>	<b>720</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

## 2. Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, tercatat pada tahun 2022 jumlah fasilitas kesehatan cenderung meningkat. Jumlah rumah sakit sebanyak 4 unit, puskesmas 18 unit, posyandu 209 unit, dan klinik 25 unit. Sedangkan untuk tenaga kesehatan. Pada tahun 2022 tercatat 87 dokter, perawat 446, tenaga farmasi 5, tenaga kebidanan 297, dan tenaga ahli gizi sebanyak 43 personel.

**Tabel 2. 23 Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Desa	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (unit)	Posyandu (Unit)	Klinik (Unit)
1	Kotawaringin Lama	1	3	26	1
2	Arut Selatan	3	6	77	12
3	Kumai	0	3	37	3
4	Pangkalan Banteng	0	2	18	5
5	Pangkalan Lada	0	2	37	2
6	Arut Utara	0	2	14	2
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>4</b>	<b>18</b>	<b>209</b>	<b>25</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Tabel 2. 24 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Desa	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Gizi
1	Kotawaringin Lama	12	3	24	35	0	5
2	Arut Selatan	49	13	275	120	5	23
3	Kumai	9	3	50	53	0	4
4	Pangkalan Banteng	8	3	50	46	0	4



No	Desa	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Gizi
5	Pangkalan Lada	5	2	24	24	0	4
6	Arut Utara	4	0	23	19	0	3
<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>		<b>87</b>	<b>74</b>	<b>446</b>	<b>297</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



## **BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

### **3.1 Kajian Kemiskinan**

Saat ini kemiskinan masih menjadi isu global. Kemiskinan menjadi salah satu tujuan yang harus tercapai dalam Rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, isu-isu pembangunan di Indonesia menempatkan kemiskinan, ketidakmerataan antar golongan, disparitas regional, dan kekerasan sosial sebagai isu-isu yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang di tahun 2030. Tidak terkecuali pada Kabupaten Kotawaringin Barat, pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas penting bagi pemangku kebijakan Kotawaringin Barat.

Ritonga (dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh individu atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi hidupnya. Ketidakmampuan tersebut dapat dikarenakan karena ketidakmampuan secara fisiknya maupun karena kebijakan pemerintah.

Fakta yang terjadi adalah pemerintah maupun masyarakat belum secara bersama dan terkoordinasi dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan terdiri dari beberapa jenis, yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan lainnya. Kemiskinan-kemiskinan tersebut dapat menimbulkan masalah sosial seperti perampokan dan tindakan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh daerah untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif (Panduan Penanggulangan Kemiskinan Daerah oleh TNP2K, 2011).



Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Panduan Penanggulangan Kemiskinan Daerah oleh TNP2K, 2011).

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi (Permendagri RI No. 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kab/ Kota).

Tahapan pertama dalam menanggulangi kemiskinan adalah mengukur kemiskinan itu sendiri. Untuk mengukur kemiskinan tersebut, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

### **3.2 Profil Kemiskinan Konsumsi**

#### **3.2.1 Persentase penduduk miskin (P0)**

Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp. 476.297,00. Nilai tersebut berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

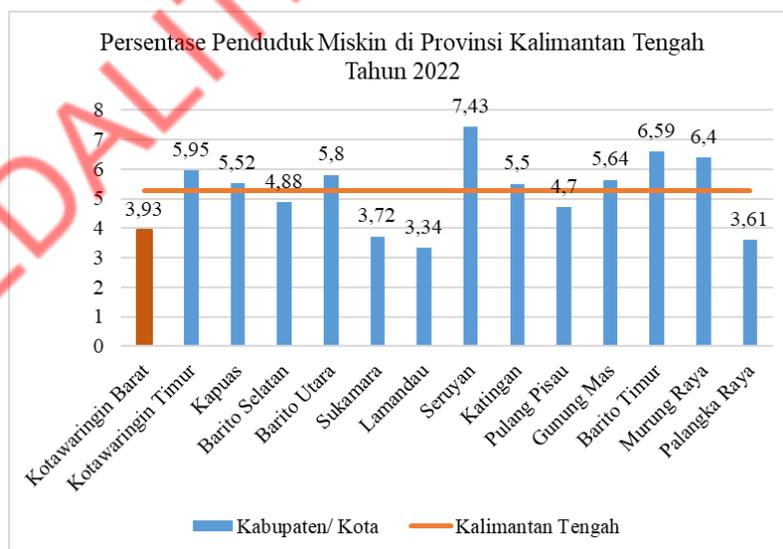
Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 cukup fluktuatif. Penduduk miskin di Kotawaringin Barat mengalami penurunan pada tahun 2015-2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021. Namun, persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan kembali pada tahun 2022. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 3. 1 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah*

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 mencapai 3,95% dan pada tahun 2022 sebesar 3,93%. Jika dilihat dari data BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin provinsi atau berada di posisi 11 dari 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.



**Gambar 3. 2 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah*



### 3.2.2 Jumlah penduduk miskin

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat hingga 12,29 ribu jiwa dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 12,44 ribu jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.



**Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

**Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		
		2021	2022	D (selisih)
1	<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>0,1</b>
2	Kotawaringin Timur	27,1	27,6	0,5
3	Kapuas	19,4	20,2	0,8
4	Barito Selatan	6,4	6,8	0,4
5	Barito Utara	7,4	7,7	0,3
6	Sukamara	2,4	2,5	0,1
7	Lamandau	2,9	2,8	-0,1
8	Seruyan	15,1	16,0	0,9
9	Katingan	9,2	9,7	0,5
10	Pulang Pisau	5,4	6,0	0,6
11	Gunung Mas	6,3	6,7	0,4
12	Barito Timur	8,0	8,4	0,4
13	Murung Raya	7,3	7,7	0,4
14	Palangka Raya	10,9	10,6	- 0,3
	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>140,1</b>	<b>145,1</b>	<b>5,0</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah



Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun 2021-2022. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri berada di posisi keempat dengan jumlah penduduk miskin mencapai 12,4 ribu jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 12,3 ribu jiwa penduduk miskin.

**Tabel 3. 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		
			JIWA	KK	
<b>1</b>	ARUT SELATAN	1	Tanjung Putri	486	160
		2	Kumpai Batu Bawah	605	278
		3	Kumpai Batu Atas	1,061	442
		4	Pasir Panjang	1,982	762
		5	Mendawai	4,281	1,628
		6	Mendawai Seberang	1,022	356
		7	Raja	1,271	509
		8	Sidorejo	2,297	953
		9	Madurejo	2,837	1,106
		10	Baru	4,963	1,939
		11	Raja Seberang	702	247
		12	Rangda	110	58
		13	Kenambui	173	78
		14	Runtu	333	141
		15	Umpang	377	135
		16	Natai Raya	370	160
		17	Medang Sari	573	213
		18	Natai Baru	369	153
		19	Tanjung Terantang	638	230
		20	Sulung	88	49
		21	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	97	50
<b>TOTAL ARUT SELATAN</b>			<b>24,635</b>	<b>9,647</b>	
<b>2</b>	ARUT UTARA	1	Nanga Mua	72	38
		2	Pangkut	425	207
		3	Sukarami	76	31
		4	Gandis	220	81
		5	Kerabu	123	46
		6	Sambi	213	77
		7	Penyombaan	140	53
		8	Pandau	67	26
		9	Riam	88	38
		10	Panahan	162	73
		11	Sungai Dau	49	19
		12	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	25	10
<b>TOTAL ARUT UTARA</b>			<b>1,660</b>	<b>699</b>	
<b>3</b>	KOTAWARINGIN LAMA	1	Babual Baboti	130	59
		2	Tempayung	92	55
		3	Sakabulin	53	27
		4	Kinjil	107	61
		5	Kotawaringin Hilir	409	175
		6	Riam Durian	283	134
		7	Dawak	65	32
		8	Kotawaringin Hulu	305	124
		9	Lalang	65	27



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		
			JIWA	KK	
		10	Rungun	294	142
		11	Kondang	108	42
		12	Sagu Suka Mulya	87	48
		13	Suka Jaya	179	115
		14	Suka Makmur	161	78
		15	Ipuh Bangun Jaya	268	93
		16	Sumber Mukti	95	54
		17	Palih Baru	224	102
		18	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	26	11
		<b>TOTAL KOTAWARINGIN LAMA</b>		<b>2,951</b>	<b>1,379</b>
4	KUMAI	1	Sungai Cabang	631	188
		2	Teluk Pulai	141	53
		3	Sungai Sekonyer	151	53
		4	Kubu	1,626	622
		5	Sungai Bakau	481	168
		6	Teluk Bogam	728	258
		7	Keraya	235	93
		8	Sabuai	362	137
		9	Sungai Kapitan	1,616	597
		10	Kumai Hilir	3,077	1,201
		11	Batu Belaman	1,010	372
		12	Sungai Tendang	921	374
		13	Candi	1,181	458
		14	Kumai Hulu	3,787	1,370
		15	Sungai Bedaun	277	124
		16	Sebuai Timur	96	35
		17	Bumi Harjo	1,599	597
		18	Pangkalan Satu	736	286
				19	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>
		<b>TOTAL KUMAI</b>		<b>18,701</b>	<b>7,011</b>
5	PANGKALAN BANTENG	1	Pangkalan Banteng	253	112
		2	Mulya Jadi	276	124
		3	Amin Jaya	718	309
		4	Natai Kerbau	296	136
		5	Karang Mulya	591	244
		6	Marga Mulya	304	108
		7	Arga Mulya	426	171
		8	Kebun Agung	340	134
		9	Sido Mulyo	458	183
		10	Simpang Berambai	234	105
		11	Sungai Hijau	756	231
		12	Sungai Bengkuang	424	179
		13	Sungai Kuning	300	126
		14	Sungai Pakit	369	156
		15	Berambai Makmur	122	55
		16	Karang Sari	231	85
		17	Sungai Pulau	299	114
				18	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>
		<b>TOTAL PANGKALAN BANTENG</b>		<b>6,414</b>	<b>2,582</b>
6	PANGKALAN LADA	1	Purbasari	1,061	427
		2	Sungai Rangit Jaya	927	371
		3	Sumber Agung	1,023	433
		4	Lada Mandala Jaya	942	396
		5	Makarti Jaya	298	149
		6	Pandu Sanjaya	1,150	489



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		
			JIWA	KK	
		7	Pangkalan Tiga	656	298
		8	Kadipi Atas	381	151
		9	Pangkalan Dewa	637	269
		10	Pangkalan Durin	564	274
		11	Sungai Melawen	620	305
		12	Wilayah Kosong (Null)	42	17
<b>TOTAL PANGKALAN LADA</b>				<b>8,301</b>	<b>3,579</b>
<b>7</b>	Wilayah Kosong (Null)	1	Wilayah Kosong (Null)	17	11
<b>TOTAL NULL</b>				<b>17</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL KOTAWARINGIN BARAT</b>				<b>62,679</b>	<b>24,908</b>

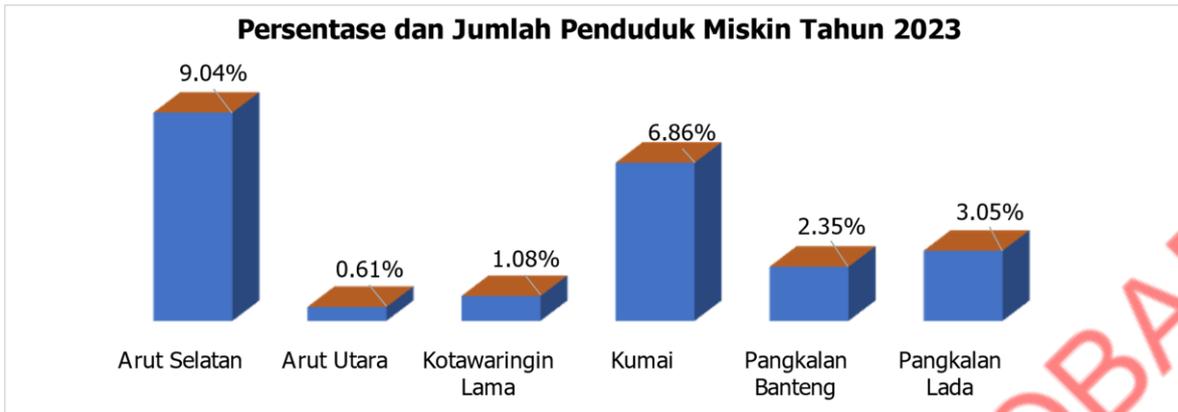
Sumber: DTKS, Kabupaten Kotawaringin 2023

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 62.679 jiwa dan 24.908 kk yang masih dikategorikan warga yang membutuhkan bantuan dan pemberdayaan sosial, Kecamatan Arut Selatan dengan jumlah warga terbanyak yaitu 24.635 Jiwa dan 9.647, dan masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar DTKS.

**Tabel 3. 3 Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023**

No	Kecamatan	Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		Jumlah Penduduk Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin	
		Jiwa	KK		% thdp Kecamatan	% thdp Kabupaten
1	Arut Selatan	24.635	9647	118809	20.73%	9.04%
2	Arut Utara	1.660	699	9350	17.75%	0.61%
3	Kotawaringin Lama	2.951	1379	19220	15.35%	1.08%
4	Kumai	18.701	7011	52821	35.40%	6.86%
5	Pangkalan Banteng	6.414	2582	37784	16.98%	2.35%
6	Pangkalan Lada	8.301	3579	34547	24.03%	3.05%
7	Wilayah Kosong/ Null	17	11			
<b>Jumlah</b>		<b>62679</b>	<b>24908</b>	<b>272531</b>	<b>23.00%</b>	<b>23.00%</b>

Sumber: Dinas Sosial, 2023

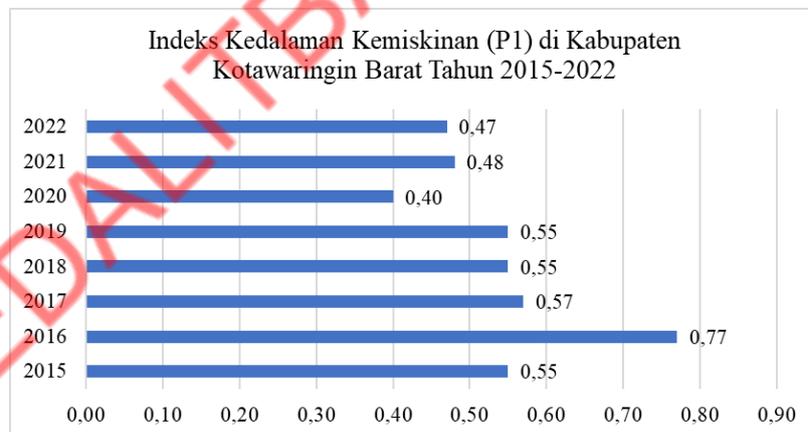


**Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023**

*Sumber: Dinas Sosial, 2023*

### 3.2.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (GK). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015-2022.



**Gambar 3. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 cukup variatif. Nilai indeks mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0,77, lalu menurun drastis pada tahun berikutnya. Pada tahun 2018-2019, nilai indeks stagnan pada



angka 0,55. Selanjutnya nilai indeks mengalami penurunan drastis kembali pada tahun 2020 menjadi 0,40. Nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,47. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mendekati garis kemiskinan.

### 3.2.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2)

Berdasarkan BPS, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai ini berarti bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut adalah Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.



**Gambar 3. 6 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah*

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2018 nilai indeks menurun hingga 0,08. Selanjutnya, nilai indeks pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 0,09 dan stagnan pada tahun berikutnya.

### 3.2.5 Garis kemiskinan (GK)

Menurut BPS, Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah total dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi



kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya). Sedangkan, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan (GK) berperan penting dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan yang meningkat menunjukkan bahwa harga-harga semakin naik baik dari makanan maupun nonmakanan sehingga untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin namun GK naik harus dilakukan intervensi peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk agar pendapatan yang dimiliki dapat mencukupi bahkan melebihi garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Nasional pada bulan September tahun 2022 naik sebesar 10,16% dibandingkan bulan September tahun 2021. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Indonesia (perkotaan) mencapai Rp. 502.130,00, sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp. 552.349,00. Garis kemiskinan perdesaan tahun 2021 berada di Rp. 464.474,00 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga Rp. 513.170,00. Berikut adalah Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022.



**Gambar 3. 7 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah*

Berdasarkan data BPS tahun 2018-2022, Garis Kemiskinan di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan. Hal itu menandakan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Indonesia,



Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat setiap tahunnya.

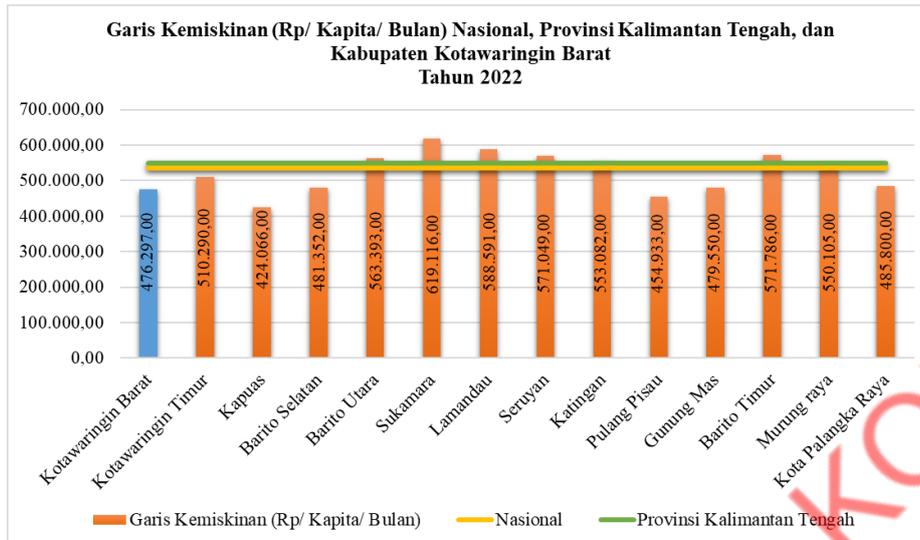
Garis Kemiskinan Kotawaringin Barat sendiri mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2021 berada di Rp. 418.388,00 dan pada tahun 2022 meningkat hingga Rp. 476.297,00. Berikut adalah garis kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 3. 4 Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan		
		2021	2022	D (selisih)
<b>1</b>	<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>418.388,00</b>	<b>476.297,00</b>	<b>57.909,00</b>
<b>2</b>	Kotawaringin Timur	467.551,00	510.290,00	42.739,00
<b>3</b>	Kapuas	345.272,00	424.066,00	78.794,00
<b>4</b>	Barito Selatan	450.706,00	481.352,00	30.646,00
<b>5</b>	Barito Utara	525.236,00	563.393,00	38.157,00
<b>6</b>	Sukamara	568.578,00	619.116,00	50.538,00
<b>7</b>	Lamandau	539.744,00	588.591,00	48.847,00
<b>8</b>	Seruyan	529.892,00	571.049,00	41.157,00
<b>9</b>	Katingan	498.487,00	553.082,00	54.595,00
<b>10</b>	Pulang Pisau	411.258,00	454.933,00	43.675,00
<b>11</b>	Gunung Mas	456.984,00	479.550,00	22.566,00
<b>12</b>	Barito Timur	534.896,00	571.786,00	36.890,00
<b>13</b>	Murung Raya	519.390,00	550.105,00	30.715,00
<b>14</b>	Palangka Raya	456.276,00	485.800,00	29.524,00
	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>506.982,00</b>	<b>548.816,00</b>	<b>41.834,00</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah Garis Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 476.297,00. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang merupakan Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



**Gambar 3. 8 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

### 3.3 Profil Kemiskinan Non Konsumsi

#### 3.3.1 Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan termasuk dalam salah satu bidang utama kemiskinan dan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam bidang pendidikan, ada beberapa indikator utama kemiskinan berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011, yaitu:

1. Angka partisipasi kasar (APK).
2. Angka partisipasi murni (APM).
3. Angka melek huruf.
4. Rasio APM perempuan/ laki-laki.
5. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.
6. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun juga dapat dinilai melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

##### 3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berikut adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Tabel 3. 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022**

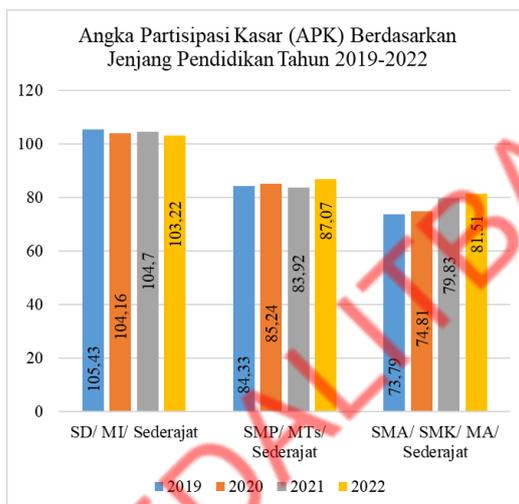
Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD/ MI	SMP/ MTs/ Sederajat	SMA/ SMK/ MA/ Sederajat
<b>2019</b>	105,43	84,33	73,79
<b>2020</b>	104,16	85,24	74,81
<b>2021</b>	104,70	83,92	79,83
<b>2022</b>	103,22	87,07	81,51

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

**Tabel 3. 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<b>SD</b>	104,62	101,72	103,22
<b>SMP</b>	101,72	96,46	87,07
<b>SMA</b>	103,22	95,42	81,51

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 3. 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa APK SD/ MI mengalami penurunan dari tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2021 APK SD/ MI adalah 104,70 dan mengalami penurunan menjadi 103,22 pada tahun 2022. Anak usia sekolah yang bersekolah SD/ MI mengalami penurunan dari tahun 2021-2022. Sedangkan, APK pada jenjang SMP/ MTs/ Sederajat mengalami kenaikan dari 83,92 (pada tahun 2021) menjadi 87,07 (pada tahun 2022). Setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa anak usia sekolah pada jenjang SMP/ MTs/ Sederajat semakin banyak pada tahun 2022.



Pada jenjang SMA/ SMK/ MA/ Sederajat nilai APK terus meningkat setiap tahunnya dari 73,79 (tahun 2019) ke 81,51 (tahun 2022). Hal itu menandakan bahwa terdapat peningkatan anak usia sekolah yang bersekolah SMA/ SMK/ MA/ Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain itu, pada tahun 2022 juga terlihat bahwa APK laki-laki lebih tinggi daripada APK perempuan. Nilai APK SD merupakan paling tinggi yaitu 103,22, dilanjutkan oleh APK SMP (87,07) dan SMA (81,51). Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah paling banyak di Kotawaringin Barat adalah anak usia sekolah berjenis kelamin laki-laki dan anak usia sekolah pada jenjang SD/ MI/ Sederajat.

### 3.3.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berikut adalah APM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022.

**Tabel 3. 7 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022**

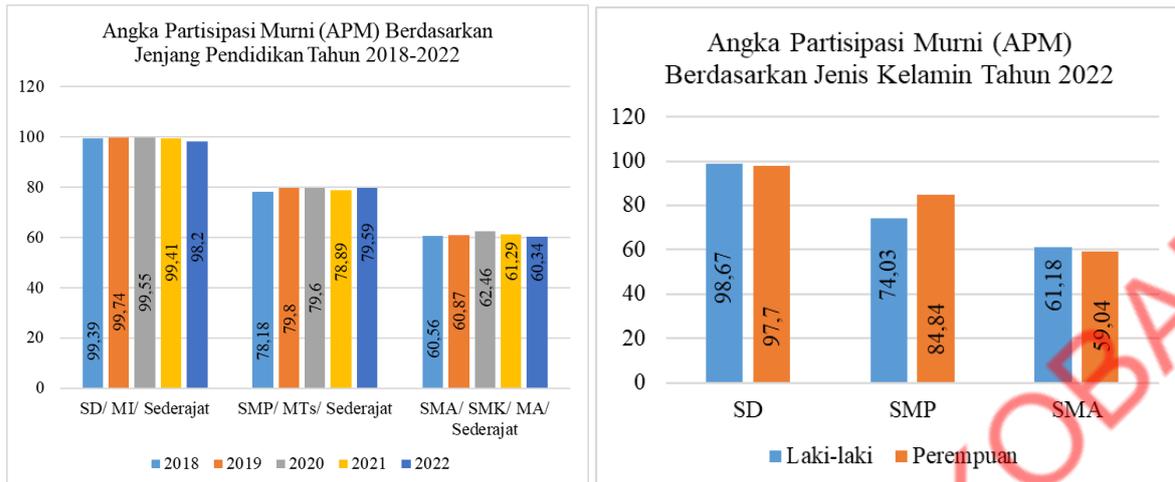
Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD/ MI	SMP/ MTs/ Sederajat	SMA/ SMK/ MA/ Sederajat
2018	99,39	78,18	60,56
2019	99,74	79,8	60,87
2020	99,55	79,6	62,46
2021	99,41	78,89	61,29
2022	98,20	79,59	60,34

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

**Tabel 3. 8 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
SD	98,67	97,7	98,2
SMP	74,03	84,84	79,59
SMA	61,18	59,04	60,34

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 3. 10 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa APM jenjang pendidikan SD/ MI mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018-2019 APM mengalami kenaikan dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 APM SD/MI berkisar 98,20. Hal itu berarti pada tahun 2022 semakin banyak anak sekolah SD yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan SD, yang juga diperkuat dengan nilai APM yang semakin mendekati nilai ideal (100%).

Pada jenjang SMP/ MTs/ Sederajat, APM tahun 2019 naik hingga 79,8 dan turun pada 2 (dua) tahun berikutnya. APM pada jenjang pendidikan tersebut baru mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 79,59. Hal itu berarti pada tahun 2022 semakin banyak anak sekolah SMP yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan SMP/ MTs/ Sederajat, meskipun nilai APM belum mendekati nilai ideal (100%).

Sedangkan, APM pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat terus menurun dari tahun 2020-2022 hingga 60,34. Hal itu berarti pada tahun 2020-2022 semakin sedikit anak sekolah SMA yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat, yang juga diperkuat dengan nilai APM yang semakin menjauhi nilai ideal (100%).

Nilai APM perempuan pada jenjang SD/ MI/ Sederajat dan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat lebih rendah daripada laki-laki. Hal tersebut menjelaskan bahwa jumlah anak sekolah berjenis kelamin perempuan yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tersebut lebih sedikit dibandingkan anak-anak sekolah berjenis kelamin laki-laki. Namun, berbeda pada jenjang SMP/ MTs/ Sederajat yang nilai APM laki-laki lebih rendah daripada nilai APM perempuan.



### 3.3.1.3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Berikut adalah Angka Melek Huruf Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2022.

**Tabel 3. 9 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2022**

Kelompok Umur	2021	2022
<b>15-19</b>	100,00	99,20
<b>20-24</b>	100,00	100,00
<b>25-29</b>	100,00	100,00
<b>30-34</b>	100,00	100,00
<b>35-39</b>	100,00	100,00
<b>40-44</b>	100,00	100,00
<b>45-49</b>	100,00	100,00
<b>50+</b>	95,75	94,49
<b>Jumlah</b>	<b>99,47</b>	<b>99,21</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Namun, Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian digantikan oleh angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang sebelumnya dipakai dalam mengukur dimensi pengetahuan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode lama. AMH dinilai tidak lagi menjadi indikator yang sensitif dalam mengukur capaian pembangunan dalam bidang pendidikan mengingat sudah hampir semua daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki AMH mendekati nilai 100 persen.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di suatu wilayah. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk tamat SD, diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun. Tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun dan tamat SMA diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Berikut ini adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 3. 10 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022**

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah
2013	11,90	7,58
2014	12,12	7,82
2015	12,13	8,01
2016	12,42	8,05
2017	12,69	8,35
2018	12,70	8,36
2019	12,71	8,41
2020	12,72	8,42
2021	12,73	8,64
2022	12,75	8,65

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



**Gambar 3. 11 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS tersebut diketahui bahwa angka HLS di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2013-2022. Pada tahun 2022, angka HLS mencapai 12,75. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,75 tahun atau setara dengan Diploma 1.

Selain itu, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat setiap tahunnya pada jangka 2013-2022. Pada tahun 2022, Rata-Rata



Lama Sekolah mencapai 8,65. Hal tersebut menjelaskan bahwa penduduk di Kotawaringin Barat rata-rata telah menyelesaikan pendidikan SD dan SMP.

#### 3.3.1.4. Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki

Salah satu indikator utama bidang pendidikan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011 untuk mengentaskan kemiskinan adalah rasio Angka Partisipasi Murni (APM) antara Perempuan dan Laki-laki. Berikut adalah Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

**Tabel 3. 11 Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio
<b>SD</b>	98,67	97,7	98,2	100,99
<b>SMP</b>	74,03	84,84	79,59	87,26
<b>SMA</b>	61,18	59,04	60,34	103,62

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS tersebut dapat dipahami bahwa rasio APM SMA antara perempuan dan laki-laki merupakan tertinggi yaitu 103,62 meskipun nilai APM terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya diikuti oleh rasio SD sebesar 100,99 dan rasio SMP 87,26.

#### 3.3.1.5. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka salah satu indikator utama kemiskinan di bidang pendidikan adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Daerah. Berdasarkan data yang ada, berikut adalah jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

**Tabel 3. 12 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>1</b>	Fraksi Gerindra	3	2	5
<b>2</b>	Fraksi Golkar	6	-	6
<b>3</b>	Fraksi PDIP	3	3	6
<b>4</b>	Fraksi PAN	2	-	2
<b>5</b>	Fraksi Nasdem	4	-	4
<b>6</b>	Fraksi PKB	2	-	2
<b>7</b>	Fraksi Demokrat	2	-	2
<b>8</b>	Fraksi PPP	1	-	1
<b>9</b>	Fraksi PKS	1	-	1
<b>10</b>	Fraksi Bekarya	1	-	1



No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	<b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data tersebut, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 5 orang sedangkan laki-laki berjumlah 25 orang. Jika dibandingkan laki-laki, jumlah kursi yang diduduki perempuan dalam DPRD masih sangat jauh. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik daerah masih tergolong rendah.

### 3.3.1.6. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, terdapat beberapa indikator dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas. Berikut adalah kinerja indikator pendukung bidang pendidikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 3. 13 Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Realisasi				Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
			2017	2018	2019	2020		2021	2023	2024	2025
1	Angka Kelulusan SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101	101	100	101	101	100%	100%	100%	100%
2	Angka Kelulusan SMP/ MTs/ Paket B		99,65	99,45	100,6	100,4	100,4	100%	100%	100%	100%
3	Angka Putus Sekolah SD/ MI		53,85	65	141,66	12,29	12,29	0,51	0,46	0,41	0,36
4	Angka Putus Sekolah SMP/ MTs		145,95	158,06	43,18	63,55	63,55	2,82	2,77	2,72	2,67
5	Angka Melanjutkan dari SD/ MI/ Paket A ke SMP/ MTs/ Paket B		99,95	99,94	89,7	83,31	83,31	85,7	85,75	85,8	85,85



No	Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Realisasi				Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
			2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
6	Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs/ Paket B ke SMA/ MA/ SMK/ Paket C		99,45	99,44	100,78	106,09	106,09	114,72	114,77	114,82	114,87
7	Persentase Tenaga Pendidik Berkualitas		-	-	-	-	47	48,94	52,49	57,75	64,12

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel kinerja tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas indikator mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya (2017-2021). Namun, masih terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan kinerja yaitu indikator Angka Kelulusan SMP/ MTs/ Paket B, Angka Putus Sekolah SD/ MI, dan Angka Melanjutkan dari SD/ MI/ Paket A ke SMP/ MTs/ Paket B. Akan tetapi, indikator-indikator tersebut ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya pada tahun 2023-2026. Skema optimis tersebut merupakan salah satu wujud prioritas daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 3.3.2 Bidang kesehatan

Berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011, terdapat beberapa indikator utama bidang kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu:

1. Angka Kematian Bayi;
2. Angka Kematian Balita;
3. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup;
4. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak;
5. Angka Kematian Ibu Melahirkan;
6. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih;
7. Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) (K1 dan K4);
8. Wanita menikah usia 15-49 tahun yang menggunakan Alat KB;
9. Tingkat kelahiran usia muda (per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun);
10. Angka penemuan pasien *tuberculosis* BTA positif baru;
11. Angka keberhasilan pengobatan pasien *tuberculosis*; dan
12. Prevalensi balita kekurangan gizi.



Dari 16 (enam belas) indikator utama tersebut, berikut adalah 14 indikator utama yang terdata di wilayah perencanaan.

### 3.3.2.1. Angka Kematian Bayi

Bayi dikategorikan sebagai makhluk yang rentang sehingga sering kali mendapat perhatian lebih besar dibandingkan kategori lainnya seperti manusia usia produktif yang biasanya tubuh sudah cukup kuat untuk menghadapi “serangan” penyakit. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting dalam menilai kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin banyak bayi yang terlahir hidup dengan kondisi sehat maka dapat menunjukkan kualitas peningkatan kesehatan di suatu daerah. Peningkatan fasilitas kesehatan untuk bayi dan ibu sangat diperlukan untuk menurunkan angka kematian yang terjadi pada balita, yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Berikut adalah data Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) di Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 3. 12 Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah*

### 3.3.2.2. Angka Kematian Balita

Kesehatan balita menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan Kesehatan. Angka kematian yang terjadi pada balita berkaitan erat dengan fasilitas kesehatan untuk bayi dan ibu. Peningkatan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk menurunkan angka kematian yang terjadi pada balita. Berdasarkan data BPS, Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 21,94. Hal itu menunjukkan bahwa setiap 1.000 balita di Kotawaringin Barat, 21-22 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

### 3.3.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator angka kematian yang berhubungan anak salah satunya adalah Angka Kematian Neonatal (AKN). Angka kematian neonatal merupakan salah satu target indikator Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011 dengan



target penurunan menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Angka Kematian anak di Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan pada tahun 2017-2019. Kematian neonatal turun dari 19 per 1000 kelahiran hidup menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup.

Berikut adalah Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) di Kabupaten Barat Tahun 2019.



**Gambar 3. 13 Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH di Kabupaten Barat Tahun 2019**

*Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, diolah*

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa AKN di Kotawaringin Barat tahun 2019 mencapai 22 per 1.000 KH dan AKB mencapai 25 per 1.000 KH. Kematian pada neonatal bayi lebih banyak terjadi pada laki-laki. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, penyebab kematian neonatal pada tahun 2019 meliputi Asfiksia, Kelainan Bawaan, dan Lain-lain.

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar pada bayi dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem dalam tubuh bayi. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal pada bayi. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok neonatal, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir (kunjungan neonatal/ KN).

#### **3.3.2.4. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak**

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B,



pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Penyakit-penyakit menular tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling murah, karena dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya (Dinas Kesehatan, 2019).

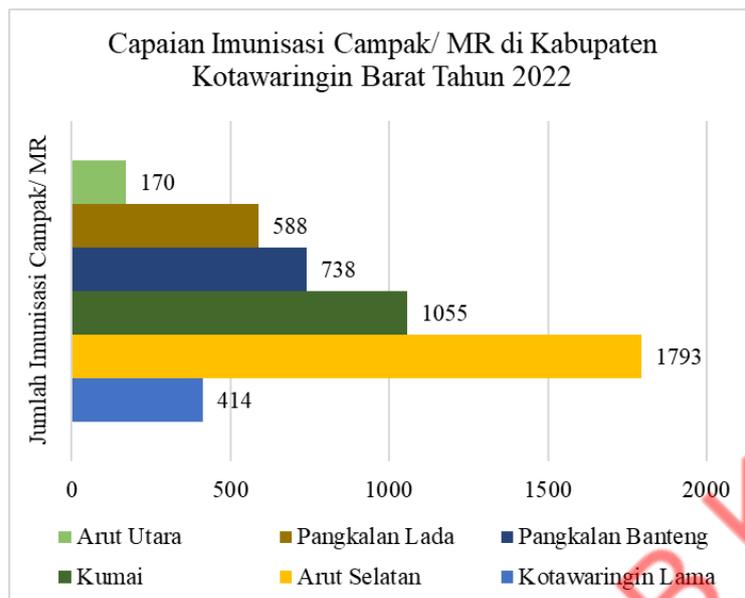
Campak/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah serta sebagai komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan capaian cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela. Maka dari itu, pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita.

Cakupan imunisasi campak/MR di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 87,4 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 73,6 persen. Persentase cakupan imunisasi campak/MR di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 mencapai 98,0%. Berikut adalah jumlah balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak/MR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

**Tabel 3. 14 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Campak/MR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Campak/ MR
1	Kotawaringin Lama	414
2	Arut Selatan	1.793
3	Kumai	1.055
4	Pangkalan Banteng	738
5	Pangkalan Lada	588
6	Arut Utara	170
	<b>Jumlah</b>	<b>4.758</b>

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023*



**Gambar 3. 14 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Campak/MR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data, diketahui bahwa imunisasi campak/ MR telah dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah imunisasi campak/MR yang diberikan pada balita di tahun 2022 mencapai 4.758. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk mencegah penyakit menular pada anak.

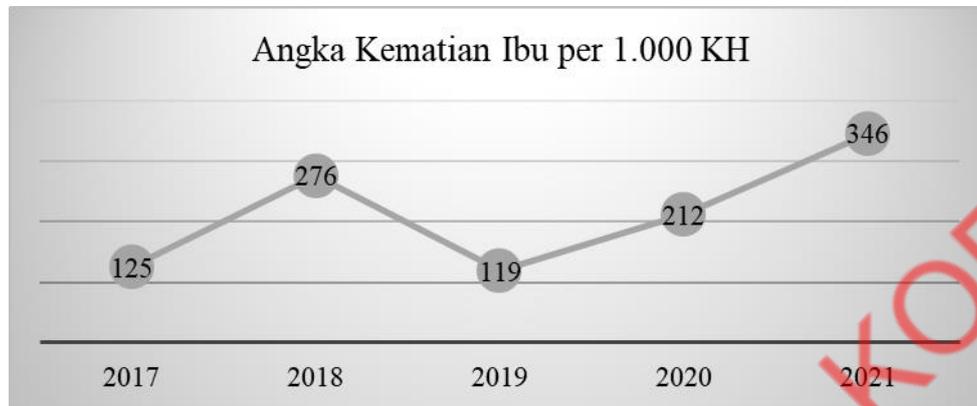
### 3.3.2.5. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kesehatan ibu dan anak disimpulkan sebagai tonggak pengetahuan dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat umumnya. Jika fasilitas kesehatan pertama bagi ibu anak dan baik, maka disimpulkan bahwa kesehatan bagi ibu dan anak dapat terjamin. Sehingga perhatian terhadap fasilitas kesehatan ibu dan anak perlu mendapat perhatian yang lebih bagi pemerintah dan *stakeholder* (BPS, 2023).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 KH. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan (RPD Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026)



Berikut adalah Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 berdasarkan data BPS Tahun 2017-2021.



**Gambar 3. 15 Angka Kematian Ibu per 1.000 KH di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021, diolah*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka kematian ibu melahirkan di Kotawaringin Barat mengalami kenaikan pada tahun 2019-2021 dari 119/1.000KH menjadi 346/1.000KH. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat melahirkan yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Sementara untuk perdarahan disebabkan empat hal yakni melahirkan ketika usia muda, melahirkan ketika usia tua, melahirkan terlalu sering, dan jarak antara satu kelahiran dan lainnya terlalu rapat. Namun, masing-masing capaian masih di atas target nasional. Perbaikan kualitas pelayanan di setiap lini tetap terus ditingkatkan untuk mendukung penurunan AKI.

### **3.3.2.6. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih**

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan disertai tenaga penolong persalinan yang kompeten diharapkan akan mampu menekan angka kematian bayi maupun ibu pada saat persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 mencapai 5.855 jiwa atau 90,8%. Persalinan yang dilakukan di Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 mencapai 5.648 jiwa atau 87,6%.

Berikut adalah persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan menurut penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



**Tabel 3. 15 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Penolong Kelahiran	Persentase (%)
1	Dokter Kandungan dan Dokter Umum	25,28
2	Bidan	66,25
3	Perawat	3,13
4	Dukun Beranak/ Paraji	5,34
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber: SUSENAS 2022 BPS



**Gambar 3. 16 Proporsi kelahiran yang Ditolong oleh Penolong Kelahiran di Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: SUSENAS 2022 BPS, diolah

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kotawaringin Barat memilih untuk melakukan persalinan di tenaga kesehatan yang memadai, terdidik, dan terampil. Sebanyak 94,66% masyarakat melahirkan ditolong oleh tenaga medis. Namun masih ada sebanyak 5,34% persalinan yang ditolong oleh tenaga nonmedis. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar angka tersebut dapat diturunkan.

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan disertai tenaga penolong persalinan yang kompeten diharapkan akan mampu menekan angka kematian bayi maupun ibu pada saat persalinan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Masyarakat juga diharapkan semakin mempercayai dan menggunakan jasa tenaga penolong persalinan medis, seperti dokter, bidan, maupun tenaga paramedis lainnya, daripada tenaga penolong persalinan nonmedis, seperti dukun bersalin ataupun lainnya.



### 3.3.2.7. Cakupan pelayanan Antenatal (Sedikitnya Satu Kali Kunjungan dan Empat Kali Kunjungan) (K1 dan K4)

Berdasarkan Dinas Kesehatan, penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan ibu hamil untuk K1 di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 5.011 dan K4 mencapai 4.505 pada tahun 2022. Berikut adalah jumlah ibu hamil yang melakukan satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan (K1 dan K4) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

**Tabel 3. 16 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4 di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan	Ibu Hamil	Kunjungan	
			K1	K4
1	Kotawaringin Lama	336	369	375
2	Arut Selatan	2.065	2.359	1.999
3	Kumai	976	1.013	947
4	Pangkalan Banteng	638	563	482
5	Pangkalan Lada	585	578	490
6	Arut Utara	150	129	212
	<b>Jumlah</b>	<b>4.750</b>	<b>5.011</b>	<b>4.505</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

### 3.3.2.8. Wanita Menikah Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Salah satu indikator utama kemiskinan bidang kesehatan yang tercantum dalam Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011 adalah jumlah wanita menikah usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB atau peserta KB aktif. Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB aktif



adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan PUS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS. Berikut adalah indikator dan capaian kinerja khusus urusan KB di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2021.

**Tabel 3. 17 Indikator dan Capaian Kinerja Khusus KB Aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Peserta KB Aktif	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta KB aktif	32.924	32.783	35.045	25.607	27.164
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	44.388	42.782	50.331	39.225	41.061
Rasio akseptor KB (%)	48,85	72,65	69,69	77,57	79,71
Cakupan peserta KB aktif/ PA (%)	72,20	32.783	34.013	65,28	66,15

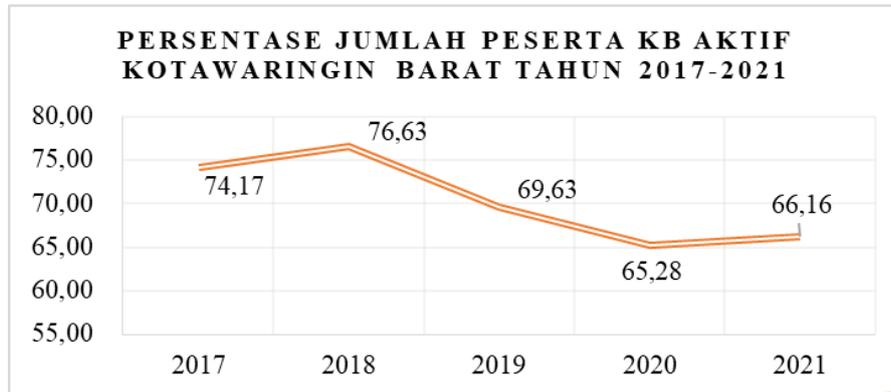
Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017



**Gambar 3. 17 Jumlah Peserta KB Aktif di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017, diolah

Jumlah PUS di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi jumlah. Pada tahun dasar (2017) jumlah PUS sebanyak 44.388 pasangan yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018. Jumlah itu meningkat tajam pada tahun 2019 sebanyak 50.331 pasangan dan mengalami penurunan yang tajam pula pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah PUS mencapai 41.061 pasangan.



**Gambar 3. 18 Persentase Jumlah Peserta KB Aktif di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017, diolah

Pergerakan capaian kinerja pada indikator jumlah peserta KB Aktif di Kotawaringin Barat mengalami kecenderungan fluktuatif dari tahun 2017-2021. Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa angka tertinggi terjadi pada tahun dasar yakni tahun 2017 lalu mengalami penurunan menurun pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, dari seluruh PUS yang ada, sebanyak 27.164 atau 66,16% adalah peserta KB aktif. Adapun jenis kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 18 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2017-2021**

Peserta KB Aktif	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
IUD	1033	1113	1694	586	648
MOP	126	129	131	47	67
MOW	727	775	463	620	765
IMPLANT	2362	2753	2771	2140	2354
SUNTIK	17721	17900	17454	15140	15819
PIL	9126	6735	12022	6576	6939
KONDOM	921	1029	537	498	572

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB Aktif adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern yang meliputi IUD, MOW, MOP, Implan, Kondom, Suntik, dan Pil.

### 3.3.2.9. Tingkat Kelahiran Usia Muda (Per 1.000 Perempuan Usia 15-49 Tahun)

Salah satu indikator utama kemiskinan berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011 adalah tingkat kelahiran usia muda



per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun. Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah jumlah kelahiran menurut jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

**Tabel 3. 19 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

Jenis Kelamin	Hidup	Mati	Jumlah
Laki-Laki	3099	35	3134
Perempuan	2801	13	2814
<b>Jumlah</b>	<b>5900</b>	<b>48</b>	<b>5948</b>

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 5.900. Jika ditotal dengan jumlah kematian, maka jumlah kelahiran seluruhnya di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 adalah 5.948. Data kelahiran ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kependudukan di suatu wilayah. Kelahiran termasuk salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpotensi menambah proporsi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

### 3.3.2.10. Angka Penemuan Pasien *Tuberculosis* (TB) BTA Positif Baru

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah kasus Tuberkulosis di suatu wilayah, terutama pada wilayah yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan minimnya pendanaan dan kurangnya akses pelayanan Tuberkulosis bagi masyarakat. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, insidensi TB menunjukkan penurunan selama 20 tahun terakhir dari 370 per 100.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 312 per 100.000 pada tahun 2019.

Berikut adalah data mengenai TB di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

**Tabel 3. 20 Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

Karakteristik	Jumlah
Laki-Laki	
Jumlah	258
%	52,9
Perempuan	
Jumlah	230
%	47,1
Laki-laki dan perempuan	488
TB anak umur 0-14 tahun	31



Karakteristik	Jumlah
<b>Jumlah Terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Standar</b>	<b>2.598</b>

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, diolah

Menurut data dapat diketahui bahwa jumlah kasus tuberkulosis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 mencapai 488 kasus yang dialami perempuan dan laki-laki. Tuberkulosis pada anak usia 0-14 tahun adalah 31 kasus. Sedangkan jumlah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan standar mencapai 2.598 pada tahun 2019. Data tersebut menjelaskan bahwa masih adanya kasus tuberkulosis di Kabupaten Kotawaringin Barat, meskipun begitu pelayanan standar masih ditingkatkan untuk melayani kasus tuberkulosis.

### 3.3.2.11. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien *Tuberculosis* (TB)

Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan (*success rate*). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.

Secara global, diperkirakan ada sebanyak 10 juta kasus TB pada tahun 2019, namun demikian angka ini telah menurun secara perlahan akhir-akhir ini. Berdasarkan letak geografisnya, kasus TB pada tahun 2019 paling banyak di regional Asia Tenggara (44%), Afrika (25%) dan Pasifik Barat (18%), dan persentase yang sedikit di Timur Tengah (8,2%), Amerika (2,9%) dan Eropa (2,5%). Ada 8 negara dengan jumlah kasus dua per tiga dari total kasus global, yaitu India (26%), Indonesia (8,5%), Cina (8,4%), Filipina (6%), Pakistan (5,7%), Nigeria (4,4%), Bangladesh (3,6%) dan Afrika Selatan (3,6%) (Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, keberhasilan pengobatan pasien TB selama 10 tahun data tertinggi pada tahun 2010 sebesar 89,2% sedangkan pada tahun 2020 keberhasilan pengobatan mengalami penurunan terendah sebesar 82,7% dan di tahun 2021 sebesar 83%. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2019 angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) sebesar 63,3% lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 84,5%.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, angka keberhasilan pengobatan semua kasus TB mencapai 83% pada tahun 2019. Berikut adalah data jumlah kasus, angka kesembuhan, angka pengobatan, dan angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.



**Tabel 3. 21 Jumlah Kasus, Angka Kesembuhan, Angka Pengobatan, Angka Keberhasilan Pengobatan *Tuberculosis* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Jumlah Semua Kasus TB Terdaftar dan Terobati			
Jumlah	248	212	460
Angka Kesembuhan TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis			
Jumlah	84	50	134
%	102,4	73,5	89,3
Angka Pengobatan Lengkap semua kasus TB			
Jumlah	153	95	248
%	61,7	44,8	53,9
Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus TB			
Jumlah	237	145	382
%	95,6	68,4	83

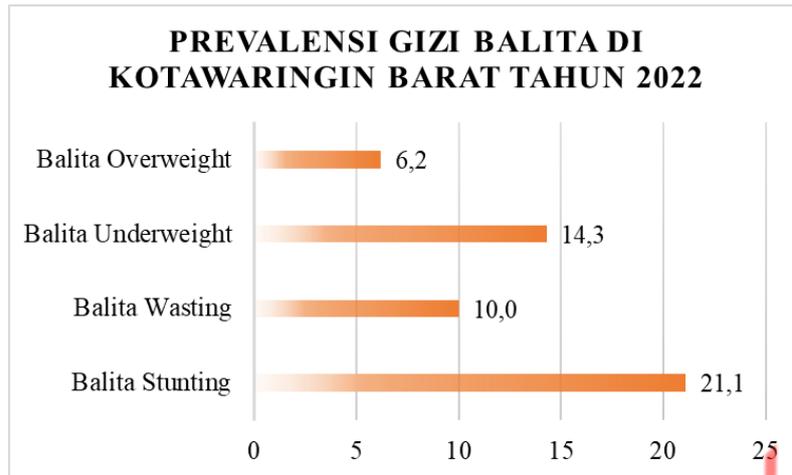
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, diolah

### 3.3.2.12. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa (Dinas Kesehatan, 2019).

Berdasarkan Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2022, status gizi balita dapat dinilai berdasarkan Tinggi Badan dan Berat Badan menurut umur. Berikut adalah prevalensi balita kekurangan gizi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



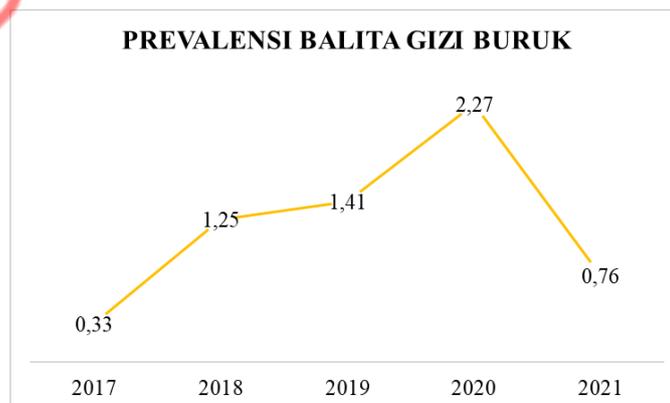
**Gambar 3. 19 Prevalensi Gizi Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2022, diolah

Berdasarkan data Kemenkes tersebut, diketahui bahwa balita *stunting* (kurang gizi) di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 21,1% dimana Kabupaten Kotawaringin Barat menempati posisi kesebelas di Provinsi Kalimantan Tengah. Balita *wasting* (berat badan menurun) menempati posisi keenam dari 14 (empat belas) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan prevalensi sebesar 10%.

Selain itu juga diketahui bahwa masih terdapat balita yang *overweight* (kelebihan berat badan) dan *underweight* (berat badan kurang). Balita *overweight* di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 6,2% dan balita *underweight* mencapai 14,3%.

Data-data tersebut juga dilengkapi oleh prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2021. Berikut adalah grafik prevalensi tersebut.



**Gambar 3. 20 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, diolah



Diketahui bahwa prevalensi balita gizi buruk di Kotawaringin Barat mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun 2017-2019 dan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 2,27%. Kemudian prevalensi tersebut menurun drastis pada tahun 2021 yaitu 0,76%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menurunkan angka *stunting* telah dilaksanakan dengan baik. Usaha tersebut tetap dilakukan pada tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi angka *stunting* balita di daerah.

### 3.3.2.13. Kinerja Angka Harapan Hidup – Indikator Utama Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Serta, Dimensi Umur Panjang dan Sehat diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan gambaran rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai seseorang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu (BPS, 2020). Selain itu, angka harapan hidup juga merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta salah satu indikator capaian pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan suatu daerah.

Peningkatan AHH dapat tercapai seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk dan pembangunan bidang kesehatan baik dari lingkungan maupun sarana dan prasarannya. Rendahnya angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan perlunya optimalisasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti: kesehatan lingkungan, peningkatan konsumsi gizi dan kalori masyarakat.

Berikut adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.



**Gambar 3. 21 Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, diolah



Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat setiap tahunnya. Angka tersebut melesat naik hingga 70,98 pada tahun 2022. Artinya setiap bayi yang dilahirkan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 secara rata-rata akan mampu bertahan hidup hingga usia 70-71 tahun.

Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan sebesar 0,64 tahun selama 6 (enam) tahun terakhir. Semakin tingginya angka harapan hidup mengindikasikan makin tingginya kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, AHH akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Di bawah ini adalah kinerja dan target indikator bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

**Tabel 3. 22 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Realisasi				Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	70,34	70,43	70,51	70,59	70,68	70,74	70,82	70,90	70,98

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Berdasarkan target hingga tahun 2026, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan optimis menargetkan kinerja AHH untuk mencapai 70,98 tahun. Angka tersebut naik sebesar 0,3 tahun dari kinerja AHH pada tahun 2021.

### 3.3.3 Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011, terdapat beberapa indikator utama bidang ketenagakerjaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu Tingkat Pengangguran yang meliputi:

1. Angka Pengangguran;
2. Jumlah Angkatan Kerja; dan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

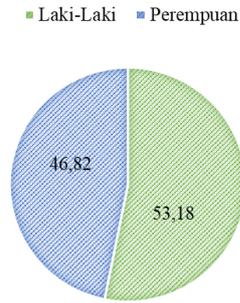
Berikut adalah indikator utama bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

#### 3.3.3.1. Angka Pengangguran

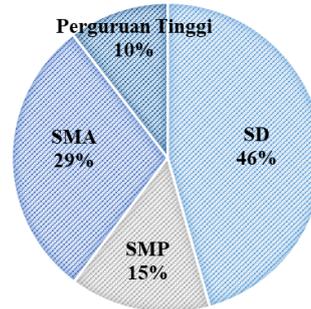
Angka Pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Berdasarkan BPS Tahun 2022, berikut adalah Angka Pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN  
JENIS KELAMIN TAHUN 2022



ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN  
JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2022



**Gambar 3. 22 Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: BPS, 2023, diolah

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa angka pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Angka pengangguran laki-laki sebesar 46,82% atau sebanyak 3.528 jiwa dan angka pengangguran perempuan sebesar 53,18% atau sebanyak 4.007 jiwa. Sedangkan, jika dinilai berdasarkan jenjang pendidikan, angka pengangguran terbanyak adalah pada jenjang SD sebesar 46% atau sebanyak 3.439 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh jenjang SMA sebesar 29% atau sebanyak 2.212 jiwa, jenjang SMP sebesar 15% atau sebanyak 1.101 jiwa, dan jenjang perguruan tinggi sebesar 10% atau sebanyak 783 jiwa. Jika ditotal, angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mencapai 7.535 jiwa (BPS, 2022).

### 3.3.3.2. Jumlah Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yakni angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja (BAK). Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara waktu tidak bekerja dan pengangguran. Adapun bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai aktivitas ekonomi, baik karena masih bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun aktivitas lainnya selain kegiatan pribadi (BPS, 2020).

Berdasarkan BPS, berikut adalah Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



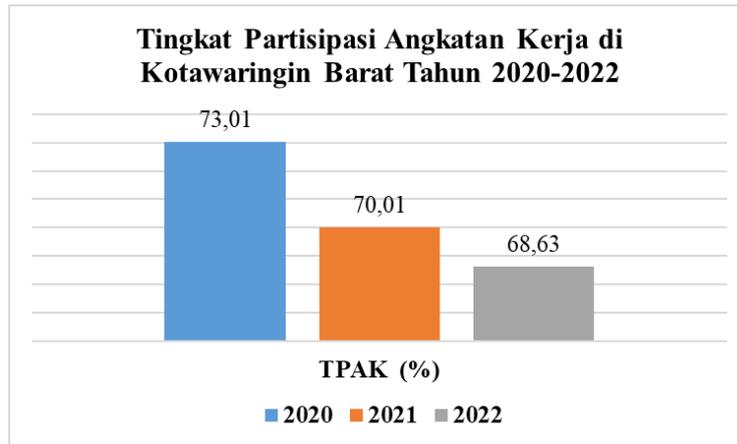
**Tabel 3. 23 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
SD	62.457	3.439	65.896	94,78	34.385	100.281	65,71
SMP	24.518	1.101	25.619	95,70	23.071	48.690	52,62
SMA	55.715	2.212	57.927	96,18	17.203	75.130	77,10
Perguruan Tinggi	16.937	783	17.720	95,58	1.755	19.475	90,99
<b>Jumlah</b>	<b>159.627</b>	<b>7.535</b>	<b>167.162</b>	<b>95,49</b>	<b>76.414</b>	<b>243.576</b>	<b>68,63</b>

Sumber: BPS, 2023

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 mencapai 167.162 jiwa (95,49%) yang mencakup jenjang pendidikan terakhir SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja mencapai 76.414 jiwa atau sebesar 68,63%. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mencapai 7.535 jiwa atau 4,5% terhadap jumlah angkatan kerja. Meskipun hanya sebagian kecil penduduk yang menganggur, namun angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, karena tanpa pekerjaan seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang akhirnya akan jatuh pada jurang kemiskinan.

Selain Angkatan Kerja, indikator lain yang juga penting untuk diketahui dari sisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan proporsi angkatan kerja dan penduduk usia kerja. TPAK digunakan untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2020).



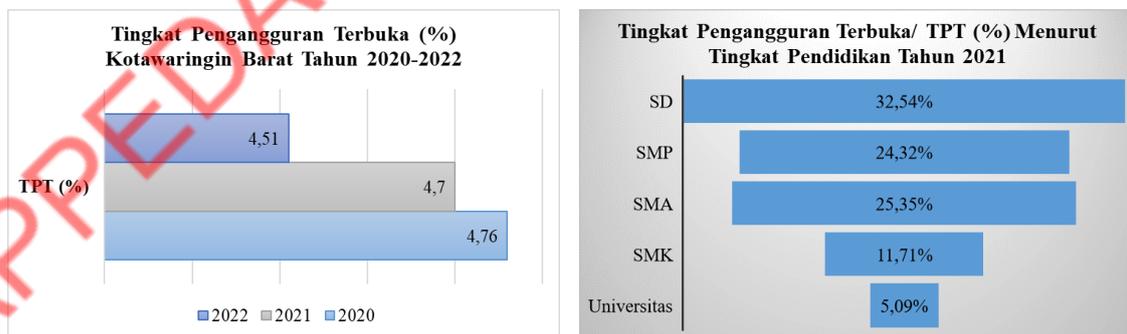
**Gambar 3. 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022**

Sumber: BPS, 2023, diolah

Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebanyak 4,38%. Pada tahun 2020, TPAK di Kotawaringin Barat mencapai 73,01%. Sedangkan pada tahun 2022, nilai TPAK Kotawaringin Barat sebesar 68,63%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas pada kegiatan ekonomi dari tahun 2020-2022.

### 3.3.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pengangguran di suatu daerah adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut adalah TPT pada Tahun 2020-2022 dan TPT menurut Tingkat Pendidikan pada tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 3. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022**

Sumber: BPS, 2023, diolah

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa TPT di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sepanjang tahun 2020-2022. Pada tahun



2020, TPT Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,76% dan angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2022 mencapai 4,51%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, angka TPT di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebanyak 0,25%.

Selain itu, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, angka TPT di Kotawaringin Barat tertinggi berada di tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 32,54%. Sedangkan pada tingkat SMP sebesar 24,32%, SMA sebesar 24,35%, SMK sebesar 11,71%, dan universitas sebesar 5,09%. Hal tersebut tentunya menjadi ironi melihat pendidikan yang tinggi ternyata bukan jaminan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Namun hal tersebut juga bisa dikarenakan lulusan universitas tersebut belum menemukan pekerjaan yang sesuai/cocok dengan pendidikannya.

### 3.3.3.4. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Di bawah ini adalah kinerja dan target indikator bidang tenaga kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**Tabel 3. 24 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Realisasi				Kinerja Awal RPJMD 2021	Target RPD			
		2017	2018	2019	2020		2023	2024	2025	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,17	3,01	2,62	4,76	4,70	4,60	4,50	4,40	4,30

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Berdasarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut dapat dipahami bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2017-2020. Angka TPT mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020, kemudian angka TPT kembali mengalami penurunan hingga 4,70% pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, skema optimis diupayakan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menurunkan angka TPT hingga 4,30% pada tahun 2026 ke depan.

### 3.3.4 Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011, terdapat beberapa indikator utama bidang infrastruktur dasar dalam penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu:

1. Akses sanitasi layak



2. Akses air minum layak
3. Proporsi rumah tangga dengan kepemilikan hak atas rumah/ temoat tinggal
4. Proporsi rumah tinggal layak huni
5. Rasio elektrifikasi

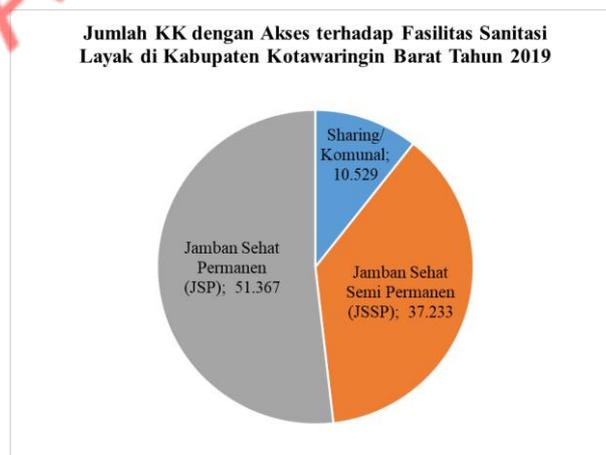
Berikut adalah penjabaran indikator-indikator tersebut disertai capaian kinerja dan target Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang Infrastruktur Dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.

#### 3.3.4.1. Akses Sanitasi Layak

Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *faeces*. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain dilengkapi dengan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama.

Berikut adalah jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019.



**Gambar 3. 25 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Layak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019



Pada tahun 2019, jumlah KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 99.129 KK atau 117,1%. Jumlah tersebut meliputi jumlah KK yang menggunakan fasilitas sanitasi sebagai berikut.

1. Sanitasi *Sharing/* Komunal sebanyak 10.529 KK dengan jumlah sarana mencapai 3.169.
2. Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sebanyak 37.233 KK dengan jumlah sarana mencapai 13.603.
3. Jamban Sehat Permanen (JSP) sebanyak 51.367 KK dengan jumlah sarana mencapai 51.367.

Data tersebut semakin berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah perkembangan persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2017-2021.



**Gambar 3. 26 Persentase Rumah Bersanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026*

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 88,15%. Namun, terdapat peningkatan pada tahun 2021 yaitu 93,19%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan sanitasi semakin baik. Meskipun begitu, upaya penjaminan akses atas sanitasi yang layak untuk semua penduduk tetap terus dilaksanakan ke depannya.

#### **3.3.4.2. Akses Air Minum Layak**

Sesuai dengan indikator utama penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur, ketersediaan air yang layak merupakan hal yang sangat penting. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum



dan memasak, merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sumber air minum yang layak dapat mencegah anggota rumah tangga terserang berbagi penyakit (BPS, 2022).

Selain sanitasi, air minum layak juga dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan. Air minum layak termasuk dalam penilaian kualitas fasilitas tempat tinggal. Dalam hal kemiskinan, rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/ cuci/ dan lain-lain yang digunakan berasal dari air terlindung (BPS, 2020). Berikut adalah persentase rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.



**Gambar 3. 27 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Rumah Tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021. Persentase terendah pada tahun 2018 yaitu 67,5% rumah tangga pengguna air bersih. Dalam jangka waktu 5 tahun, persentase rumah tangga pengguna air bersih mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 92,59%. Hal itu berarti standar hidup masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penggunaan air minum bersih sudah sangat baik. Serta masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi air bersih yang layak digunakan.

### 3.3.4.3. Proporsi Rumah Tinggal Layak Huni

Sebagai kebutuhan dasar manusia maka pengukuran indikator hasil pembangunan perumahan dan permukiman harus berorientasi perubahan pada kondisi masyarakat (*result based*). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rumah tinggal layak huni adalah rumah dengan ketahanan dan kecukupan luas bangunan yang layak, serta memiliki akses sanitasi dan air minum/



bersih yang layak. Berikut adalah rumah tinggal dan permukiman layak huni di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.



**Gambar 3. 28 Proporsi Rumah Tinggal Layak Huni di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



**Gambar 3. 29 Rumah Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat**

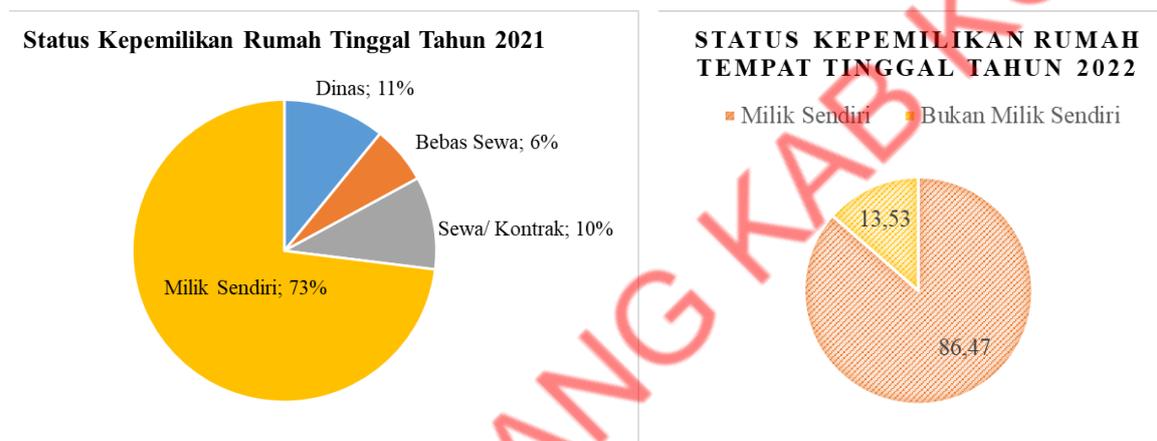
Sumber: Hasil Survei, Tahun 2023

Menurut SDGs, pada tahun 2030 terwujud jaminan akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengupayakan peningkatan proporsi rumah tinggal layak huni selama periode 2017-2021. Berdasarkan data, rumah tinggal layak di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan dari tahun 2017-2021 yaitu sebanyak 0,06 dari 0,91 pada tahun 2017 menjadi 0,97 pada tahun 2021. Sedangkan rasio permukiman layak huni berada pada angka yang sama dari tahun 2017-2021 yaitu 0,99.



### 3.3.4.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Kepemilikan Hak Atas Rumah/ Tempat Tinggal

Kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota rta yang mendiaminya. Terdiri dari milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bersama dan lainnya. Milik sendiri merupakan status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.



**Gambar 3. 30 Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2022**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



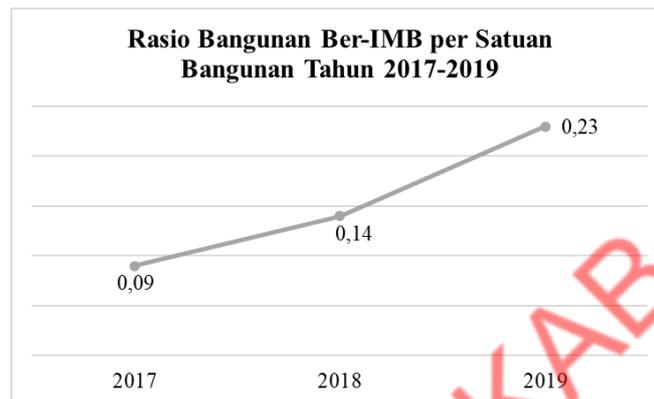
**Gambar 3. 31 Hasil Survei Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sumber: Hasil Survei, Tahun 2023

Status kepemilikan rumah tinggal yang dimiliki sendiri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 73% menjadi 86,47% pada tahun 2022. Sama halnya dengan rasio bangunan ber-IMB per satuan



bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebanyak 0,09% menjadi 0,23% di tahun 2019. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak atas rumah/ tempat tinggal semakin meningkat. Berikut adalah Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2019.

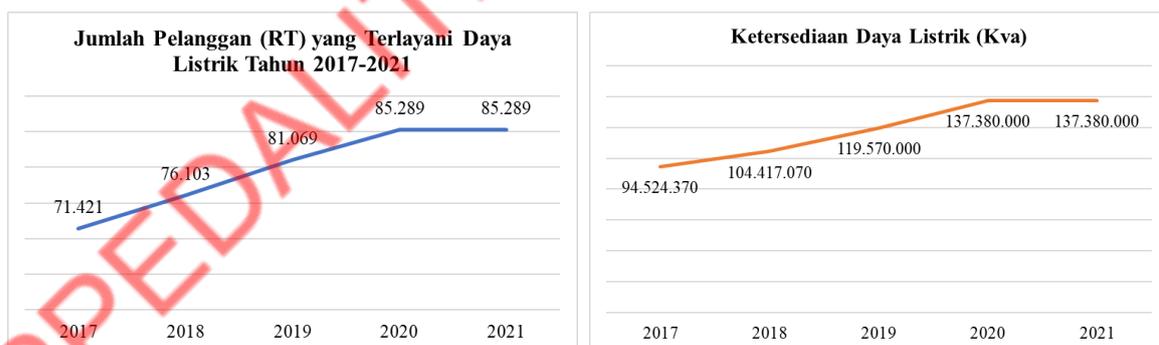


**Gambar 3. 32 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2019**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

### 3.3.4.5. Rasio Elektrifikasi

Untuk rumah tinggal dengan akses listrik menunjukkan progres peningkatan pada setiap tahunnya dengan capaian tahun terakhir sebesar 87,61%.



**Gambar 3. 33 Jumlah Pelanggan (RT) yang Terlayani dan Ketersediaan Daya Listrik (Kva) di Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Daya listrik yang tersambung kepada pelanggan di Kotawaringin barat dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 94.524.370 Kva di tahun 2017 menjadi 137.380.000 Kva di tahun 2021. Dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 71.421 pelanggan menjadi



85.289 pelanggan. Meski begitu, ketersediaan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup baik.

### 3.3.4.6. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2017-2021

Berikut adalah capaian kinerja pada Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.

**Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	74,21	67,50	80,50	80,11	92,59
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	80,39	87,60	90,00	88,15	93,19
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	80,12	80,79	81,53	81,96	87,61
4	Rasio rumah layak huni	0,91	0,95	0,95	0,96	0,97
5	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,09	0,14	0,23	n/a	n/a

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 sampai 2021 antara lain: persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang menunjukkan adanya peningkatan mencapai 92,59%, rumah tangga bersanitasi mencapai 93,19%, penerangan listrik mencapai 87,61%, rasio rumah layak huni mencapai 0,97 dan rasio bangunan ber-IMB mencapai 0,23 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mengelola perumahan dengan baik.

### 3.3.4.7. Capaian dan Target Indikator Kawasan Permukiman Kumuh Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Permukiman kumuh dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses air bersih, memiliki sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni.

Bagi masyarakat miskin, kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal tidak dapat diabaikan begitu saja karena masalah ini penting dalam dan bagi kehidupan sosial ekonomi. Tetapi di satu sisi ada ketidakmampuan untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan permukimannya agar layak untuk dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan



yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas permukiman, semakin kumuh pula kondisi permukimannya. Sedangkan masyarakat miskin tidak mampu menyediakan pembiayaan yang cukup untuk memperbaiki kondisi permukimannya. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh.

Berikut adalah capaian dan target kinerja indikator bidang permukiman khususnya permukiman kumuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun.

**Tabel 3. 26 Capaian dan Target Kinerja Indikator Bidang Permukiman (Permukiman Kumuh) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Realisasi				Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
Luas permukiman kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84,9	89,9	94,9	116,96	116,96				
1. Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang di tangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A	N/A	N/A	1,13	1,37	1,5	1,65	1,82
2. Persentase kawasan permukiman yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A	N/A	N/A	19,5	23,6	25,95	28,55	31,4
3. Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A	N/A	N/A	89	97	99	100	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Capaian kinerja indikator bidang permukiman khususnya permukiman kumuh terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Oleh karena itu, target indikator pada tahun-tahun berikutnya menggunakan skema optimis untuk terus menaikkan angka capaian hingga tahun 2026.

### 3.3.4.8. Capaian dan Target Indikator Bidang Infrastruktur Dasar

Berikut adalah capaian dan target kinerja indikator bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.



**Tabel 3. 27 Kinerja dan Target Kinerja Indikator Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2021	2023	2024	2025	2026
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	Dinas PUPR	92,59	92,6	92,61	92,62	92,63
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Dinas PUPR	93,19	94	96	98	100
Indeks infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas PUPR	70,01	71,45	72,28	72,80	73,37
Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	68,40	68,74	68,88	69,00	69,17

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Target kinerja bidang infrastruktur dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan terus berupaya menaikkan target pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2026, target capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diharapkan mencapai 73,37% serta target capaian urusan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan mencapai 69,17%.

### 3.3.5 Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Tahun 2011, terdapat beberapa indikator utama bidang ketahanan pangan dalam penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu:

1. Perkembangan harga beras;
2. Produksi bersih serelia; dan
3. Harga bahan kebutuhan pokok utama.

Berikut adalah penjabaran indikator-indikator tersebut disertai capaian kinerja dan target Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.

#### 3.3.5.1. Perkembangan Harga Beras

Berikut adalah perkembangan Harga Beras di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bulan Januari – Juni Tahun 2023.



**Tabel 3. 28 Perkembangan Harga Beras Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari – Juni Tahun 2023**

Merk Beras	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Beras Dua Baung / kg	13429	13600	13600	14200	14200	14200
Beras JDR Premium / kg	22500	22500	22500	22500	22500	22500
Beras Lahap / kg	13300	13300	13300	14300	14210	14210
Beras Lembu / kg	13800	13870	13870	14900	14448	14448
Beras Medium / kg	12000	12000	12000	11000	11000	11000
Beras Pondok Petani / kg	16000	16000	16000	16000	16000	16000
Beras Rojo Lele Zak Merah / kg	0	0	27620	0	0	0
Beras Siam Lantik / kg	18000	18000	18000	24000	24715	24715
Beras Siam Unus / kg	20000	20000	20000	28000	28953	28953

Sumber: Bapokting Kotawaringin Barat, 2020

Perkembangan harga beras di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bulan Januari – Juni di tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa merk beras mengalami kenaikan, namun beberapa merk memiliki harga yang tetap selama 6 (enam) bulan terakhir. Ada beberapa merk beras yang mengalami kenaikan cukup banyak sebesar Rp. 8.953,00 dan Rp. 6.715,00 dalam 6 (enam) bulan terakhir.

### 3.3.5.2. Produksi Bersih Serealia

Tingkat produktivitas padi (sawah dan ladang) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 mencapai 3,95 ton per hektar dalam bentuk gabah kering. Sedangkan untuk produksi serealia lainnya dapat dilihat pada tabel luas panen per kecamatan berikut ini.

**Tabel 3. 29 Luas Panen Serealia di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020**

Kecamatan	Padi	Sorgum	Jagung	Jagung Muda
Kotawaringin Lama	153,5	1,5	36,2	0,7
Arut Selatan	306,8	0,1	237,9	45,0
Kumai	699,6	-	236,5	-
Pangkalan Banteng	416,9	-	153,9	19,5
Pangkalan Lada	69,3	9,0	141,1	-
Arut Utara	922,3	-	87,4	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.568,4</b>	<b>10,6</b>	<b>893,0</b>	<b>65,2</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020

**Tabel 3. 30 Rekapitulasi Luas Panen (Ha) Serealia di Kotawaringin Barat Tahun 2020**

No	Serealia	Jan-Des
1.	Padi sawah	939,0
2.	Padi Ladang	1.629,4
3.	Padi	2.568,4



No	Serelia	Jan-Des
4.	Jagung	893,0
5.	Jagung - Muda	65,2
6.	Sorgum	10,6

Sumber: Bapokting Kotawaringin Barat, 2020

**Tabel 3. 31 Perkembangan Luas Panen Serelia (ton/ha) di Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020**

No	Nama Tanaman Pangan	Satuan	Realisasi Tahunan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah (ATAP)	Ton/ Ha	3,57	3,43	3,22	3,11	3,96
2	Padi Ladang (ATAP)	Ton/ Ha	2,01	2,01	3,50	3,60	3,38
3	Padi (ATAP)	Ton/ Ha	3,24	3,20	3,22	3,11	3,95
4	Jagung (ATAP)	Ton/ Ha	3,73	3,92	5,48	5,71	4,42
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>Ton/ Ha</b>	<b>37,55</b>	<b>41,28</b>	<b>61,15</b>	<b>59,15</b>	<b>56,43</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Barat, 2020

### 3.3.5.3. Harga Bahan Pokok

Berikut adalah harga bahan pokok di Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari – Mei Tahun 2023.

**Tabel 3. 32 Harga Bahan Pokok Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Januari – Mei Tahun 2023**

No	Bahan Pokok	Januari	Februari	Maret	April	Mei
<b>A</b>	<b>Beras</b>					
1	Beras Dua Baung / kg	13.429	13.600	13.600	14.200	14.200
2	Beras JDR Premium / kg	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	Beras JDR Rojo Lele / kg					-
4	Beras Lahap / kg	13.300	13.300	13.300	14.300	14.210
5	Beras Lembu / kg	13.800	13.870	13.870	14.900	14.448
6	Beras Medium / kg	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
7	Beras Pondok Petani / kg	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	Beras Rojo Lele Zak Merah / kg			27.620		-
9	Beras Siam Lantik / kg	18.000	18.000	18.000	24.000	24.715
10	Beras Siam Unus / kg	20.000	20.000	20.000	28.000	28.953
<b>B</b>	<b>Cabai</b>					
1	Cabai Merah Besar/ kg	53.810	45.500	60.000	55.715	52.381
2	Cabai Merah Keriting/ kg	50.000	51.500	60.953	55.715	47.858
3	Cabai Rawit Hijau/ kg	38.800	32.750	41.905	37.143	33.810
4	Cabai Rawit Merah/ kg	61.429	57.000	69.524	47.143	44.762
<b>C</b>	<b>Bawang</b>					
1	Bawang Merah / kg	45.000	45.000	40.953	41.072	44.286
2	Bawang Putih / kg	35.000	35.000	39.762	36.072	39.286
<b>D</b>	<b>Kacang</b>					
1	Kacang Hijau / kg	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	Kacang Kedelai / kg	16.477	17.000	17.000	17.000	17.762
3	Kacang Tanah / kg	30.000	30.000	30.000	30.000	31.524
<b>E</b>	<b>Tomat</b>					
1	Tomat Buah / kg	16.429	14.300	14.762	23.929	20.905
<b>F</b>	<b>Kentang</b>					
1	Kentang Bulat/ kg	21.667	21.450	21.048	20.000	21.572



No	Bahan Pokok	Januari	Februari	Maret	April	Mei
<b>G</b>	<b>Kol</b>					
1	Kol Sayur/ kg	15.953	14.600	13.572	15.929	14.381
<b>H</b>	<b>Wortel</b>					
1	Wortel Sayur/ kg	20.000	20.000	20.000	20.000	19.288
<b>I</b>	<b>Ketela</b>					
1	Ketela Kayu/ kg	5.000	5.572	7.000	7.000	7.000
<b>J</b>	<b>Lada</b>					
1	Lada Biji/ kg	150.000	10.000	150.000	150.000	150.000
<b>K</b>	<b>Kopi</b>					
1	Kopi Biji/ kg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.239
<b>L</b>	<b>Kelapa</b>					
1	Kelapa Biji/ kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>M</b>	<b>Gula</b>					
1	Gula Pasir Eceran/ kg	15.000	15.000	15.000	14.429	14.020
2	Gula Kemasan/ kg	16.500	16.500	16.500	15.572	16.377
<b>N</b>	<b>Minyak Goreng</b>					
1	Minyak Goreng Bimoli (1 liter)/ botol	24.000	23.900	23.250	21.500	21.500
2	Minyak Goreng Bimoli (5 liter)/ jerigen	113.096	105.000	106.877	106.800	106.800
3	Minyak Goreng Curah (1,5 liter)/ botol	22.762	25.000	24.429	23.143	22.839
<b>O</b>	<b>Tepung Terigu</b>					
1	Tepung Terigu Cakra Kembar / kg	13.000	13.000	13.186	13.300	13.139
2	Tepung Terigu Cap Semar / kg	-	-	-	-	-
3	Tepung Terigu Lencana Merah / kg	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	Tepung Terigu Segitiga Biru / kg	13.100	13.100	13.224	13.300	13.029
<b>P</b>	<b>Garam Beryodium</b>					
1	Garam Beryodium Bata / buah	884	1.250	1.250	1.250	1
2	Garam Beryodium Halus / bungkus	2.167	2.500	2.500	2.500	
<b>Q</b>	<b>Susu</b>					
1	Susu Bubuk Bendera Full Cream (400 gr) / kotak	42.700	42.700	42.672	42.500	42.500
2	Susu Bubuk Dancow Full Cream (400 gr) / kotak	49.000	49.000	51.167	52.500	52.500
3	Susu Bubuk Indomilk Full Cream (400 gr) / kotak	-	-	-	-	-
4	Susu SKM Bendera Coklat / kaleng	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	Susu SKM Bendera Putih Gold (398 gr) / kaleng	-	-	-	-	-
6	Susu SKM Cap Nona / kaleng	-	3.870	12.900	12.900	12.900
7	Susu SKM Indomilk Putih (390 gr) / kaleng	12.700	12.700	12.329	12.100	12.100
<b>R</b>	<b>Daging</b>					
1	Daging Sapi (Has) / kg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2	Daging Sapi (Rendang) / kg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Daging Sapi (Semur) / kg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>S</b>	<b>Ayam</b>					
1	Daging Ayam Kampung / kg	80.000	80.000	80.000	80.000	79.048
2	Daging Ayam Ras (Boiler) / kg	41.858	40.850	40.667	41.072	44.905
<b>T</b>	<b>Telur</b>					
1	Telur Ayam Kampung / butir	3.000	2.925	2.667	3.000	3.000
2	Telur Itik / butir	3.000	3.400	3.500	3.500	3.810



No	Bahan Pokok	Januari	Februari	Maret	April	Mei
3	Telur Ras (Boiler) / butir	2.200	2.200	2.200	2.200	2.243
<b>U</b>	<b>Ikan</b>					
<b>1</b>	Ikan Segar Kembung / kg	35.953	34.500	39.048	38.572	36.905
2	Ikan Segar Nila / kg	52.620	50.000	50.000	51.072	50.953
3	Ikan Segar Tongkol / kg	31.905	31.750	34.048	32.500	35.477
<b>V</b>	<b>Ikan Kering</b>					
<b>1</b>	Ikan Kering Telang / kg	75.000	75.000	75.000	75.000	73.096
2	Ikan Kering Teri / kg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Sumber: *Bapokting Kotawaringin Barat, 2020*

### 3.3.5.4. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Berikut adalah Tabel Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Dalam 4 (empat) tahun terakhir ketujuh indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Sebagian besar indikator telah mencapai SPM bahkan melebihi SPM yang ditetapkan. Namun, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, belum bisa memenuhi target SPM dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dan kurangnya SDM.

**Tabel 3. 33 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.458 kkal/ ka p/ Hr	2.501 kkal/ka p/Hr	2.369 kkal/ka p/Hr	2.528 kkal/ ka p/ Hr	2.512 kkal/ka p/Hr
2	Penguatan Cadangan Pangan	60 ton	60 ton	60 ton	60 ton	60 ton
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Gejolak harga < 25% (100%)	Gejola k harga < 25% (100%)			
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,3	96,8	97.04	96.5	97.1
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	77,5%	78%	78%	78%	78%
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	10 Desa	5 Desa	3 Desa	2 Desa	2 Desa

Sumber: *RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022*



**Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras)**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	286.714	304.082	313.397	322.830	312.509
2	Jumlah produksi (Ton)	6.468,14	5.228,41	2.531,38	8.292,32	2.484,79
3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	35961,69	37.025,02	37,044,14	39.307,76	38.307,76
4	Jumlah Kekurangan (Ton)	26.588,50	31.796,61	35.627,79	31.015,39	35.566,31

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dalam sistem ketersediaan pangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih mengalami defisit atau tergantung dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.

### 3.3.5.5. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Berikut adalah Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dan target kinerja tahun 2023-2026.

**Tabel 3. 35 Target Kinerja Indikator Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2021	2023	2024	2025	2026
Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	49.593,34	34.167	36.334	38.500	40.668

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

## 3.4 Informasi Sosial Budaya Yang Berkaitan Dengan Isu Kemiskinan Dan Isu-Isu Terkait Lainnya

### 3.4.1 Isu Strategis

#### 1. Potensi Umum

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat disetiap tahunnya pada bulan Mei dan Juni tahun 2022, karena pasca kelulusan baik ditingkat SMA atau SMK sederajat maupun Perguruan Tinggi dengan angka pengangguran terbuka mencapai 4,51%. Potensi lowongan pekerjaan secara umum cukup tersedia pada berbagai macam sektor antara lain sektor perdagangan, jasa, dan perkebunan. Lowongan pekerjaan tersebut memerlukan kompetensi serta kualifikasi tertentu sesuai dengan kekhususan pekerjaan, pencari kerja tahun 2022 mencapai 1.259 jiwa dan yang sudah mendapatkan penempatan kerja mencapai 760 jiwa.



Selain itu potensi lowongan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah kebawah juga banyak tersedia dalam hal ini contohnya tenaga pemanen pada perkebunan sawit yang memerlukan tenaga pemanen sebanyak kurang lebih 2.000 s/d 5.000 tenaga kerja setiap tahunnya.

## 2. Masalah Umum

Dalam dunia kerja kurangnya kompetensi dan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dalam memenuhi lowongan pekerjaan memerlukan kompetensi serta kualifikasi tertentu yang tersedia di pasar kerja baik kompetensi teknis maupun akademis. Adapun jenis pekerjaan permanen walaupun sangat terbuka tetapi kurang diminati masyarakat dimana pekerjaan tersebut mengandalkan kekuatan fisik dan tergolong jenis pekerjaan kasar walaupun penghasilan yang diterima besar. Sehingga untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja tersebut pihak perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari Provinsi lain melalui Disnakertrans dengan proses Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Selain kompetensi dan kualifikasi yang kurang dimiliki, kurang terserapnya pencari kerja pada pasar kerja yakni pencari kerja dari lulusan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, pencari kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dan di Kota Pangkalan Bun pada khususnya mayoritas hanya memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan.

### 3.4.2 Capaian dan Target Kinerja Tujuan Pembangunan Dalam Pengurangan Kemiskinan Masyarakat

Capaian dan Target Kinerja tujuan pembangunan dalam pengurangan kemiskinan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 36 Kinerja Awal dan Target Indikator Tujuan Pembangunan dalam Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Kotawaringin Barat**

Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2021	2023	2024	2025	2026
Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	-	100	100	100	100
persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	-	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	75	75	75
Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	870	73	75	80	85
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	10	10,5	11,15	11,15

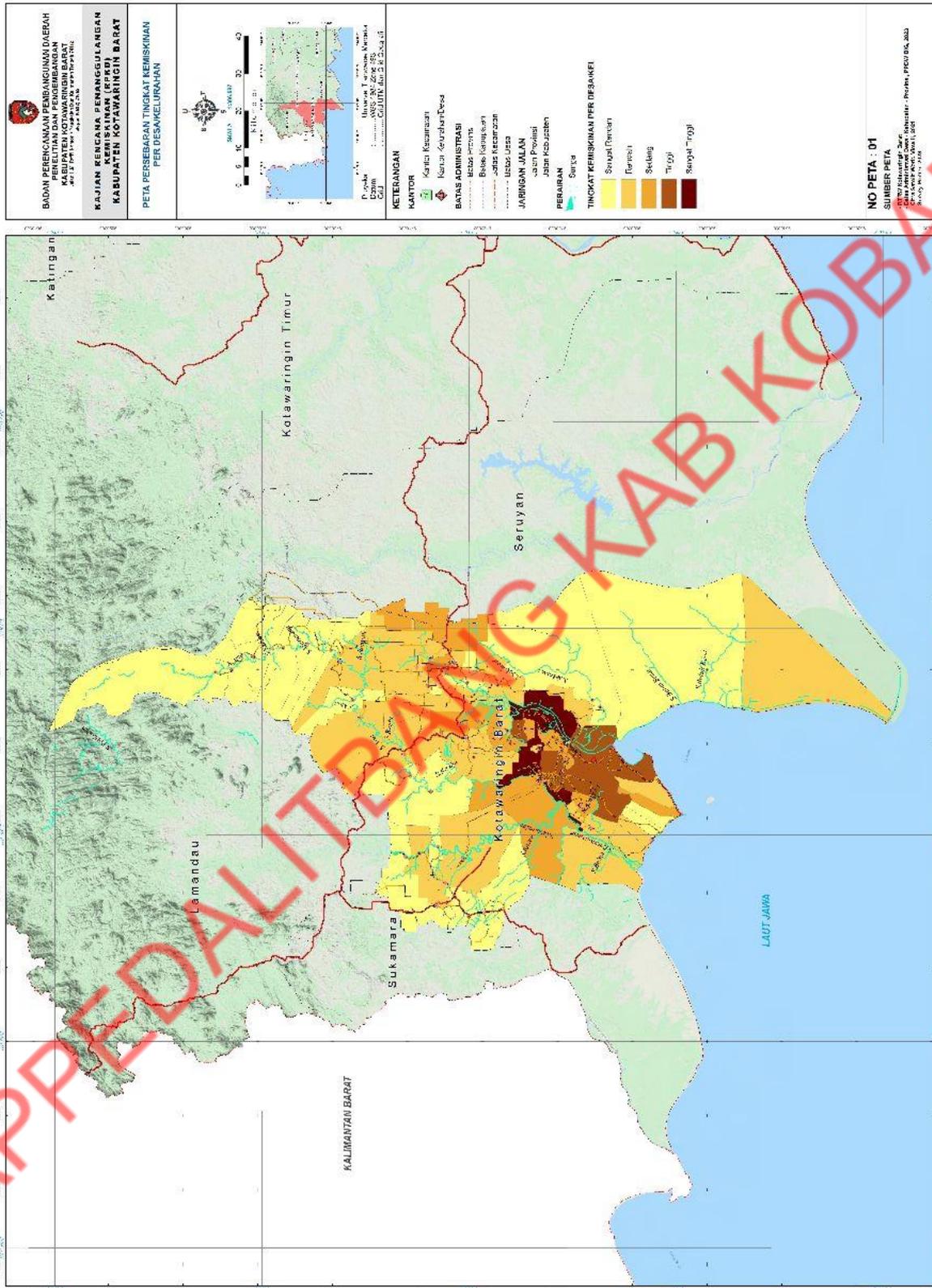


Indikator	Bidang Penanggung Jawab	Kinerja Awal RPJMD	Target RPD			
		2021	2023	2024	2025	2026
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0	4	7	12	17
Persentase Penurunan Pelanggaran Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Satpol PP	40	45	50	55	60
Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29,05	30	50	75	100
Persentase pemberdayaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	58	100	100	100	100
Persentase partisipasi Instansi Vertikal (Tim keamanan Daerah) dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan konflik Sosial di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	100	100	100

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

### 3.5 Persebaran Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut adalah peta persebaran kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data DTKS.



**Gambar 3. 34 Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat**





# BAB IV PRIORITAS PROGRAM

## 4.1 Hasil Analisa Determinan Kemiskinan *Theory of Change (Toc)* Logika Program

Kesadaran bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi didasarkan pada kesadaran bahwa masalah kemiskinan terkait dengan dimensi lain yang sangat kompleks dan tidak hanya terkait dengan kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat, tetapi juga mempengaruhi status sosial mereka secara umum. Oleh karena itu, dalam hal ini, rencana penanggulangan kemiskinan harus secara komprehensif mendefinisikan konsep pengertian kemiskinan dan ruang lingkup kebijakan untuk mengatasinya.

Dokumen RPKD diperlukan untuk menggambarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dalam rangka penyelesaian masalah daerah. Ketika berhadapan dengan strategi penanggulangan kemiskinan, pasti ada masalah yang harus diprioritaskan saat mengerjakannya. Kemiskinan menunjukkan ciri-ciri tertentu yang secara empiris menjadi ciri khas daerah dan karenanya menjadi tujuan nasional. Dalam hal ini, dokumen anti kemiskinan harus memastikan bahwa indikator tersebut menjadi prioritas aksi kebijakan daerah dan sinergi perencanaan antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

Selain *Theory of Change (ToC)*, yang sering digunakan oleh perencana pembangunan agar efektif dalam perencanaan program, teori perubahan ini juga memberikan panduan tentang bagaimana intervensi yang berbeda disusun dan dapat diimplementasikan secara konsisten. bahwa tujuan (tujuan) dapat dipecah dan memberikan hasil dan efek yang diinginkan. Teori perubahan dalam proses desain program ini memberi program keunggulan kompetitif dan lebih banyak peluang untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan menciptakan dan memberikan manfaat kepada penerima manfaat.

Teori perubahan menjelaskan proses perubahan dengan menggambarkan hubungan sebab akibat dari inisiatif, yaitu hasil jangka pendek, menengah dan panjang. Perubahan yang teridentifikasi dipetakan sebagai "jalur hasil", menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis satu sama lain dan dalam urutan kronologis. Hubungan antara hasil dijelaskan oleh "alasan" atau argumen mengapa satu hasil dianggap sebagai prasyarat untuk yang lain.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemajuan Penanggulangan Kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan adalah tindakan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan pemberdayaan



masyarakat. Penguatan program mikro, kecil dan lainnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin kesinambungan usaha mikro dan kecil;
4. kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
5. Sinergi kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

#### 4.1.1. ToC Bidang Pendidikan

Berikut ini penjelasan tentang bagaimana Program Kemiskinan berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pendidikan. Indikator pendidikan mencakup berbagai program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai, antara lain:

1. Program Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum, Penilaian kompetensi minimum ini berfokus pada pengukuran kompetensi terhadap standar global, standar yang tidak terkait dengan materi informasi tetapi dengan penalaran logis, baik dalam kaitannya dengan membaca, berhitung, dan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, siswa mengalami kemandirian belajar dan terhindar dari diskriminasi, bukan lagi soal penguasaan materi, tapi soal kemampuan mengolah informasi dan membenarkannya secara kritis.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, berhasilnya proses pembelajaran di sekolah penggunaan sarana dan prasarana pelatihan secara efektif dan efisien sedangkan agar proses pembelajaran berjalan lancar, infrastruktur harus dikelola secara optimal. Artinya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan dalam proses belajar mengajar Pendidikan. Fasilitas pelatihan meliputi semua peralatan, bahan dan furnitur digunakan langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Pada saat yang sama, infrastruktur pendidikan yang lengkap secara tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Secara keseluruhan beberapa program Pada Indikator Pendidikan kedepan dapat menjawab/ mengurangi beberapa permasalahan kemiskinan di bidang pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah yang mencapai 8,65 bahwa penduduk di Kotawaringin Barat rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hanya di jenjang SD dan SMP. Permasalahan indikator dan program pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan, tujuan dan hasil yang dicapai, digambarkan dalam Teori Perubahan berikut ini.



## Theory of Change Bidang Pendidikan



Gambar 4. 1 Theory of Change Bidang Pendidikan

Sumber: Tim Penyusun, 2023



#### 4.1.2. ToC Bidang Kesehatan

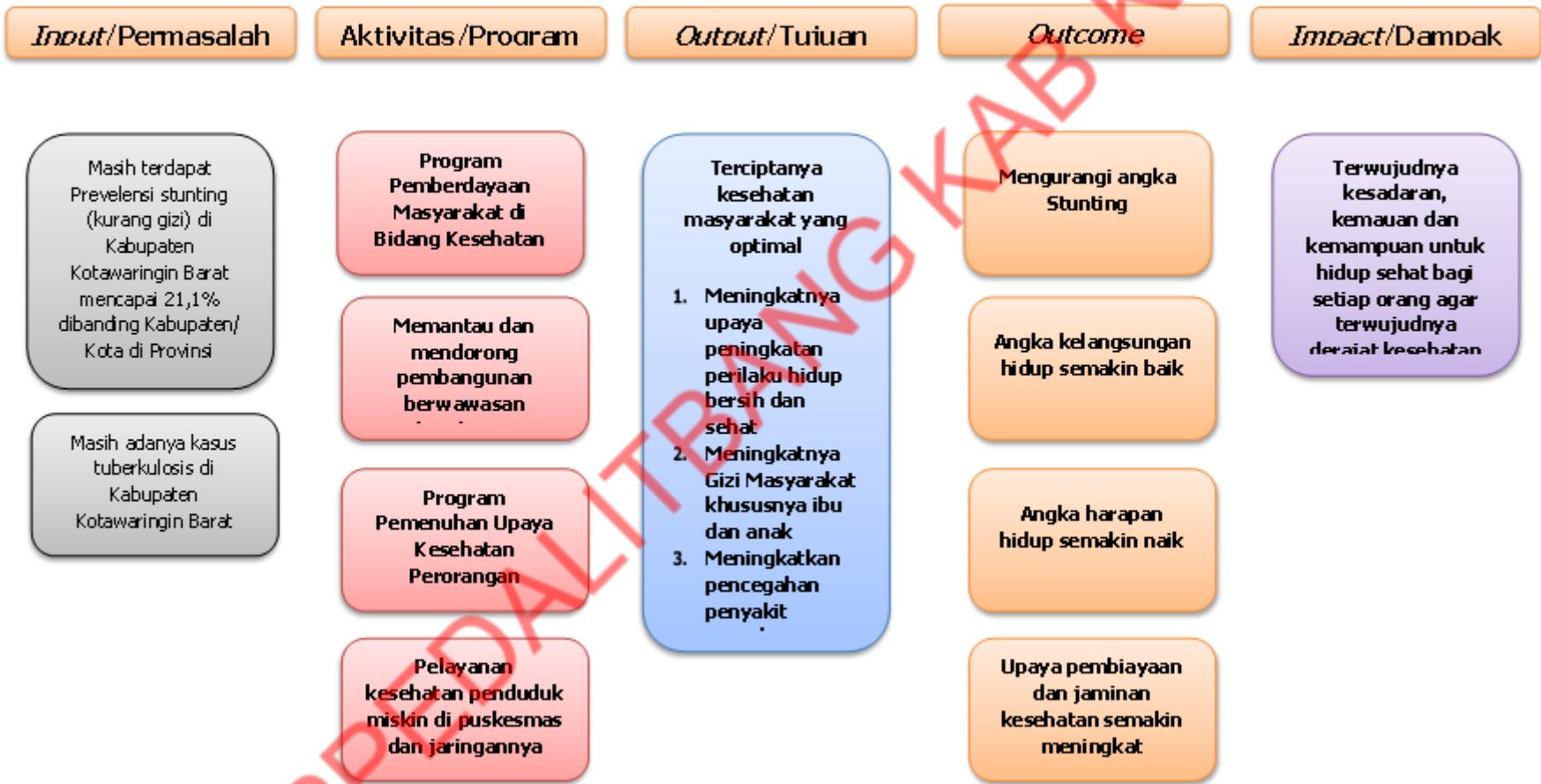
ToC Bidang kesehatan mengambil *input* dari data prevalensi *stunting* dan kasus *tuberculosis*. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana Program Kemiskinan berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator Kesehatan. Indikator kesehatan yang mencakup berbagai program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai, antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui program ini bertujuan untuk meningkatkan usia harapan hidup, yang akan berdampak pada hasil penurunan angka kematian anak, peningkatan kelangsungan hidup anak, penurunan jumlah anak kurang gizi di bawah usia 5 tahun, dan yang sama pentingnya untuk meningkatkan harapan hidup anak.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan meningkatkan usia harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperbaiki isu-isu terkait Jumlah anak balita kurang gizi menurun, usia harapan hidup meningkat, investasi asuransi keuangan dan kesehatan meningkat, sehingga dengan meningkatkan derajat kemandirian masyarakat dapat tercapai swasembada masyarakat pada tingkat dasar yang paling rendah. meningkatkan pemahaman dalam bidang kesehatan.
3. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan tertinggal untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, dan tujuan khusus dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Secara keseluruhan beberapa program Pada Indikator Kesehatan kedepan dapat menjawab/ mengurangi beberapa permasalahan yang meliputi masih adanya balita *stunting* (kurang gizi) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 21,1% dimana Kabupaten Kotawaringin Barat menempati posisi kesebelas di Provinsi Kalimantan Tengah; jumlah kasus *tuberculosis* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang mencapai 488 kasus; *Tuberculosis* pada anak usia 0-14 tahun mencapai 31 kasus; serta jumlah terduga *tuberculosis* yang mendapatkan pelayanan standar mencapai 2.598 pada tahun 2019. Berikut adalah permasalahan indikator dan program kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, tujuan dan hasil yang dicapai berdasarkan Teori Perubahan.



### Theory of Change Bidang Kesehatan



**Gambar 4. 2 Theory of Change Bidang Kesehatan**

Sumber: Tim Penyusun, 2023

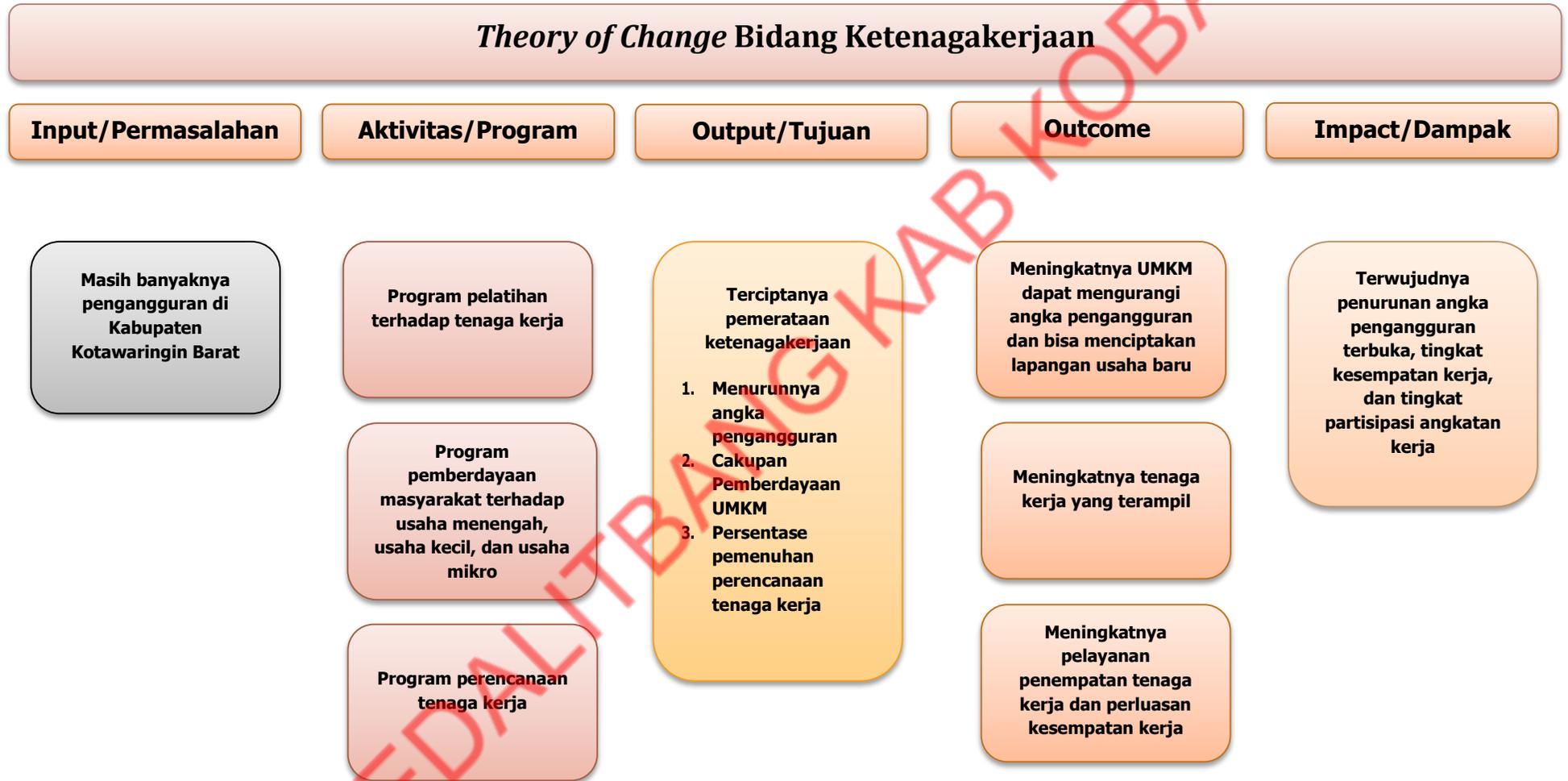
#### 4.1.3. ToC Bidang Ketenagakerjaan

ToC Bidang ketenagakerjaan mengambil *input* dari data angka pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana Program Kemiskinan berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan mencakup berbagai program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai, antara lain:

1. Program Pelatihan Terhadap Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan perubahan teknologi, mengurangi waktu belajar bagi tenaga kerja baru agar menjadi kompeten. Atas dasar tujuan tersebut dapat meningkatkan tenaga kerja terampil dan mandiri serta tenaga kerja yang mampu meleak teknologi.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja adalah untuk meningkatkan laju implementasi perencanaan tenaga kerja sehingga dapat mendorong tumbuhnya tenaga kerja yang berpengalaman dan mandiri serta penyediaan tenaga kerja yang mengikuti kemajuan teknologi.

Secara keseluruhan beberapa program Pada Indikator Ketenagakerjaan ke depan dapat menjawab/ mengurangi beberapa permasalahan baik berdasarkan tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan, angka pengangguran terbanyak adalah pada jenjang SD sebesar 46% atau sebanyak 3.439 jiwa; jenjang SMA sebesar 29% atau sebanyak 2.212 jiwa; jenjang SMP sebesar 15% atau sebanyak 1.101 jiwa; serta jenjang perguruan tinggi sebesar 10% atau sebanyak 783 jiwa. Jika ditotal, angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mencapai 7.535 jiwa.

Berikut adalah permasalahan indikator dan program Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, tujuan dan hasil yang dicapai sebagaimana digambarkan dalam Teori Perubahan.



**Gambar 4. 3 Theory of Change Bidang Ketenagakerjaan**

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### 4.1.4. ToC Bidang Infrastruktur Dasar

ToC Bidang Infrastruktur Dasar mengambil input dari data perumahan dan sarana prasarana. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana Program Kemiskinan berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator Infrastruktur Dasar. Indikator Infrastruktur Dasar mencakup berbagai program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai, antara lain:

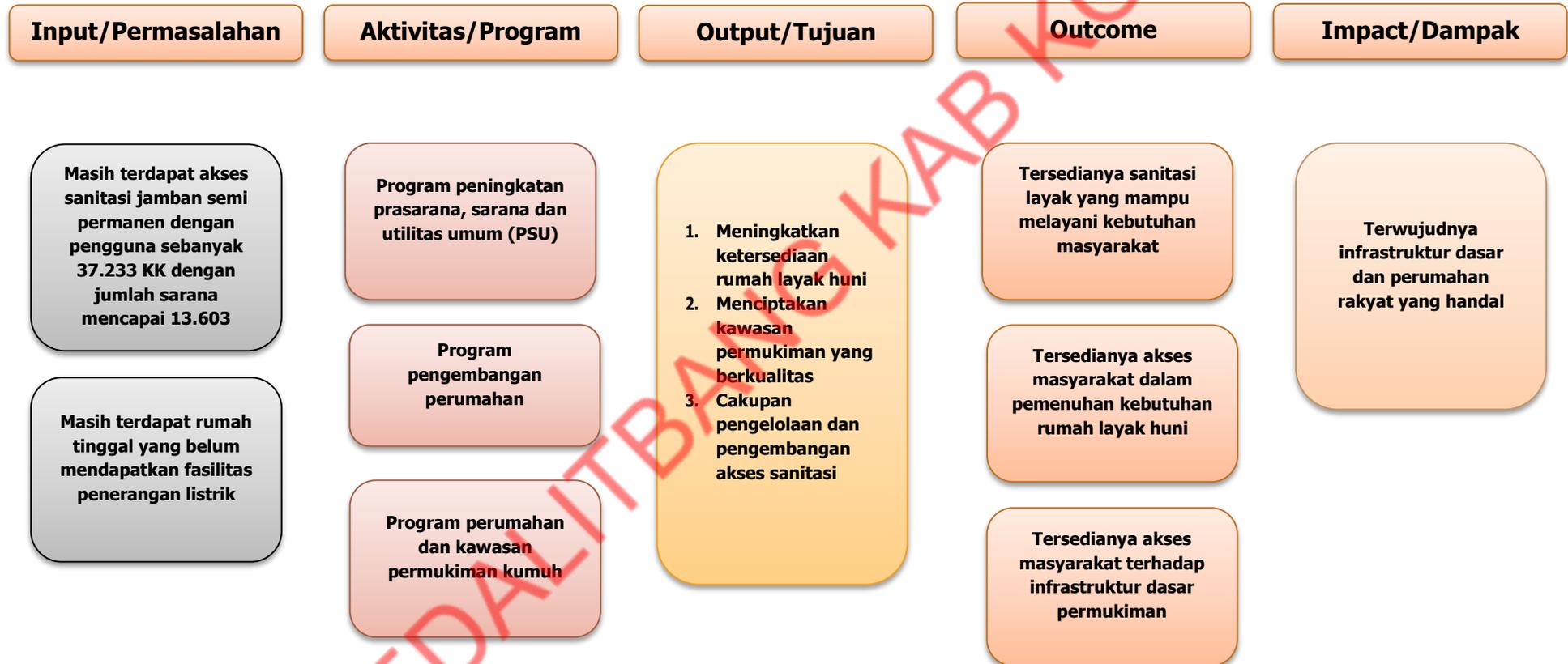
1. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Program pengembangan perumahan bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.
3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan umum ini melayani dua tujuan. Pertama, akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan di kawasan kumuh perkotaan harus ditingkatkan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan dengan mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan beberapa program pada Indikator Infrastruktur ke depan dapat menjawab/ mengurangi beberapa permasalahan akses sanitasi jamban semi permanen dengan pengguna sebanyak 37.233 KK dengan jumlah sarana mencapai 13.603, serta masih terdapatnya rumah tinggal yang belum mendapatkan fasilitas penerangan listrik serta air bersih yang layak.

Berikut adalah permasalahan indikator dan program Bidang Infrastruktur yang berkaitan dengan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman, tujuan dan hasil yang dicapai sebagaimana digambarkan dalam Teori Perubahan.



### Theory of Change Bidang Infrastruktur Dasar



**Gambar 4. 4 Theory of Change Bidang Infrastruktur Dasar**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



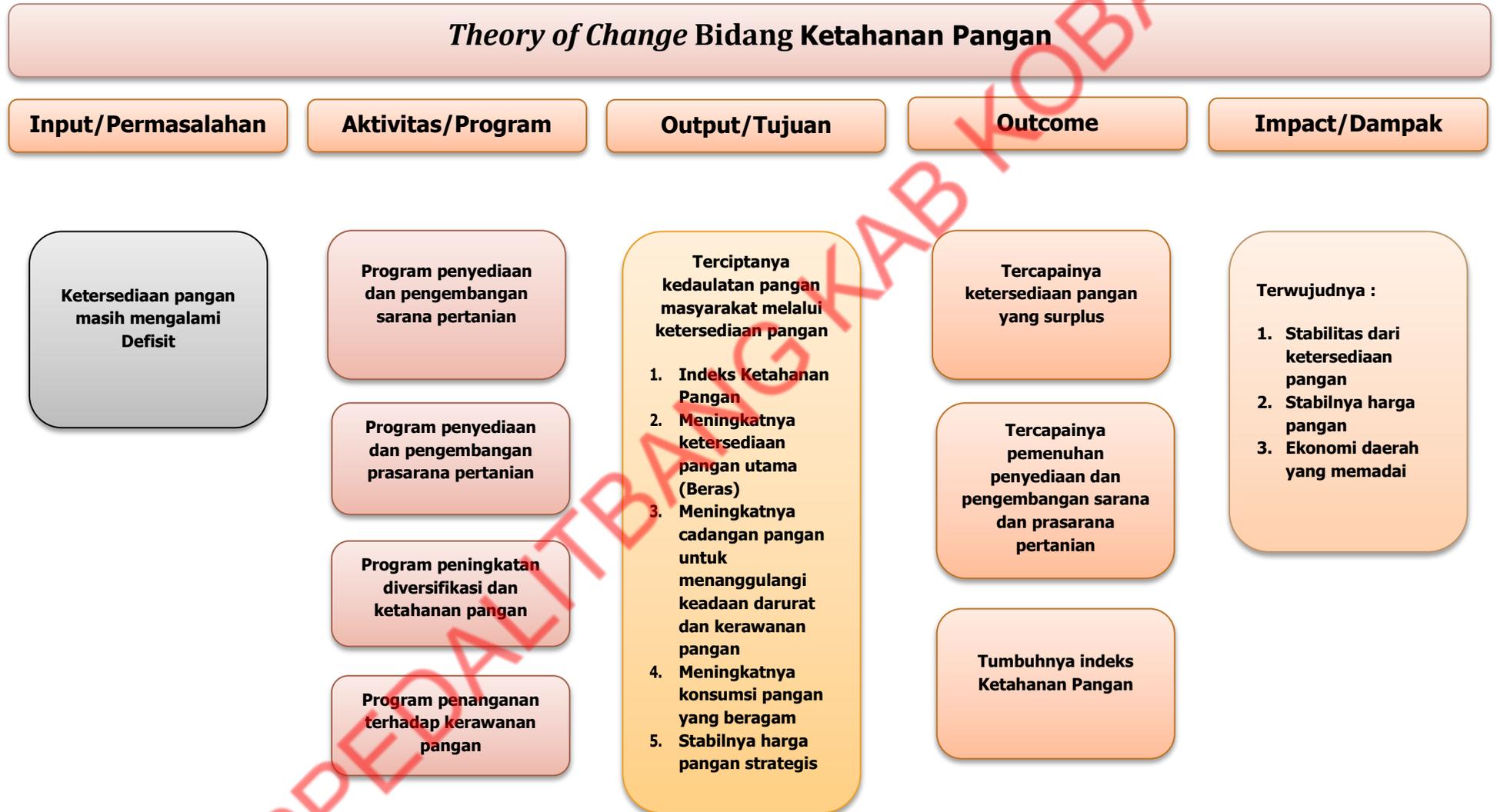
#### 4.1.5. ToC Bidang Ketahanan Pangan

ToC Bidang Ketahanan Pangan mengambil *input* dari kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana Program Kemiskinan berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator Ketahanan Pangan. Indikator Ketahanan Pangan mencakup berbagai program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai, antara lain:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi. Kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian.
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan memerlukan keragaman pangan karena produksi, distribusi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat tidak selalu lancar. Namun, bahan pangan lokal lebih mudah ditanam dan didapatkan karena kesesuaian lahan dan sosial budaya setempat.

Secara keseluruhan beberapa program pada Indikator Ketahanan Pangan ke depan dapat menjawab/ mengurangi beberapa permasalahan sistem ketersediaan pangan yang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih mengalami defisit serta ketergantungan dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.

Berikut adalah permasalahan indikator dan program Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan, tujuan dan hasil yang dicapai sebagaimana digambarkan dalam Teori Perubahan berikut ini.



**Gambar 4. 5 Theory of Change Bidang Ketahanan Pangan**

*Sumber: Tim Penyusun, 2023*



## 4.2 Komposisi APBD Berdasarkan Pendapatan dan Belanja

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### 4.2.1. Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya PAD hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian target penerimaannya.

Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2019 disebabkan COVID-19, pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Hingga pada tahun 2021, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mencapai 74,56%, Pendapatan Transfer mencapai 1,43%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah mencapai 0,54%.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4. 6 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah

**Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

No	Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.317.262.615.49 6,67</b>	<b>1.291.455.997.16 5,63</b>	<b>1.357.377.147.40 1,90</b>	<b>1.449.011.596.89 5,94</b>	<b>1.633.681.255.69 0,88</b>	<b>5,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>176.855.124.641, 39</b>	<b>179.785.920.666, 73</b>	<b>170.185.828.808, 34</b>	<b>224.651.929.841, 28</b>	<b>392.154.004.398, 55</b>	<b>25,72</b>
1.1.1	Pajak Daerah	48.280.750.268,53	61.675.813.242,39	51.527.738.156,10	64.838.822.752,80	70.390.166.393,05	11,42
1.1.2	Retribusi Daerah	12.424.399.638,00	11.425.818.845,25	13.532.547.717,00	13.208.556.926,00	12.591.474.840,30	0,83
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.110.575.146,38	9.017.096.032,00	8.941.166.757,00	9.804.364.851,00	12.470.117.812,00	11,79
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	108.039.399.588,48	97.667.192.547,09	96.184.376.178,24	136.800.185.311,48	296.702.245.353,20	37,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.128.023.655.97 0,28</b>	<b>1.076.005.505.27 6,19</b>	<b>1.149.743.873.84 9,22</b>	<b>1.186.742.690.87 1,07</b>	<b>1.203.708.747.72 6,33</b>	<b>1,72</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.059.123.948.08 8,00</b>	<b>996.938.787.717, 00</b>	<b>1.067.850.703.56 6,00</b>	<b>1.122.099.230.64 3,00</b>	<b>1.123.614.847.71 6,00</b>	<b>1,61</b>
1.2.1.1	Dana Perimbangan	938.379.875.488,00	913.940.904.918,00	961.791.162.166,00	958.924.263.043,00	1.038.859.842.934,00	2,67
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	56.433.629.483,00	91.442.582.698,00	96.734.933.706,00	64.383.434.319,00	135.229.818.254,00	36,10
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	670.997.942.000,00	602.446.484.000,00	593.260.006.000,00	-2,24
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	165.791.844.405,00	96.896.760.852,00	117.146.091.175,00	199.275.635.447,00	230.385.941.118,00	16,27
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik	63.247.488.600,00	72.694.648.368,00	76.912.195.285,00	92.818.709.277,00	79.984.077.562,00	6,90
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	54.627.555.000,00	17.750.000.000,00	28.430.307.000,00	81.761.160.000,00	-	20,06
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.5	Dana Desa	66.116.517.600,00	65.247.882.799,00	77.629.234.400,00	81.413.807.600,00	84.755.004.782,00	6,66



# RKPD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Tahun 2023 - 2028



No	Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1.2. 2</b>	<b>Transfer Antar- Daerah</b>	<b>68.899.707.882,2 8</b>	<b>79.066.717.559,1 9</b>	<b>81.893.170.283,2 2</b>	<b>64.643.460.228,0 7</b>	<b>80.093.900.010,3 3</b>	<b>5,29</b>
1.2.2 .1	Pendapatan Bagi Hasil	68.899.707.882,28	78.916.717.559,19	81.343.170.283,22	64.243.460.228,07	80.093.900.010,33	5,32
1.2.2 .2	Bantuan Keuangan	-	150.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00	-	34,85
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>12.383.834.885,0 0</b>	<b>35.664.571.222,7 1</b>	<b>37.447.444.744,3 4</b>	<b>37.616.976.183,5 9</b>	<b>37.818.503.566,0 0</b>	<b>48,50</b>
1.3.1	Hibah	3.588.000.000,00	32.623.510.509,71	37.062.444.744,34	37.161.976.183,59	-	180,78
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.795.834.885,00	3.041.060.713,00	385.000.000,00	455.000.000,00	37.818.503.566,00	2019,29
	<b>APBD</b>	<b>1.401.173.478.00 0,00</b>	<b>1.389.920.270.00 0,00</b>	<b>1.519.378.625.00 0,00</b>	<b>1.523.865.357.10 0,00</b>	<b>1.764.212.606.11 7</b>	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah



#### 4.2.2. Belanja Daerah

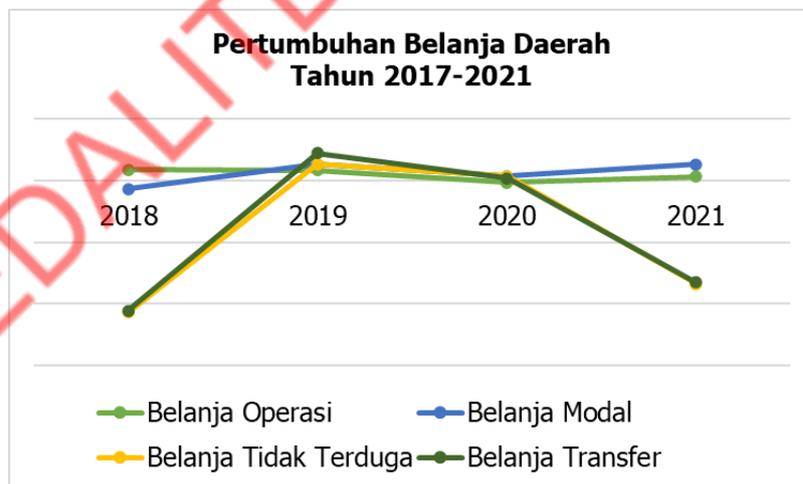
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan pemerintah daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis, terukur dan akuntabel.

Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 mengalami penurunan pada Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021. Pada tahun 2018-2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki Belanja Tidak Terduga, namun Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 berjumlah cukup besar yaitu Rp. 49.260.669.634,36 dan nilai tersebut menurun pada tahun 2021.

Sedangkan, Belanja Operasi dan Belanja Modal tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2021, Belanja Operasi mengalami pertumbuhan sebesar 3,23% dan Belanja Modal mencapai 9,70%.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4. 7 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah

**Tabel 4. 2 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

No	Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.291.381.204.190,40</b>	<b>1.295.469.781.234,21</b>	<b>1.391.688.791.559,60</b>	<b>1.442.474.017.840,80</b>	<b>1.461.280.702.974,41</b>	<b>3,17</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>742.935.447.938,85</b>	<b>807.645.989.969,09</b>	<b>873.780.401.338,31</b>	<b>858.901.457.730,67</b>	<b>886.634.423.067,83</b>	<b>4,61</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	408.008.063.696,00	441.908.290.150,00	482.596.403.755,50	441.025.705.448,00	533.721.133.775,48	7,48
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	293.672.315.117,18	330.018.703.992,41	381.938.443.234,81	407.431.358.282,67	330.994.850.988,23	4,01
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0	280.000.007,00	0	847.000.000,00	-25,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	39.737.819.125,67	34.088.745.826,68	7.804.054.341,00	7.351.394.000,00	19.304.510.304,12	16,37
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.517.250.000,00	1.630.250.000,00	1.161.500.000,00	3.093.000.000,00	1.766.928.000,00	25,53
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>403.321.116.578,55</b>	<b>340.758.782.140,12</b>	<b>357.837.690.237,29</b>	<b>377.005.194.475,77</b>	<b>413.570.579.868,58</b>	<b>1,14</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.063.151.640,00	358.789.800,00	346.517.905,00	415.506.760,00	100.900.000,00	-38,33
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.336.011.210,33	47.845.154.459,20	54.893.662.839,22	97.622.948.332,00	69.660.897.964,00	24,83
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.161.478.203,00	94.378.659.526,67	132.223.414.395,24	143.482.401.078,77	171.955.314.980,00	10,97
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	221.638.923.783,22	189.391.047.684,25	154.912.088.124,43	125.882.549.773,00	167.205.556.475,58	-4,67
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	6.277.361.042,00	5.759.877.730,00	10.951.107.223,40	4.759.374.090,00	4.647.910.449,00	5,75
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	8.844.190.700,00	3.025.252.940,00	4.510.899.750,00	4.842.414.442,00	0	-27,33
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.285.515,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.260.669.634,36</b>	<b>1.547.938.856,00</b>	<b>-49,21</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>145.116.354.158,00</b>	<b>147.065.009.125,00</b>	<b>160.070.699.984,00</b>	<b>157.306.696.000,00</b>	<b>159.527.761.182,00</b>	<b>2,47</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	6.859.967.500,00	8.174.154.300,00	6.423.330.300,00	7.740.424.700,00	7.632.280.400,00	4,21
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	138.256.386.658,00	138.890.854.825,00	153.647.369.684,00	149.566.271.300,00	151.895.480.782,00	2,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah



### 4.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran, transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran, maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 dan kenaikan yang signifikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 36,69% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencapai 811,11%. Nilai pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan cukup besar dikarenakan adanya Pengeluaran Pembiayaan yang meningkat tajam dari Rp 4.500.000.000,00 (tahun 2020) ke Rp. 41.000.000.000,00 (tahun 2021). Hal tersebut yang menyebabkan nilai pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah meningkat sangat tajam.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4. 8 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah*



**Tabel 4. 3 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>						
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>99.733.036.753,92</b>	<b>135.768.255.080,19</b>	<b>120.826.890.811,61</b>	<b>95.493.771.371,23</b>	<b>130.531.350.426,37</b>	<b>10,21</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	99.639.086.753,92	115.614.255.080,19	120.684.471.011,61	59.479.771.371,23	97.531.350.426,37	8,42
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
3.1.3	Hasil Penuaian Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	20.000.000.000,00	0	36.000.000.000,00	33.000.000.000,00	-27,08
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	93.950.000,00	154.000.000,00	142.419.800,00	14.000.000,00	0	-33,44
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.992.000.000,00</b>	<b>11.070.000.000,00</b>	<b>27.000.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>41.000.000.000,00</b>	<b>220,62</b>
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	20.000.000.000,00	0	36.000.000.000,00	-25,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	9.992.000.000,00	11.070.000.000,00	7.000.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-12,65
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah



**Tabel 4. 4 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2022**

N o	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2022)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	294.218.002	294.218.002	0,02%
2	Dinas Kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	22.694.504.000	23.301.502.100	1,60%
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat	606.998.100		0,04%
3	Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.556.580.000	4.871.580.000	0,32%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	315.000.000		0,02%
4	Dinas Perkim	Program Kawasan Permukiman	6.000.000.000	6.000.000.000	0,42%
5	Dinas Sosial	Program Uep Kube	380.000.000	651.555.000	0,03%
		Program Uep Karang Taruna	271.555.000		0,02%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	681.769.754	2.060.175.554	0,05%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	795.364.400		0,06%
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	35.851.800		0,00%
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	531.454.600		0,04%
		Program Pengembangan	15.735.000		0,00%



N o	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaat an untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2022)
		Kawasan Transmigrasi			
7	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan/ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	19.932.300	39.912.090	0,00%
		Program Pengelolaan Persampahan/Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	19.979.790		0,00%
8	Dinas PMD	Program Administrasi Pemerintahan Desa	45.823.700	1.005.937.548	0,00%
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.896.200		0,01%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	889.217.648		0,06%
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.002.285.776	7.699.549.288	0,28%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.547.929.470		0,18%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	498.345.240		0,04%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000		0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	620.988.802		0,04%
10	Dinas TPHP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.984.177.391	3.933.831.373	0,14%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.616.003.982		0,11%



No	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2022)
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	333.650.000		0,02%
11	RSUD Sultan Imanuddin	Kemitraan Pengobatan Pasien Kurang Mampu Rawat Inap Dan Obat-Obatan Kelas III	1.402.543.502	1.402.543.502	0,10%
		<b>Jumlah</b>	<b>51.260.804.457</b>		<b>3,62%</b>

Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisa

Sumber Pembiayaan pada umumnya terkait dengan skema pendanaan dimana skema pendanaan ini yang membagi setiap aspek yang didanai berdasarkan kewenangan dalam pembangunan. Pendanaan atau pembiayaan berdasarkan kewenangan yaitu pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten (APBD Provinsi atau Kabupaten). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

**Tabel 4.5 Skema Pembiayaan dan Jenis Pengembangan**

No.	Skema Pembiayaan	Jenis Pengembangan
1	APBD	Jalan kabupaten, Sekolah, Kantor Pemerintahan Kecamatan dan Desa, Pasar, Terminal, Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier, Sistem Air Minum
2	APBN dan APBD Provinsi	IPLT, IPAL Terpadu, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder, Sekolah
3	APBDes	Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi Irigasi Tersier, Pariwisata Berbasis Masyarakat
4	Swasta	Rumah Sakit, IPAL, Pusat Perbelanjaan
5	KPBU	PJU, IPAL, Sistem Air Bersih, Pasar

Sumber: Tim Penyusun, 2023

## 4.3 Sumber Pendapatan Daerah

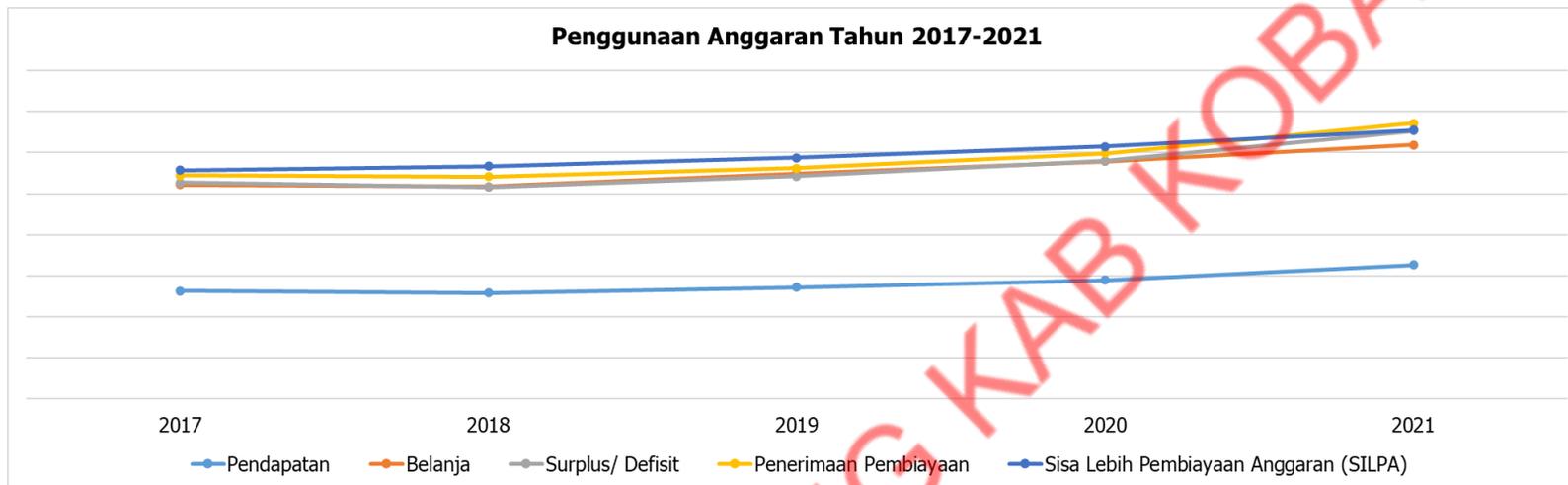
### 4.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisa terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.



Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Meskipun terdapat defisit anggaran pada tahun 2018-2019, SILPA Daerah tetap bernilai positif. Namun, pada tahun 2021, SILPA Daerah bernilai negatif yaitu Rp. -82.869.202.290,10.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



**Gambar 4. 9 Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2021**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah

**Tabel 4. 6 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pendapatan</b>	1.317.262.615.496,67	1.291.455.997.165,63	1.357.377.147.401,90	1.449.011.596.895,94	1.633.681.255.690,88
<b>Belanja</b>	1.291.381.204.190,40	1.295.469.781.234,21	1.391.688.791.559,60	1.442.474.017.840,80	1.461.280.702.974,41
<b>Surplus/ Defisit</b>	25.881.411.306,27	-4.013.784.068,58	-34.311.644.157,70	6.537.579.055,14	172.400.552.716,47
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	89.741.036.753,92	124.698.255.080,19	93.826.890.811,61	90.993.771.371,23	89.531.350.426,37
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	63.859.625.447,65	128.712.039.148,77	128.138.534.969,31	84.456.192.316,09	-82.869.202.290,10

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022, diolah

#### 4.3.2. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Ruang Fiskal

Dalam kelangsungan kegiatan pemerintahan tentunya faktor pembiayaan menjadi salah satu elemen penting yang menjamin kelangsungan pemerintahan maupun aktivitas pembangunan di suatu daerah. Selain pendanaan untuk kegiatan, pembiayaan termasuk didalamnya sebagai upah bagi para pekerja, pengadaan barang sebagai penunjang.

##### A. DOF Derajat Ekonomi Fiskal

Dalam proyeksi kebutuhan pembiayaan analisa yang digunakan adalah analisa DOF (Derajat Ekonomi Fiskal). Analisa ini digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

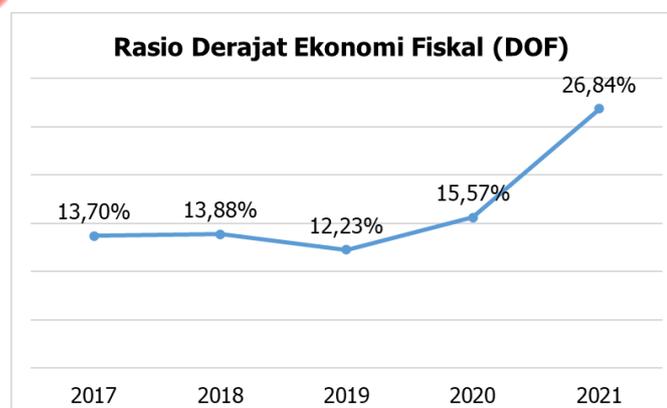
$$\text{Rumus DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 4. 7 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal**

DOF	Penilaian
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri, 1991

Berdasarkan rumus DOF, berikut adalah nilai DOF Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.



**Gambar 4. 10 Rasio Derajat Ekonomi Fiskal (DOF)**

Sumber: Tim Penyusun, 2023

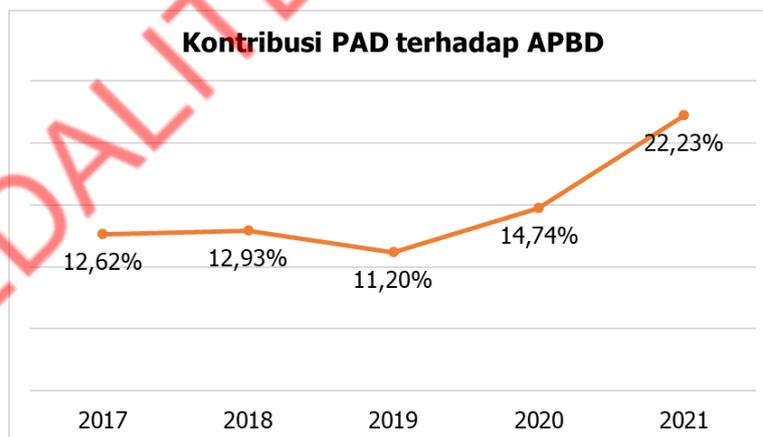
Rasio DOF Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021, yaitu 26,84%. Namun, nilai DOF Kabupaten Kotawaringin Barat belum mencapai angka lebih dari 50%. Hal itu berarti, kecenderungan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat **masih sangat rendah**. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah dari PAD belum mampu membiayai kebutuhan belanja daerah. Pada Tahun 2021 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya memberikan kontribusi sebesar 24% terhadap total pendapatan daerah dan memberikan kontribusi sebesar 26,84% pada total belanja daerah.

### B. Kontribusi PAD terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari potensi ekonomi daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD.

$$\text{Rumus Kontribusi PAD} = \frac{PAD}{APBD}$$

Berikut adalah Kriteria Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.



**Gambar 4. 11 Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: Tim Penyusun, 2023*

Peranan PAD yang masih sangat kecil dan masih perlu mengoptimalkan lagi penggalian potensi-potensi daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD. Pada Tahun 2021 jumlah PAD cukup meningkat, dimana PAD memberikan

kontribusi sebesar 22,23% terhadap total APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana angka tersebut dinilai **Sedang**.

### C. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Penilaian rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 8 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

*Sumber: Litbang Depdagri, 1991*

Berdasarkan pendekatan dan kriteria tersebut, berikut adalah hasil analisa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.



**Gambar 4. 12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

*Sumber: Tim Penyusun, 2023*

**Tabel 4. 9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Kemandirian	15,68%	16,71%	14,80%	18,93%	32,58%
Kemampuan Keuangan	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah
Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Konsultatif

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### D. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat desentralisasi fiskal adalah salah satu analisa untuk menghitung kemampuan Fiskal daerah. dihitung dengan pendekatan:

- Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD);
- Perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD);
- Perbandingan antara Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).

Kriteria penilaian DDF meliputi:

- Rasio PAD/TPD kurang dari 50% berarti kemampuan keuangan daerah belum mandiri;
- Rasio BHPBP/TBD kurang dari 50% berarti kemampuan keuangan daerah belum mandiri;
- Rasio SBD/TPD nilainya kurang dari 50% berarti ketergantungan finansial pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Berdasarkan pendekatan dan kriteria tersebut, berikut adalah nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021.

**Tabel 4. 10 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan PAD/ TPD**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</b>	13,43 %	13,92 %	12,54 %	15,50 %	24,00 %
<b>Kriteria</b>	Belum Mandiri				

Sumber: Tim Penyusun, 2023

**Tabel 4. 11 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan BHPBP/ TPD**

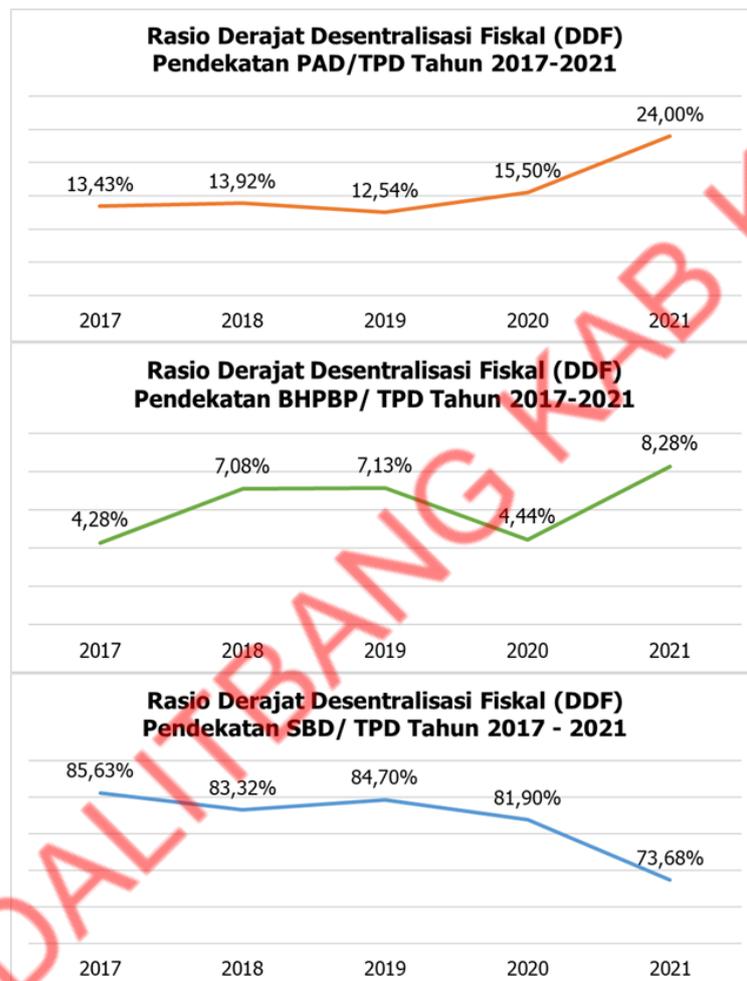
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</b>	4,28%	7,08%	7,13%	4,44%	8,28%
<b>Kriteria</b>	Belum Mandiri				

Sumber: Tim Penyusun, 2023

**Tabel 4. 12 Desentralisasi Fiskal (DDF) Pendekatan SBD/ TPD**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</b>	85,63%	83,32%	84,70%	81,90%	73,68%
<b>Kriteria</b>	Ketergantungan Finansial Terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi.				

Sumber: Tim Penyusun, 2023



**Gambar 4. 13 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021**

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa Rasio PAD/TPD Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 kurang dari 50%, hal tersebut berarti kemampuan keuangan daerah Kotawaringin Barat belum mandiri. Rasio PAD/TPD mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 24%. Rasio BHPBP/TBD Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 kurang dari 50%, hal itu berarti kemampuan keuangan daerah Kotawaringin Barat belum mandiri. Rasio BHPBP/TPD mengalami peningkatan pada tahun 2021, yaitu 8,28%. Rasio SBD/TPD

Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 lebih dari 50% berarti ketergantungan finansial pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Namun, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 73,86%.

#### **4.3.3. Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah**

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat proporsi belanja operasional, belanja modal maupun belanja tidak terduga yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada tiap bidang. Evaluasi anggaran belanja pertama kali dilakukan dengan melihat komposisi belanja operasional, belanja modal maupun belanja tidak terduga beserta masing-masing komponennya, dalam analisa antar waktu dengan melihat perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa (nominal dan proporsi) dan untuk apa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bansos, dan belanja bantuan keuangan. Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu.

Berikut adalah matriks relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang memuat tentang persentase pemanfaatan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 4. 13 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2021**

No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.355.480	114.808.000	3.884.361.900	306.982.409.000	0,076%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.585.656.740	0			1,168%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	64.349.680	15.155.742			0,021%
2	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin	1.748.619.223	1.191.403.597	28.836.306.450	354.712.268.000	0,493%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	638.488.570	523.064.600			0,180%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.292.230.650	1.113.928.314			0,364%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	120.446.950	78.234.000			0,034%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.582.900	151.062.900			0,049%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	212.729.950	177.932.750			0,060%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.494.000	9.540.000			0,003%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	132.970.000	113.087.000			0,037%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	90.284.000	70.708.000			0,025%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	39.914.875	36.080.000			0,011%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	160.805.000	101.367.000			0,045%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	76.100.000	58.459.000			0,021%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.603.730	165.474.323			0,057%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	726.212.000	687.339.750			0,205%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	68.844.000	48.885.000			0,019%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.100.917.500	893.248.150			0,310%
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.664.049.484	16.359.830.639			5,826%
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	332.516.768	279.469.386			0,094%
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	46.496.850	34.663.850			0,013%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.000.000.000	242.615.882			0,282%
3	Dinas PUPR	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.977.591.000	4.949.935.300	16.681.930.550	182.284.559.000	2,731%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	198.577.000	198.427.000			0,109%
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.767.274.300	3.756.681.300			2,067%
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	7.238.488.250	7.184.598.323			3,971%
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	500.000.000	495.591.480			0,274%
4	Dinas Perkim	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	303.803.700	302.696.000	5.872.592.112	10.471.939.100	2,901%
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.392.488.300	1.381.406.436			13,297%
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.176.300.112	4.216.072.600			39,881%
5	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	27.699.830	27.140.300	810.084.830	8.149.856.000	0,340%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	16.320.000	14.745.000			0,200%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	119.305.350	89.490.300			1,464%
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	237.959.300	206.098.000			2,920%
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	31.539.850	31.474.850			0,387%
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	190.189.650	143.086.269			2,334%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	187.070.850	179.023.995			2,295%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	412.231.999	493.862.540	518.877.899	7.628.200.000	5,404%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	83.847.500	82.170.000			1,099%
		Perluasan Kesempatan Kerja	22.798.400	311.232.109			0,299%
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	22.247.110	21.917.110			0,259%
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	19.637.350	17.996.372			0,228%
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	23.369.670	23.300.000	1.949.726.580	8.598.449.000	0,272%
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	28.876.680	27.476.680			0,336%
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	96.310.240	94.811.871			1,120%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.007.584	26.988.684			0,314%
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	131.155.346	119.492.687			1,525%
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.261.717.000	1.252.525.000			14,674%
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35.505.600	35.124.036			0,413%
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	208.200.000	201.500.000			2,421%
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	95.700.000	91.850.000			1,113%
8	Dinas Ketahanan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	34.980.000	32.118.000			0,700%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	620.988.802	614.413.707	655.968.802	4.997.209.000	12,427%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	72.312.493	70.951.493	19.718.329.539	17.436.255.000	0,415%
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	9.512.514.122	9.460.621.701			54,556%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana 37 Unit 37 Unit 100,00 25 Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	9.512.514.122	9.460.621.701			54,556%
10	Dinas PMD	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	24.799.200	24.497.050	1.199.541.160	7.644.305.000	0,324%
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	29.041.142	27.478.900			0,380%
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	32.635.050	31.798.200			0,427%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	616.734.334	599.404.601			8,068%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14.200.000	13.975.000			0,186%
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	65.752.150	64.339.013			0,860%
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	416.379.284	400.994.688			5,447%
11	Dinas PerindagkopUKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	160.456.962	114.048.48	9.736.419.189	15.451.879.000	1,038%
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	123.831.597	69.922.125			0,801%
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.757.600.042	5.667.645.468			37,261%
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	16.620.000	16.466.349			0,108%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	808.880.000	804.224.100			5,235%
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	982.700.925	971.331.863			6,360%
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	53.232.558	52.234.016			0,345%
		Pelaksana Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.197.600	39.636.916			0,260%
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	1.332.759.405	1.321.974.132			8,625%
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	138.500.100	116.738.55			0,896%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	312.430.000	264.000.000			2,022%
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka	9.210.000	8.072.000			0,060%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Kemandirian Satuan Pemukiman					
12	Dinas Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	180.973.600	179.102.340	254.681.200	7.210.575.000	2,510%
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	73.707.600	72.084.468			1,022%
13	Dinas Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	166.923.700	161.098.006	6.091.062.394	34.198.842.000	0,488%
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.324.179.150	1.296.404.705			3,872%
		Pengembangan Prasarana Pertanian	71.011.200	68.352.07			0,208%
		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.340.930.414	1.292.762.500			3,921%
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	310.206.497	310.206.497			0,907%
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	238.225.053	231.212.883			0,697%
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	246.958.390	246.958.390			0,722%
		Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	153.998.000	153.603.000			0,450%



No	OPD Pengampu	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Total	Jumlah Total Pagu Indikatif OPD	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan
		Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	44.305.140	44.288.000			0,130%
		Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	162.591.000	160.718.900			0,475%
		Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	2.031.733.850	1.997.786.700			5,941%

Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2023, diolah

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT



Dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, pada tahun 2021 dilakukan koordinasi antar OPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PUPR
4. Dinas Perkim
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas PMD
11. Dinas PerindagkopUKM
12. Dinas Pariwisata
13. Dinas Pertanian

Program/ kegiatan pada matriks tersebut merupakan program/ kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari APBD dengan total sebesar Rp. 95.588.893.803 atau sebesar 9,96% dari pagu anggaran. Selain dari APBD, juga terdapat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dengan sumber pendanaan dari APBN.

Sedangkan untuk tahun 2022 telah dilakukan beberapa program yang ditampilkan pada matriks berikut ini.

**Tabel 4. 14 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2022**

No	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2022)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	294.218.002	294.218.002	0,02%
2	Dinas Kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	22.694.504.000	23.301.502.100	1,60%
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat	606.998.100		0,04%
3	Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.556.580.000	4.871.580.000	0,32%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	315.000.000		0,02%
4	Dinas Perkim	Program Kawasan Permukiman	6.000.000.000	6.000.000.000	0,42%
5	Dinas Sosial	Program Uep Kube	380.000.000	651.555.000	0,03%
		Program Uep Karang Taruna	271.555.000		0,02%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	681.769.754	2.060.175.554	0,05%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	795.364.400		0,06%
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	35.851.800		0,00%
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	531.454.600		0,04%
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15.735.000		0,00%
7	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan/ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	19.932.300	39.912.090	0,00%
		Program Pengelolaan Persampahan/Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	19.979.790		0,00%
8	Dinas PMD	Program Administrasi Pemerintahan Desa	45.823.700	1.005.937.548	0,00%



No	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2022)
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.896.200		0,01%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	889.217.648		0,06%
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.002.285.776	7.699.549.288	0,28%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.547.929.470		0,18%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	498.345.240		0,04%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000		0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	620.988.802		0,04%
10	Dinas TPHP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.984.177.391	3.933.831.373	0,14%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.616.003.982		0,11%
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	333.650.000		0,02%
11	RSUD Sultan Imanuddin	Kemitraan Pengobatan Pasien Kurang Mampu Rawat Inap Dan Obat-Obatan Kelas III	1.402.543.502	1.402.543.502	0,10%
		<b>Jumlah</b>	<b>51.260.804.457</b>		<b>3,62%</b>

Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisa



Dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, pada tahun 2022 dilakukan koordinasi antar OPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan OPD berikut ini:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PUPR
4. Dinas Perkim
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas PMD
9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
10. Dinas TPHP
11. RSUD Sultan Imanuddin

Program-program yang termasuk dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2022 tersebut merupakan program-program yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari APBD dengan total sebesar Rp. 51.260.804.457 per bulan September Tahun 2022 atau sebesar 3,62% dari APBD Tahun 2022. Selain dari APBD, juga terdapat program-program yang dilaksanakan oleh daerah dengan sumber pendanaan dari APBN seperti Program PKH, BPNT, Bantuan Sosial Pekerja Jasa Angkutan yang diampu oleh Dinas Sosial. Kemudian juga terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk tahun 2023 juga telah dilakukan beberapa program yang ditampilkan pada matriks berikut ini.



**Tabel 4. 15 Relevansi dan Efektivitas APBD terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah Tahun 2023**

No	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2023)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	503.000.000	503.000.000	0,032%
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.737.625.000	23.737.625.000	1,522%
3	Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	556.000.000	1.760.000.000	0,036%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.204.000.000		0,077%
4	Dinas Perkim	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.400.000.000	1.750.000.000	0,090%
		Program Kawasan Permukiman	350.000.000		0,022%
5	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	228.141.490	595.218.950	0,015%
		Program Pemberdayaan Sosial	345.000.000		0,022%
		Program Rehabilitasi Sosial	22.077.460		0,001%
6	Dinas TPHP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.940.723.162	14.168.490.109	0,317%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.977.766.947		0,576%
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000		0,016%
7	Dinas PMD	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.999.960	3.240.937.720	0,002%
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.999.500		0,004%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3.155.938.260		0,202%
8	Dinas PerindagkopUKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	75.539.106	832.019.630	0,005%



# RKPD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Tahun 2023 - 2028



No	OPD Pengampu	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Total	Pemanfaatan untuk Program Kemiskinan (persentase terhadap APBD 2023)
		Program Pengembangan Umkm	185.865.524		0,012%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	570.615.000		0,037%
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.006.251.419	3.910.972.331	0,129%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.531.655.905		0,098%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	373.065.007		0,024%
		<b>Jumlah</b>	<b>50.498.263.740</b>		<b>3,238%</b>

Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisa

BAPPEDALITBANG KABKOTAWARINGIN



Dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, pada tahun 2022 dilakukan koordinasi antar OPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan OPD berikut ini:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PUPR
4. Dinas Perkim
5. Dinas Sosial
6. Dinas TPHP
7. Dinas PMD
8. Dinas PerindagkopUKM
9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Program-program yang termasuk dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2022 tersebut merupakan program-program yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari APBD dengan total sebesar Rp. 50.498.263.740 atau sebesar 3,238% dari APBD Tahun 2023. Selain dari APBD, juga terdapat program-program yang dilaksanakan oleh daerah dengan sumber pendanaan dari APBN.

Jika dilihat dari data tahun 2021-2023, dapat diketahui bahwa anggaran untuk penanggulangan kemiskinan semakin berkurang. Hal tersebut menandakan bahwa angka kemiskinan yang ditangani di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2021-2023 semakin menurun. Sehingga, harapannya angka tersebut akan terus menurun pada 5 (lima) tahun berikutnya yang merupakan jangka waktu pelaksanaan RPKD ini.



## **BAB V LOKASI PRIORITAS**

### **5.1 Lokasi Prioritas Berdasarkan *Theory Of Change***

Teori perubahan adalah model yang bertujuan untuk menguji bagaimana sebuah inisiatif - seperti kebijakan, strategi, program atau proyek - mempengaruhi hasil yang diinginkan melalui rantai hasil primer dan menengah. Teori perubahan membantu menavigasi kompleksitas perubahan sosial.

Teori perubahan menjelaskan bagaimana urutan peristiwa yang terkait secara logis, atau jalur perubahan, harus mengarah pada hasil akhir. analisa ini dilakukan melalui asumsi dan keyakinan serta hipotesis yang mendasari tentang bagaimana perubahan jangka pendek, menengah dan panjang terjadi dalam suatu rencana. dan mendefinisikan bagaimana hasil kondisi awal dan menengah dari perubahan jangka panjang dibuat dan didokumentasikan oleh indikator yang menunjukkan seberapa banyak, untuk siapa dan kapan setiap hasil yang diwujudkan. Singkatnya, teori perubahan memeriksa dan mewakili. Ada tiga asumsi standar yang harus dikaji dalam rencana penanggulangan. berhubungan dengan: (i) kausalitas, (ii) implementasi dan (iii) eksternalitas.

Teori perubahan tidak akan lengkap tanpa asumsi bahwa pemangku kepentingan harus menjelaskan proses perubahan. Asumsi menjelaskan hubungan antara tujuan awal, menengah, dan jangka panjang serta harapan tentang bagaimana dan mengapa intervensi ditawarkan. Asumsi sering didukung Penelitian yang menegaskan pertanyaan tersebut harus memahami teori yang mengungkapkan tujuan dan kemungkinan yang dapat dicapai. Metode perencanaan dan evaluasi perubahan sosial yang baik mengharuskan peserta menjadi jelas tentang tujuan jangka panjang, mengidentifikasi indikator keberhasilan yang terukur, dan mengartikulasikan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **5.2 Teori Perubahan menurut Kurt Lewin**

Teori Kurt Lewin dikenal sebagai model Lewin. Model ini menjelaskan tahapan penerapan perubahan terencana dan perbaikan berkelanjutan untuk mempromosikan keberlanjutan jangka panjang dalam manajemen organisasi. Perubahan terencana diklasifikasikan sebagai upaya yang disengaja dilakukan melalui perhitungan yang cermat dan bersifat kolaboratif untuk memperbaiki sistem melalui agen perubahan. Dapat dikatakan bahwa perubahan terencana adalah suatu proses yang kompleks. Tahapan perubahan menurut Lewin antara lain:



1. *Unfreezing* (Tahap Pencairan)

*Unfreezing* adalah tahap pertama dari teori perubahan Lewin. Pada tahap ini, harus mampu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan untuk mendukung perubahan dan menggerakkan seluruh elemen organisasi untuk memahami urgensi perubahan. Pada titik ini, terjadi kesenjangan (*gap*) antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan saat ini (*status quo*). apabila solusi sudah ditemukan dan bersiap memasuki fase "*changing*".

2. *Changing* (Tahap Perubahan)

Tahap kedua dalam teori perubahan Lewin adalah perubahan atau moving, perlu ditekankan pada tahap ini bahwa perubahan merupakan proses peralihan, bukan peristiwa atau aktivitas. Pada tahap ini organisasi harus melakukan proses identifikasi dan evaluasi, yang terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi tentang kekuatan signifikan organisasi, kemudian identifikasi atau evaluasi. mengembangkan solusi alternatif dan memilih tindakan mana yang tepat untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam proses perubahan yang direncanakan

3. *Refreezing* (Tahap Pembekuan)

Tahap akhir CATS diusulkan oleh Kurt Lewin adalah fase pendinginan. Poin utama *refreezing* adalah bahwa dalam kondisi tertentu perilaku harus sesuai dengan seluruh lingkungan, jika tidak maka akan terjadi perubahan. sulit untuk dikonfirmasi. Hal ini biasanya diikuti dengan pengukuran (evaluasi) efisiensi dan efektifitas (efisiensi) masing-masing divisi.

### 5.3 Teori Perubahan menurut Rogers E

Menurut Rogers E mengadakan suatu perubahan perlu adanya langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan dapat tercapai, Roger menjelaskan lima tahap dalam perubahan, yaitu: Kesadaran, Keinginan, Evaluasi, Mencoba, dan Penerimaan atau dikenal juga AIETA (Awareness, Interest, Evaluation, Trial and Adoption). Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Tahap Awareness (Kesadaran)

Tahap ini merupakan tahap awal dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah, apabila tidak ada kesadaran untuk berubah maka tidak mungkin tercipta suatu perubahan.

2. Tahap Interest (Ketertarikan)

Tahap yang kedua dalam mengadakan perubahan harus timbul perasaan minat terhadap perubahan. Timbul minat yang mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah.



3. Tahap Evaluation (Evaluasi)  
Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Evaluasi ini dapat memudahkan tujuan dan langkah dalam melakukan perubahan.
4. Tahap Trial (Percobaan)  
Tahap ini adalah tahap uji coba terhadap suatu yang baru hasil perubahan dengan harapan suatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada dan memudahkan untuk diterima oleh lingkungan
5. Tahap Adoption (Penerimaan)  
Tahap ini merupakan tahap akhir dari perubahan yaitu proses penerimaan terhadap suatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari suatu program sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan.

#### **5.4 Klaster Indikator Utama dan Program Penanggulangan Kemiskinan**

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Strategi kebijakan **Klaster I** adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Program pada Klaster 1 mencakup **Bantuan dan Perlindungan Sosial, adalah dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dll.**
2. Strategi kebijakan **Klaster II** adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini termasuk **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif.**
3. Strategi Kebijakan **Klaster III** adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Di dalamnya meliputi **program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).**



4. Strategi kebijakan **Klaster IV** adalah pembangunan infrastruktur yang mencakup **Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Listrik Murah dan Hemat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.**

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5. 1 Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan**

Sumber: TNP2K, 2011

### 5.5 Lokasi Prioritas

Lokasi Prioritas untuk percepatan penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/ PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/ Dusun/ RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

Terdapat 7 indikator penentu dalam menentukan kelayakan ataupun ketidaklayakan dalam pendataan P3KE. Adapun tujuh indikator tersebut meliputi:

1. Masyarakat penduduk miskin ekstrem berpendidikan rendah;
2. Minim akses pada pekerjaan;



3. Banyak dari kelompok lansia tanpa/minim penghasilan dalam hal ini per/hari Rp.10.999;
4. Umumnya memiliki akses yang minim pada sanitasi layak;
5. Umumnya tidak memiliki akses pada air minum layak;
6. Mayoritas tinggal di rumah tidak layak huni; dan
7. Mayoritas balita dari keluarga miskin ekstrem belum mendapat imunisasi dasar yang lengkap cenderung malnutrisi.

Berikut adalah data P3KE Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 yang dirangkum menurut KK per Kecamatan.

#### **5.4.1. Masyarakat Penduduk Miskin Ekstrem Berpendidikan Rendah**

Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan pendidikan terakhir yang pernah ditempuh.

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT



**Tabel 5. 1 Penduduk Miskin Menurut KK dan Pendidikan Terakhir per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Mahasiswa	Pendidikan (KK)									Jumlah
		Siswa SD	Siswa SMP	Siswa SMA	Tamat Perguruan Tinggi	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tidak Tamat SD	Tidak/ Belum Sekolah	
Arut Selatan	1	7	12	9	31	1116	649	615	106	27	<b>2573</b>
Arut Utara	0	0	0	0	10	344	134	93	89	6	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	0	1	1	2	7	440	156	92	50	16	<b>765</b>
Kumai	0	10	10	5	18	1441	543	416	229	54	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	0	5	6	3	12	759	318	363	46	10	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	1	2	6	3	6	556	312	230	29	7	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>84</b>	<b>4656</b>	<b>2112</b>	<b>1809</b>	<b>549</b>	<b>120</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE, 2022, diolah



Berdasarkan data jumlah KK miskin menurut pendidikan terakhir yang diselesaikan/ ditempuh, diketahui bahwa terdapat 4.656 KK yang menamatkan SD, 2.112 KK yang menamatkan SMP, dan 1.809 KK yang menamatkan SMA. Selain itu terdapat 549 KK yang tidak menamatkan SD. Sedangkan hanya terdapat 84 KK yang telah menamatkan perguruan tinggi. Selain itu adalah mahasiswa, siswa SD, Siswa SMP, Siswa SMA, dan Tidak/ Belum Sekolah. Sehingga fokus program pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan meliputi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program-program tersebut termasuk dalam **Klaster 1** dan sasarannya mencakup seluruh jenjang pendidikan.

Dapat diketahui juga bahwa Kecamatan dengan prioritas penanganan bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1. Kecamatan Kumai**
- 2. Kecamatan Arut Selatan**
- 3. Kecamatan Pangkalan Banteng**
- 4. Kecamatan Pangkalan Lada**
- 5. Kecamatan Kotawaringin Lama**
- 6. Kecamatan Arut Utara**

#### **5.4.2. Minim Akses Pada Pekerjaan**

Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan akses pada pekerjaan.

**Tabel 5. 2 Penduduk Miskin Menurut KK dan Pekerjaan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Pekerjaan (KK)									Jumlah
	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Pekerja Lepas	Pensiunan	Petani	Tidak/ Belum Bekerja	Wiraswasta	Lainnya	
Arut Selatan	107	163	431	755	11	621	105	352	28	<b>2573</b>
Arut Utara	0	8	93	36	2	437	15	66	19	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	22	42	105	161	2	288	44	93	8	<b>765</b>
Kumai	615	68	275	816	1	428	116	397	10	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	17	91	251	198	6	800	26	124	9	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	0	39	183	408	2	369	33	101	17	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>761</b>	<b>411</b>	<b>1338</b>	<b>2374</b>	<b>24</b>	<b>2943</b>	<b>339</b>	<b>1133</b>	<b>91</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE, 2022, diolah



Berdasarkan data jumlah KK miskin menurut akses terhadap pekerjaan, diketahui bahwa terdapat 2.943 KK yang bekerja sebagai petani, 2.374 KK yang bekerja sebagai Pekerja Lepas, 1.338 KK yang bekerja sebagai Pegawai Swasta, 1.133 KK yang bekerja sebagai Wiraswasta. Selain itu terdapat 761 KK yang bekerja sebagai Nelayan dan 411 KK yang bekerja sebagai Pedagang. Sisanya adalah 24 KK yang merupakan pensiunan dan 339 KK yang Tidak/ Belum Bekerja. Sehingga fokus program bidang ketenagakerjaan dalam penanggulangan kemiskinan meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif. Program-program tersebut termasuk dalam **Klaster 2** dan sasarannya mencakup seluruh jenis pekerjaan sesuai kebijakan dan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat program lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE) yang termasuk dalam **Klaster 3**.

Dapat diketahui juga bahwa yang prioritas penanganan bidang ketenagakerjaan Klaster 2 untuk Program PNPM adalah sebagai berikut.

- A. PNPM Mandiri Perdesaan:** sasarannya adalah penduduk atau KK miskin yang berlokasi bukan di perkotaan atau di perdesaan.
- B. PNPM Mandiri Agribisnis/ SADI (*Smallholder Agrubusiness Development Initiative*):** sasarannya adalah penduduk atau KK miskin yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Lokasi Prioritas meliputi:
  - 1. Kecamatan Pangkalan Banteng**
  - 2. Kecamatan Arut Selatan**
  - 3. Kecamatan Arut Utara**
  - 4. Kecamatan Kumai**
  - 5. Kecamatan Pangkalan Lada**
  - 6. Kecamatan Kotawaringin Lama**
- C. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas:** sasarannya adalah Ibu dan anak-anak Balita, penduduk atau KK miskin yang Tidak/ Belum Bekerja dan Lainnya.
- D. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP):** sasarannya adalah penduduk atau KK miskin yang berlokasi bukan di perkotaan atau di perdesaan, petani, nelayan, kelembagaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (Kelompok petani, nelayan, penambang, peladang berpindah, dan kelompok peduli lingkungan); Tata pemerintahan lokal (desa dan kabupaten) lokasi pilot PNPM LMP.
- E. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP):** sasarannya adalah OPD Daerah.
- F. PNPM Mandiri Perkotaan:** sasarannya adalah penduduk atau KK miskin yang berada di perkotaan, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (*stakeholders*).



- G. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan:** sasarannya adalah pada program pembangunan, perbaikan prasarana, dan sarana infrastruktur serta bidang lain guna mendukung peningkatan perekonomian.
- H. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW):** sasarannya adalah pada program daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia.
- I. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS):** sasarannya adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi (pada subbab selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut).
- J. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK):** sasarannya adalah pemerintah daerah, komunitas dan masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan.
- K. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP):** sasarannya adalah warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Lokasi Prioritas meliputi:
1. Kecamatan Kumai
  2. Kecamatan Arut Selatan
  3. Kecamatan Kotawaringin Lama
  4. Kecamatan Pangkalan Banteng
  5. Kecamatan Pangkalan Lada
  6. Kecamatan Arut Utara
- L. PNPM-Mandiri Pariwisata:** sasarannya adalah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwisata.
- M. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim):** sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (pada subbab selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut).

Prioritas penanganan bidang ketenagakerjaan **Klaster 2** untuk Program Padat Karya adalah sebagai berikut.

- a. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan.
- b. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor.



- c. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah.
- d. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik.
- e. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti; pasar perdesaan, embung (penampungan air di musim hujan) dan waduk.

Sedangkan prioritas penanganan bidang ketenagakerjaan **Klaster 3** adalah sebagai berikut.

1. **KUR:** sasarannya adalah hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Lokasi Prioritas meliputi:
  - 1) Kecamatan Arut Selatan
  - 2) Kecamatan Kumai
  - 3) Kecamatan Pangkalan Banteng
  - 4) Kecamatan Pangkalan Lada
  - 5) Kecamatan Kotawaringin Lama
  - 6) Kecamatan Arut Utara
2. **KUBE:** sasarannya adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan. Berdasarkan kriteria penduduk atau KK miskin yang tidak/ belum bekerja, maka lokasi prioritas untuk program ini adalah:
  - 1) Kecamatan Kumai
  - 2) Kecamatan Arut Selatan
  - 3) Kecamatan Kotawaringin Lama
  - 4) Kecamatan Pangkalan Lada
  - 5) Kecamatan Pangkalan Banteng
  - 6) Kecamatan Arut Utara

#### 5.4.3. Umumnya Memiliki Akses Yang Minim Pada Sanitasi Layak

Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan akses pada sanitasi layak.



**Tabel 5. 3 Penduduk Miskin Menurut KK dan Akses Pada Sanitasi Layak per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Memiliki Fasilitas BAB (KK)				Jumlah
	Ya, dengan Septic Tank	Ya, tanpa Septic Tank	Tidak, Jamban Umum/ Bersama	Lainnya	
Arut Selatan	2233	87	238	15	<b>2573</b>
Arut Utara	410	85	173	8	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	689	22	47	7	<b>765</b>
Kumai	2332	80	282	32	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	1366	100	45	11	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	927	157	34	34	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7957</b>	<b>531</b>	<b>819</b>	<b>107</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat 15,48% atau sebanyak 1.457 KK miskin yang belum memiliki akses pada sanitasi yang layak. Sehingga program yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah Program PNPM pada **Klaster 2**, yaitu:

- A. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS):** sasarannya adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Lokasi Prioritas untuk program penyediaan sanitasi layak adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Kumai
  2. Kecamatan Arut Selatan
  3. Kecamatan Arut Utara
  4. Kecamatan Pangkalan Lada
  5. Kecamatan Pangkalan Banteng
  6. Kecamatan Kotawaringin Lama
- B. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim):** sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Lokasi prioritas mengikuti program PAMSIMAS.

#### 5.4.4. Umumnya Tidak Memiliki Akses Pada Air Minum Layak

Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan akses pada air minum layak.



**Tabel 5. 4 Penduduk Miskin Menurut KK dan Akses Pada Air Minum Layak per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Sumber Air Minum (KK)								Jumlah
	Air Hujan	Air Kemasan/ Isi Ulang	Ledeng/ PAM	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Air Permukaan (Sungai, Danau, dll)	Lainnya	
Arut Selatan	2	357	677	861	576	28	0	72	<b>2573</b>
Arut Utara	0	6	126	134	153	12	184	61	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	0	36	37	75	566	35	16		<b>765</b>
Kumai	85	271	463	962	817	42	85	1	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	2	36	177	20	999	244	29	15	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	0	169	96	34	703	137	5	8	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>875</b>	<b>1576</b>	<b>2086</b>	<b>3814</b>	<b>498</b>	<b>319</b>	<b>157</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah



Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat 15,48% atau sebanyak 1.457 KK miskin yang belum memiliki akses pada sanitasi yang layak. Sehingga program yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah Program PNPM pada **Klaster 2**, yaitu:

**A. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS):** sasarannya adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Lokasi Prioritas untuk program penyediaan air minum layak adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Kumai
2. Kecamatan Arut Selatan
3. Kecamatan Arut Utara
4. Kecamatan Pangkalan Lada
5. Kecamatan Pangkalan Banteng
6. Kecamatan Kotawaringin Lama

**B. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim):** sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Lokasi prioritas mengikuti program PAMSIMAS.

**5.4.5. Mayoritas Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni**

Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan Rumah Tidak Layak Huni yang dikategorikan berdasarkan Jenis Atap, Jenis Dinding, Jenis Lantai, Sumber Penerangan, serta Akses Pada Sanitasi Layak dan Air Minum Layak.

**Tabel 5. 5 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Atap per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Jenis Atap (KK)						Jumlah
	Asbes/ Seng	Beton	Genteng	Jerami/ Ijuk/ Rumbia/ Daun- daunan	Kayu/ Sirap	Lainnya	
Arut Selatan	1796	40	514	2	206	15	<b>2573</b>
Arut Utara	549	1	14	0	110	2	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	708	1	22	0	31	3	<b>765</b>
Kumai	2026	40	508	56	93	3	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	1033	6	472	6	2	3	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	334	14	760	1	11	32	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6446</b>	<b>102</b>	<b>2290</b>	<b>65</b>	<b>453</b>	<b>58</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah



**Tabel 5. 6 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Dinding per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Jenis Dinding (KK)					Jumlah
	Bambu	Kayu/ Papan	Seng	Tembok	Lainnya	
Arut Selatan	1	1401	9	1157	5	2573
Arut Utara	0	637	9	28	2	676
Kotawaringin Lama	0	538	1	219	7	765
Kumai	0	1512	5	1185	24	2726
Pangkalan Banteng	0	699	2	818	3	1522
Pangkalan Lada	2	395	15	709	31	1152
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5182</b>	<b>41</b>	<b>4116</b>	<b>72</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah

**Tabel 5. 7 Penduduk Miskin Menurut KK dan Jenis Lantai per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Jenis Lantai (KK)					Jumlah	
	Bambu	Kayu/ Papan	Keramik/ Granit/ Marmer/ Ubin/ Tegel/ Teraso	Semen	Tanah		Lainnya
Arut Selatan	1	1052	538	948	29	5	2573
Arut Utara	0	621	25	24	4	2	676
Kotawaringin Lama	1	395	56	301	11	1	765
Kumai	3	1255	514	926	24	4	2726
Pangkalan Banteng	0	167	258	1030	67	0	1522
Pangkalan Lada	7	56	193	818	47	31	1152
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>3546</b>	<b>1584</b>	<b>4047</b>	<b>182</b>	<b>43</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah

**Tabel 5. 8 Penduduk Miskin Menurut KK dan Sumber Penerangan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Sumber Penerangan (KK)					Jumlah
	Genset/ Solar cell	Listrik Bersama	Listrik Pribadi > 900 Watt	Listrik Pribadi s/d 900 Watt	Non Listrik	
Arut Selatan	86	330	576	1530	51	<b>2573</b>
Arut Utara	371	86	3	127	88	<b>675</b>
Kotawaringin Lama	1	46	186	523	9	<b>765</b>
Kumai	94	435	398	1772	28	<b>2727</b>
Pangkalan Banteng	48	263	190	1007	14	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	9	249	159	731	4	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>609</b>	<b>1409</b>	<b>1512</b>	<b>5690</b>	<b>194</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah



Program yang dapat dilakukan untuk RTLH meliputi:

- A. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS):** sasarannya adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Program ini telah dibahas pada subbab sebelumnya.
- B. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim):** sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Lokasi prioritas untuk program ini mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Lama sesuai dengan kebijakan dan perundangan yang berlaku terkait RTLH dan Permukiman Kumuh.

#### 5.4.6. Mayoritas Balita Dari Keluarga Miskin Ekstrem Belum Mendapat Imunisasi Dasar Yang Lengkap Cenderung Malnutrisi

Balita malnutrisi pada subbab ini dinilai berdasarkan data P3KE pada kategori KK dengan Resiko *Stunting*. Berikut adalah jumlah KK yang termasuk dalam kondisi miskin berdasarkan Resiko *Stunting*.

**Tabel 5. 9 Penduduk Miskin Menurut KK dan Sumber Penerangan per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Kecamatan	Resiko Stunting (KK)			Jumlah
	0	1	2	
Arut Selatan	469	1537	567	<b>2573</b>
Arut Utara	112	456	108	<b>676</b>
Kotawaringin Lama	181	326	258	<b>765</b>
Kumai	424	1649	653	<b>2726</b>
Pangkalan Banteng	224	935	363	<b>1522</b>
Pangkalan Lada	135	703	314	<b>1152</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1545</b>	<b>5606</b>	<b>2263</b>	<b>9414</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah

Berdasarkan data tersebut diketahui sebanyak 5.606 KK beresiko *Stunting* 1 dan 2.263 KK beresiko *Stunting* 2. Program yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah:

- A. Program Keluarga Harapan (PKH)**
- B. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)**
- C. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)**

Ketiga program tersebut termasuk dalam **Klaster 1** Program Penanggulangan Kemiskinan. Lokasi prioritas *Stunting* 1 adalah sebagai berikut.

- 1. Kecamatan Kumai**
- 2. Kecamatan Arut Selatan**
- 3. Kecamatan Pangkalan Banteng**



4. Kecamatan Pangkalan Lada
5. Kecamatan Arut Utara

Sedangkan Lokasi prioritas *Stunting 2* adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Kumai
2. Kecamatan Arut Selatan
3. Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Kecamatan Pangkalan Lada
5. Kecamatan Kotawaringin Lama
6. Kecamatan Arut Utara

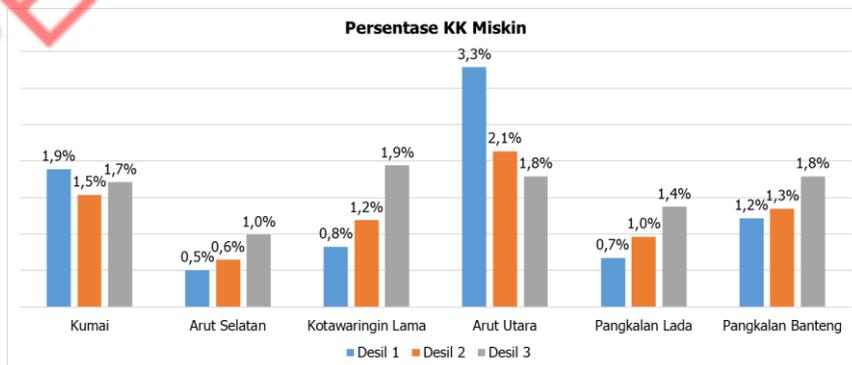
#### 5.4.7. Lokasi Prioritas Berdasarkan Desil

Berdasarkan data P3KE Kabupaten Kotawaringin Barat, desil yang didapatkan adalah desil 1 sampai dengan desil 3. Dimana berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah KK miskin pada Desil 1 berjumlah 2.760 KK, Desil 2 sebanyak 2.863 KK, dan Desil 3 sebanyak 3.791 KK. Sehingga total penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 9.414 KK. Desil-desil berdasarkan hasil olahan data P3KE tersebut akan menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah data P3KE berdasarkan Desil.

**Tabel 5. 10 Data P3KE Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Kumai	1.003	816	907	<b>2.726</b>	<b>9.083</b>	<b>331</b>
2	Arut Selatan	606	777	1.190	<b>2.573</b>		
3	Kotawaringin Lama	160	230	375	<b>765</b>		
4	Arut Utara	308	200	168	<b>676</b>		
5	Pangkalan Lada	258	369	525	<b>1.152</b>		
6	Pangkalan Banteng	425	471	626	<b>1.522</b>		
<b>Jumlah</b>		<b>2.760</b>	<b>2.863</b>	<b>3.791</b>	<b>9.414</b>		

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah



**Gambar 5. 2 Persentase KK Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah



**Tabel 5. 11 Data P3KE Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin				Jiwa
			Desil 1 (KK)	Desil 2 (KK)	Desil 3 (KK)	KK	
<b>1</b>	Kumai	Candi	69	77	96	242	1083
		Kumai Hulu	82	67	100	249	1188
		Kumai Hilir	118	56	57	231	1080
		Sungai Cabang	59	14	6	79	404
		Teluk Pulai	14	12	8	34	136
		Sebuai	10	13	11	34	149
		Keraya	4	5	2	11	50
		Teluk Bogam	91	45	43	179	748
		Sungai Bakau	95	49	43	187	756
		Kubu	193	97	69	359	1536
		Sungai Kapitan	125	86	96	307	1351
		Batu Belaman	15	47	41	103	478
		Sungai Tendang	44	81	91	216	941
		Sungai Sekonyer	10	16	24	50	201
		Sungai Bedaun	13	31	33	77	346
		Bumi Harjo	20	73	119	212	943
		Pangkalan Satu	20	44	59	123	529
Sabuai Timur	21	3	9	33	157		
	<b>Jumlah</b>	<b>1003</b>	<b>816</b>	<b>907</b>	<b>2726</b>	<b>12076</b>	
<b>2</b>	Arut Selatan	Mendawai Seberang	2	9	14	25	121
		Mendawai	59	79	162	300	1403
		Madurejo	94	132	202	428	2028
		Sidorejo	68	100	147	315	1406
		Raja	8	21	34	63	290
		Raja Seberang	6	14	23	43	206
		Baru	97	99	157	353	1657
		Tanjung Putri	29	15	15	59	257
		Pasir Panjang	34	34	65	133	575
		Rangda	35	24	16	75	313
		Kenambui	43	24	21	88	350
		Runtu	8	17	34	59	240
		Umpang	13	32	32	77	320
		Kumpai Batu Bawah	7	7	23	37	146
		Kumpai Batu Atas	26	55	104	185	804
		Natai Raya	13	25	42	80	350
		Medang Sari	20	37	34	91	400
Natai Baru	10	14	24	48	222		
Tanjung Terantan	13	11	17	41	174		
Sulung	21	28	24	73	300		
	<b>Jumlah</b>	<b>606</b>	<b>777</b>	<b>1190</b>	<b>2573</b>	<b>11562</b>	



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin				Jiwa
			Desil 1 (KK)	Desil 2 (KK)	Desil 3 (KK)	KK	
<b>3</b>	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	1	13	45	59	129
		Kotawaringin Hilir	18	17	27	62	237
		Babual Baboti		1	8	9	27
		Tempayung		1	2	3	9
		Sakabulin	1		2	3	8
		Kinjil	11	9	20	40	118
		Dawak	6	12	18	36	138
		Riam Durian	51	56	46	153	528
		Lalang			5	5	15
		Rungun	4	10	34	48	148
		Kondang	10	16	23	49	187
		Suka Jaya	7	20	23	50	207
		Suka Makmur	14	24	22	60	224
		Sumber Mukti	1	7	14	22	74
		Palih Baru	16	22	37	75	301
		Ipuh Bangun Jaya	15	8	20	43	150
		Sagu Suka Mulya	5	14	29	48	186
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>230</b>	<b>375</b>	<b>765</b>	<b>2686</b>	
<b>4</b>	Arut Utara	Pangkut	48	28	29	105	402
		Nanga Mua	23	15	8	46	201
		Sukarami	4	5	5	14	54
		Gandis	15	17	9	41	155
		Kerabu	19	20	12	51	186
		Sambi	66	36	28	130	511
		Penyombaan	29	14	18	61	252
		Pandau	35	19	9	63	252
		Riam	7	10	13	30	133
		Panahan	33	24	27	84	338
		Sungai Dau	29	12	10	51	209
	<b>Jumlah</b>	<b>308</b>	<b>200</b>	<b>168</b>	<b>676</b>	<b>2693</b>	
<b>5</b>	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	23	50	57	130	567
		Pandu Sanjaya	15	29	69	113	474
		Lada Mandala Jaya	32	36	53	121	488
		Makarti Jaya	4	10	18	32	134
		Sumber Agung	25	30	67	122	538
		Purbasari	45	65	53	163	622
		Sungai Rangit Jaya	16	14	25	55	228
		Pangkalan Dewa	38	32	46	116	486
		Kadipi Atas	12	23	32	67	279
Sungai Melawen	31	61	80	172	708		



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin				Jiwa
			Desil 1 (KK)	Desil 2 (KK)	Desil 3 (KK)	KK	
		Pangkalan Durin	17	19	25	61	263
		<b>Jumlah</b>	<b>258</b>	<b>369</b>	<b>525</b>	<b>1152</b>	<b>4787</b>
<b>6</b>	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	54	38	51	143	619
		Mulya Jadi	20	34	29	83	370
		Karang Mulya	8	17	30	55	257
		Kebun Agung	9	15	34	58	258
		Sido Mulyo	8	27	26	61	259
		Marga Mulya	17	26	39	82	376
		Amin Jaya	35	61	113	209	888
		Arga Mulya	35	19	28	82	327
		Natai Kerbau	30	38	36	104	427
		Simpang Berambai	9	19	19	47	216
		Sungai Hijau	90	61	65	216	960
		Sungai Pakit	31	31	44	106	472
		Berambai Makmur	2	1	1	4	17
		Karang Sari	23	24	16	63	278
		Sungai Pulau	6	10	14	30	122
		Sungai Bengkuang	31	23	32	86	405
		Sungai Kuning	17	27	49	93	382
		<b>Jumlah</b>	<b>425</b>	<b>471</b>	<b>626</b>	<b>1522</b>	<b>6633</b>
		<b>Total KK Miskin</b>	<b>2760</b>	<b>2863</b>	<b>3791</b>	<b>9414</b>	<b>40437</b>

Sumber: P3KE Kemenkopmk, 2022, diolah

Berdasarkan data tersebut, lokasi Prioritas berdasarkan desil adalah sebagai berikut:

### Desil 1:

1. Kecamatan Kumai
2. Kecamatan Arut Selatan
3. Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Kecamatan Arut Utara
5. Kecamatan Pangkalan Lada
6. Kecamatan Kotawaringin Lama

### Desil 2:

1. Kecamatan Kumai
2. Kecamatan Arut Selatan
3. Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Kecamatan Pangkalan Lada
5. Kecamatan Kotawaringin Lama
6. Kecamatan Arut Utara

### Desil 3:

1. Kecamatan Arut Selatan
2. Kecamatan Kumai
3. Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Kecamatan Pangkalan Lada
5. Kecamatan Kotawaringin Lama
6. Kecamatan Arut Utara



## **BAB VI PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023-2028**

Penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah telah menjalankan program-program untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, memperkuat lembaga sosial ekonomi masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah terpinggirkan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil.

Namun, semua usaha tersebut belum optimal jika tidak didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mencapai percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, empat strategi utama telah dirumuskan. Strategi-strategi ini termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial.

Penerapan strategi ini antara lain didasari oleh kenyataan besar jumlah masyarakat yang berisiko jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Selain menghadapi masalah tingginya potensi kerentanan sosial, Indonesia juga menghadapi fenomena populasi penduduk yang menua (population ageing) dalam struktur demografinya. Hal ini dapat menyebabkan beban ekonomi bagi generasi muda untuk mengurus mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar.

Mengoptimalkan jangkauan komunitas miskin terhadap layanan dasar. Jangkauan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta makanan dan gizi akan membantu mengurangi pengeluaran yang harus dibebankan kepada komunitas miskin. Di sisi lain peningkatan jangkauan terhadap layanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (kapital manusia).

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.

Kepentingan pelaksanaan strategi dengan prinsip ini mengingatkan kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak memihak



kepada orang-orang miskin. Hal ini mengakibatkan hasil pertumbuhan tidak terbagi secara adil di semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak memiliki kekuatan, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara sebanding.

4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan dan pada saat yang sama memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat dikurangi dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir dapat dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat efek pengganda pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, dilakukan program penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan. Program-program ini difokuskan pada mereka yang berada dalam kondisi miskin dan hampir miskin. Diharapkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada mereka yang membutuhkan akan lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Kelompok pertama adalah program – program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan, (PKH – *conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk *in-kind*, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta himbauan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah



memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berikut adalah indikasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

**Tabel 6. 1 Indikasi Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028**

No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
<b>I</b>	<b>Klaster I: Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>								
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Dinas Sosial	APBN
2	Kartu Sembako/ Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	6 (enam) kecamatan						Bappeda, Perum BULOG, Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN
3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN
4	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN
5	Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	6 (enam) kecamatan						BPJS, Dinas Kesehatan, Puskesmas	APBD
6	Bantuan Layanan Kesehatan Gizi	6 (enam) kecamatan						Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas	APBN, APBD
7	Bantuan sosial untuk pengungsi/ korban bencana	6 (enam) kecamatan						Bappeda, BNPB, BPBD, Dinas Sosial	APBN
8	Bantuan untuk penyandang cacat	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, PT.POS Indonesia, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN
9	Bantuan untuk kelompok lansia	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
10	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Dinas Sosial	APBN
11	Program Indonesia Pintar (PIP)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial	APBN
12	Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Bank	APBN
13	Program Pengelolaan Pendidikan	6 (enam) kecamatan						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD
14	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	6 (enam) kecamatan						Dinas PMD, Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6 (enam) kecamatan						Dinas Perkim	APBN, APBD
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6 (enam) kecamatan						Dinas PUPR	APBN, APBD
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6 (enam) kecamatan						Dinas PUPR	APBN, APBD
18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN, APBD



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
19	Program Pemberdayaan Sosial	6 (enam) kecamatan						Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
20	Program Rehabilitasi Sosial	6 (enam) kecamatan						Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
21	Kemitraan Pengobatan Pasien Kurang Mampu Rawat Inap dan Obat-Obatan Kelas III	Kabupaten Kotawaringin Barat						RSUD	APBD
<b>II Klaster II: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat</b>									
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)								
a	PNPM Mandiri Perdesaan	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Kemendagri, Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, Swasta	APBN, KPBU, CSR
b	PNPM Mandisi Agribisnis (SADI)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Kemendagri, Swasta	APBN, KPBU, CSR
c	PNPM Generasi Sehat dan Cerdas	6 (enam) kecamatan						Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PMD, Kemendagri, Swasta	APBN, KPBU, CSR
d	PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Kemendagri, Swasta	APBN, KPBU, CSR
e	Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Kemendagri, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, Swasta	APBN, KPBU, CSR



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
f	PNPM Mandiri Perkotaan	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR, Kemendagri	APBN
g	PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Kemendagri, Kementerian PUPR, Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN, APBDes
h	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR	APBN, KPBU
i	Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Masyarakat, Swasta	APBN, KPBU, CSR
j	PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)	6 (enam) kecamatan						Kementerian PMD, Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN, KPBU, CSR
k	PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Swasta	APBN, KPBU, CSR
l	PNPM-Mandiri Pariwisata	6 (enam) kecamatan						Bappeda, Dinas Pariwisata, TKPK Kabupaten, Swasta	APBD, KPBU
m	PNPM-Mandiri Perumahan dan	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Swasta	APBN, CSR



# RKPD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Tahun 2023 - 2028



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
	Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)								
2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif								
a	Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura; Sub Sektor Peternakan; Sub Sektor Perikanan)	6 (enam) kecamatan						Dinas TPHP, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBN, APBD
b	Bidang Usaha Industri Kecil	6 (enam) kecamatan						Dinas PerindagkopUKM, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
c	Sarana Penunjang Ekonomi Rakyat	6 (enam) kecamatan						Dinas TPHP, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas PerindagkopUKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	6 (enam) kecamatan						Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6 (enam) kecamatan						Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
5	Program Pengelolaan Persampahan/ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 (enam) kecamatan						Dinas Lingkungan Hidup	APBD



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
<b>III</b>	<b>Klaster III: Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi Mikro dan Kecil</b>								
1	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6 (enam) kecamatan						Kemeko Perekonomian, Kemenkeu, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kemendagri, Kementerian Pariwisata, Bappenas, Bank	APBN, KPBU, PMN
2	Kredit Usaha Bersama (KUBE)	6 (enam) kecamatan						Kementerian Sosial, Dinas Sosial	APBN, APBD
3	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	6 (enam) kecamatan						Kemenkeu, BLU	APBN, KPBU, PMN
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabupaten Kotawaringin Barat						Dinas PerindagkopUKM	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	6 (enam) kecamatan						Dinas PMD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	6 (enam) kecamatan						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
7	Program Penempatan Tenaga Kerja	6 (enam) kecamatan						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
8	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	6 (enam) kecamatan						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6 (enam) kecamatan						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
10	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	6 (enam) kecamatan						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	APBD
<b>IV Klaster IV: Pembangunan infrastruktur</b>									
1	Program Rumah Sangat Murah	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR	APBN
2	Program Kendaraan Angkutan Umum Murah	6 (enam) kecamatan						Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan	APBN
3	Program Air Bersih untuk Rakyat	6 (enam) kecamatan						Kementerian PUPR	APBN, CSR
4	Program Listrik Murah dan Hemat	6 (enam) kecamatan						Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi	APBN
5	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan	6 (enam) kecamatan						KemenPUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, CSR



# RKPD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Tahun 2023 - 2028



No	Klaster/ Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					OPD Pengampu	Skema Pembiayaan
			2024	2025	2026	2027	2028		
6	Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan	6 (enam) kecamatan						Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DisperindagkopUKM, Dinas Pariwisata, Swasta	APBD, KPBU, CSR

Sumber: Tim Penyusun, 2023

BAPPEDALITBANG KABUPATEN KOTAWARINGIN